

**DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



LAPORAN KINERJA 2020

 @ditjen_pkh  Ditjen PKH Kementan RI  @ditjen_pkh

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 dapat tersusun. Laporan Kinerja ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2020.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja mencakup ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk terwujudnya *Good Governance*.

Jakarta, 15 Februari 2021

Direktur Jenderal,



Nasrullah



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	12
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja	13
1.4 Sumber Daya Manusia	16
1.5 Dukungan Anggaran.....	17
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
1.6 Rencana Strategis (Renstra)	19
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	27
2.3 Perjanjian Kinerja	28
III AKUNTABILITAS KINERJA	32
1.7 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran.....	32
1.8 Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2020.....	32
3.3 Kinerja Lainnya.....	114
3.4 Akuntabilitas Keuangan	116
IV PENUTUP.....	119



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran Ditjen PKH TA. 2020 Per Kewenangan Per Jenis Belanja	17
Tabel 2.	Anggaran Ditjen PKH TA. 2020 Per Kegiatan.....	18
Tabel 3.	Indikator Tujuan Ditjen PKH.....	22
Tabel 4.	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tahun 2020-2024	23
Tabel 5.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024	28
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2020	29
Tabel 7.	Kegiatan/Output Ditjen PKH TA. 2020	30
Tabel 8.	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020	34
Tabel 9.	Realisasi IKU Peningkatan Produksi Daging	36
Tabel 10.	Pertumbuhan produksi daging pada tahun 2018-2020.....	37
Tabel 11.	Data Penurunan Produksi Daging Kambing dan Domba di Sentra Produsen Tahun 2020	39
Tabel 12.	Penambahan Indukan Impor 2015, 2016 dan 2018	40
Tabel 13.	Kegiatan Pendukung IKU 1 Tahun 2020	43
Tabel 14.	Kinerja Penguatan Kelembagaan dan Hilirisasi Usaha Pada Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi Tahun 2020.....	48
Tabel 15.	Rute Pelayaran dan Rekapitulasi Muatan Ternak Tahun 2020	49
Tabel 16.	Realisasi IKU Produksi Susu.....	50
Tabel 17.	Kegiatan Pendukung IKU 2 Tahun 2020	53
Tabel 18.	Realisasi IKU Peningkatan Produksi Telur.....	55
Tabel 19.	Perkembangan Produksi Telur (Ribuan Ton)	56
Tabel 20.	Kegiatan Pendukung IKU 3 Tahun 2020	57
Tabel 21.	Realisasi IKU peningkatan nilai ekspor untuk produk peternakan.....	60
Tabel 22.	Capaian Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 ..	61
Tabel 23.	Nilai Ekspor Komoditas Peternakan dan Keswan Tahun 2015-2020	61
Tabel 24.	Perbandingan Rincian Ekspor Produk Non Pangan.....	62
Tabel 25.	Kegiatan Pendukung IKU 4 Tahun 2020	66
Tabel 26.	Realisasi IKU Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	74



Tabel 27. Kegiatan Pendukung IKU 5 Tahun 2020	76
Tabel 28. Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Peternakan.....	78
Tabel 29. Realisasi IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Peternakan.....	78
Tabel 30. Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	80
Tabel 31. Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	81
Tabel 32. Tingkat kemanfaatan Sarana Prasarana Perbibitan dan Produksi.....	82
Tabel 33. Tingkat kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolah Pakan.....	84
Tabel 34. Kegiatan Pendukung IKU 6 Tahun 2020	85
Tabel 35. Perhitungan Persentase wilayah yang terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis	87
Tabel 36. Data status kesehatan hewan per provinsi tahun 2020.....	87
Tabel 37. Kegiatan Pendukung IKU 7 Tahun 2020	91
Tabel 38. Capaian Indikator Jumlah Maksimal Kasus <i>Zoonosis</i> yang Terjadi Penularan kepada Manusia.....	93
Tabel 39. Jumlah Kasus <i>Rabies</i> , <i>Ai</i> dan <i>Anthrax</i> Tahun 2019 - 2020.....	94
Tabel 40. Data Kasus <i>Zoonosis</i> Tahun 2016-2020	95
Tabel 41. Kegiatan Pendukung IKU 8 Tahun 2020	97
Tabel 42. Realisasi Nilai PMPRB Ditjen PKH tahun 2020	100
Tabel 43. Kegiatan Pendukung IKU 9 Tahun 2020	102
Tabel 44. Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	105
Tabel 45. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH.....	105
Tabel 46. Nilai Unsur Pelayanan SKM Tahun 2020	106
Tabel 47. Kegiatan Pendukung IKU 10 Tahun 2020	109
Tabel 48. Realisasi Capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH	110
Tabel 49. Kegiatan Pendukung IKU 11 Tahun 2020	113
Tabel 50. Realisasi anggaran per Kegiatan	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan tahun 2020.....	60
Gambar 2.	Capaian Kinerja Anggaran Ditjen PKH Tahun 2020.....	111
Gambar 3.	Penghargaan Unit Kerja Informatif Tahun 2020 Lingkup Kementerian Pertanian.....	114
Gambar 4.	Penghargaan Unit Kerja Informatif Tahun 2020 Lingkup Kementerian Pertanian.....	115
Gambar 5.	Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	115
Gambar 6.	Penghargaan UPT Berpredikat WBBM Nasional	116
Gambar 7.	Kronologi Perubahan Anggaran Tahun 2020	117



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi SDM Dtijen PKH Tahun 2020	17
Grafik 2. Kinerja Produksi Daging Tahun 2020	37
Grafik 3. Pengaturan Pengendalian Produksi Ayam Ras Pedaging Tahun 2020 ..	38
Grafik 4. Kinerja SIKOMANDAN Tahun 2020	44
Grafik 5. Realisasi KUR bidang Usaha Peternakan	45
Grafik 6. Realisasi Peserta dan Bantuan Premi AUTSK Tahun 2016-2020.....	46
Grafik 7. Realisasi Peserta AUTS/K Per Provinsi Berdasarkan DPD Tahun 2020	47
Grafik 8. Perkembangan Realisasi Investasi PMA-PMDN Sub Sektor Peternakan Tahun 2018-2020	47
Grafik 9. Pertumbuhan Produksi dan Impor Susu Tahun 2018-2020	52
Grafik 10. Perkembangan Produksi Susu Untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional	54
Grafik 11. Ekspor Komoditas PKH Tahun 2018-2020.....	66
Grafik 12. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2020	75
Grafik 13. Jumlah Maksimal Kasus Zoonosis yang Terjadi Penularan Kepada Manusia Tahun 2016-2020.....	93
Grafik 14. Realisasi anggaran per Jenis Belanja dan Kewenangan	117



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	123
Lampiran 2.	Data Pegawai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020.....	124
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	125
Lampiran 4.	Pernyataan Telah Direviu Oleh Itjen Kementan	128
Lampiran 5.	Perhitungan Nilai Efisiensi.....	129
Lampiran 6.	Tabel Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2016-2020.....	131
Lampiran 7.	Tabel Populasi Ternak Tahun 2016-2020	132
Lampiran 8.	Ekspor Sub Sektor Peternakan Tahun 2016 - 2020	133
Lampiran 9.	Surveilans pengawasan mutu pangan segar asal hewan	134
Lampiran 10.	Fasilitasi Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan	135
Lampiran 11.	Wilayah Kabupaten/Kota Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis.....	137
Lampiran 12.	Kasus Zoonosis (Rabies, Anthrax dan Avian Influenza).....	139
Lampiran 13.	Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen PKH Tahun 2020	140
Lampiran 14.	Hasil Pengukuran IKM Lingkup Ditjen PKH Tahun 2020.....	141
Lampiran 15.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker Lingkup Ditjen PKH Tahun 2020 Pada Aplikasi SMART Kemenkeu.....	142



RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020-2024 baru memasuki tahun pertama. Tantangan untuk mencapai peningkatan ketersediaan pangan asal ternak, pertumbuhan ekspor, terjaminnya mutu pangan asal ternak, tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis, terkendalinya kasus *zoonosis* pada manusia, terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, serta terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas. Upaya yang dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik pendekatan yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun pendekatan intervensi melalui belanja pemerintah (APBN).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun kebijakan di bidang produksi ternak dan pengembangan ternak. Untuk itu, Ditjen PKH mewujudkannya dalam bentuk program yaitu “Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat”, dengan sebelas indikator yaitu: (1) Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik); (2) Peningkatan produksi susu; (3) Peningkatan produksi telur; (4) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan; (5) Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; (6) Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan; (7) Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis; (8) Jumlah maksimal kasus *zoonosis* yang terjadi penularan kepada manusia; (9) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (10) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (11) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent, transparent*, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Capaian sasaran program Ditjen PKH pada tahun 2020 termasuk kategori berhasil. Capaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 berkisar antara 13,20% sampai dengan 258,60%. Dari sebelas indikator kinerja, Indikator kinerja yang masuk kategori sangat berhasil yaitu: (1) Peningkatan



produksi telur; (2) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan; (3) Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; (4) Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia; (5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (6) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS); serta (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Peternakan. Indikator kinerja yang masuk kategori berhasil yaitu Nilai PMPRB (pengungkit) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Indikator kinerja yang masuk kategori kurang berhasil yaitu: (1) Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik) dan (2) Peningkatan produksi susu.

Tahun 2020, alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Ditjen PKH sebesar Rp 1,299 Triliun dengan realisasi serapan anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 96,43% atau Rp 1,253 Triliun. Realisasi anggaran yang masih tersisa sebesar 3,57% disebabkan oleh 1) Pelaksanaan pengadaan ternak untuk kegiatan pengembangan 1.000 (seribu) Desa Sapi terkendala karena waktu pelaksanaan yang singkat, sehingga penyedia kesulitan mendapatkan ternak yang sesuai dengan spesifikasi teknis, dan 2) Beberapa pengadaan yang tidak terealisasi dan sisa pengadaan barang dan jasa.

Rencana Kerja Tahun 2021, untuk menjawab permasalahan terkait dengan ketersediaan daging sapi/kerbau, maka upaya yang akan dilakukan oleh Ditjen PKH, antara lain:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
2. Menyusun program terobosan sebagai solusi untuk akselerasi percepatan peningkatan populasi dan produksi sapi/kerbau di dalam negeri.
3. Penambahan impor bibit sapi indukan untuk meningkatkan jumlah induk sapi/kerbau dalam negeri dengan mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tahun-tahun sebelumnya.
4. Memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.
5. Mendorong pembiayaan yang bersumber dari nonAPBN antara lain: kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara.
6. Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif.
7. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota).



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun kebijakan di bidang produksi ternak dan pengembangan ternak dengan fungsi mencakup kebijakan di bidang perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Kinerja Ditjen PKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat diukur dari aspek makro ekonomi dan aspek teknis peternakan dan kesehatan hewan. Dari aspek makro ekonomi terkait dengan kinerja produk domestik bruto peternakan, investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dan kesejahteraan peternak. Sedangkan dari aspek teknis peternakan dan kesehatan hewan dikaitkan dengan produksi dan populasi ternak.

Berdasarkan kinerja dari makro ekonomi menunjukkan bahwa untuk Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor peternakan selama lima tahun (2016-2020**) menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari PDB sektor pertanian. PDB subsektor peternakan tahun 2016 mencapai sebesar Rp 143.036,5 miliar meningkat menjadi sebesar Rp 167.084,8 miliar pada tahun 2020 atau meningkat 4,00% per tahun, sedangkan PDB sektor pertanian tahun 2016 sebesar Rp 936.356,9 miliar meningkat menjadi Rp 1.060.823,1 miliar pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 3,17% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor peternakan berpeluang sebagai sumber pertumbuhan baru sektor pertanian. Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada subsektor peternakan tumbuh positif pada periode tahun 2016-2020 yaitu dari Rp 465.549,30 juta menjadi Rp 5.510.911,30 juta secara kumulatif meningkat sebesar Rp 5.045.362 juta. Pada periode tahun 2016-2020, rata-rata nilai investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan sebesar 36,78% per tahun. Selanjutnya, peningkatan investasi PMA tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 221,60%.

Rata-rata pertumbuhan per tahun populasi ternak periode 2016-2020 terbesar yaitu ayam ras pedaging sebesar 20,27% dan ayam ras petelur sebesar 17,22%. Untuk populasi sapi potong dan sapi perah tumbuh positif sebesar 2,23% dan rata-rata 1,64% per tahun. Untuk ternak kecil yang terdiri dari kambing, domba dan babi masing-masing tumbuh sebesar 1,69%; 3,18% dan 3,53% per tahun. Populasi ternak yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu kerbau sebesar -1,00% dan kuda -1,85% per tahun.



Berdasarkan pertumbuhan produksi ternak periode 2016-2020, jumlah produksi daging ayam ras pedaging mendominasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,56% per tahun, sedangkan daging sapi potong dan kerbau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,07% dan -5,87% per tahun. Rata-rata pertumbuhan telur ayam ras petelur, ayam buras dan susu masing-masing meningkat sebesar 55,13%; 6,59% dan 0,95% per tahun. Produksi ternak tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu telur sebesar 5.355,6 ribu ton atau mencapai 140,44% dari target 3.770 ribu ton, sedangkan target produksi ternak yang tidak tercapai yaitu: daging sapi/ kerbau sebesar 514,4 ribu ton atau mencapai 68,13% dari target 755 ribu ton, dan susu sebesar 996,44 ribu ton atau mencapai 93,69% dari target 1.063,56 ribu ton. Dari aspek konsumsi, konsumsi daging menunjukkan bahwa konsumsi daging selama 2016-2020 menunjukkan angka yang berfluktuasi, yaitu pada tahun 2016 konsumsi tersebut disetarakan dengan protein hewani sebesar 3,35 gram/kapita/hari, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 4,05 gram /kapita/hari, serta telur dan susu pada periode yang sama naik 3,34 gram/kapita/hari menjadi 3,47 gram/kapita/hari.

Selain itu, Ditjen PKH masih menghadapi tantangan terkait: (1) Produksi daging sapi di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, sehingga masih diperlukan impor dalam bentuk daging sapi dan sapi bakalan; (2) Permasalahan stabilitas harga daging ayam ras *live bird* karena adanya *over supply*; (3) Kelembagaan yang terkait dengan efektivitas kemitraan, peran koperasi, dukungan perbankan dan asuransi; (4) Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM); (5) Infrastruktur berupa kualitas Rumah Potong Hewan (RPH) dan sarana transportasi; (6) Persaingan dan liberalisasi pasar; (7) Ketergantungan sarana produksi dari impor; (8) Penyakit eksotik; serta (9) Persaingan dalam penggunaan lahan dan alih fungsi lahan.

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas Ditjen PKH mewujudkannya dalam bentuk program yaitu “Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat”. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent, transparant, akuntabel, efektif dan efisien* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.



Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020. Selain itu juga untuk melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Kementerian Pertanian.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas “*merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan*”. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;



- 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II, yaitu Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Pakan, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, dan Sekretariat Direktorat Jenderal. Keenam Eselon II tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
2. Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pakan menyelenggarakan fungsi :



- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.
3. Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyehatan hewan secara individu dan populasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.
4. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan



kesehatan masyarakat veteriner. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari dan perumusan standar, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
- (b) pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari dan perumusan standar, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
- (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
- (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari dan perumusan standar, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan;
- (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari dan perumusan standar, *zoonosis*, serta kesejahteraan hewan; dan
- (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
- (b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
- (c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
- (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
- (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; dan
- (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

6. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :



- (a) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (b) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- (c) evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- (d) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (e) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

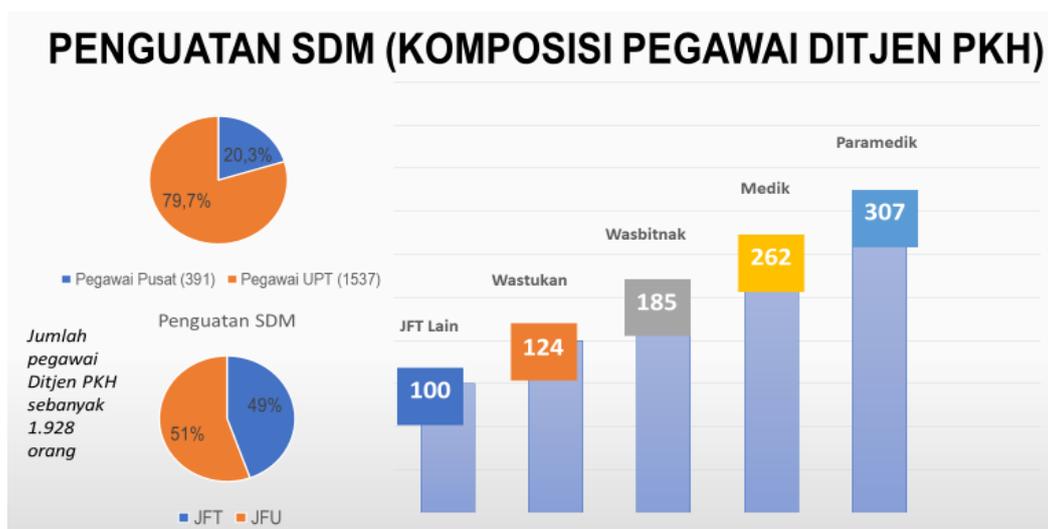
Struktur Organisasi Ditjen PKH Tahun 2020 disajikan pada Lampiran 1.

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Jumlah SDM Ditjen PKH pada tahun 2020 sebanyak 1.928 orang, yang terdiri dari:

1. Jumlah pegawai menurut Eselon II: Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 121 orang; Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak sebanyak 62 orang; Direktorat Pakan sebanyak 48 orang; Direktorat Kesehatan Hewan sebanyak 69 orang; Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 44 orang, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebanyak 47 orang.
2. Jumlah pegawai pusat dan UPT: Pegawai Kantor Pusat sebanyak 391 orang dan pegawai UPT sebanyak 1.537 orang.
3. Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 264 orang; golongan III sebanyak 1.227 orang; golongan II sebanyak 413 orang; dan golongan I sebanyak 24 orang.
4. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 21 orang; S-2 sebanyak 504 orang; S-1/D4 sebanyak 503 orang; Sarjana Muda/D3/D2 sebanyak 234 orang; SLTA sebanyak 572 orang; SLTP sebanyak 43 orang; dan SD sebanyak 51 orang.
5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: Laki-laki sebanyak 1.157 orang dan perempuan sebanyak 771 orang.
6. Medik Veteriner sebanyak 262 orang; Paramedik Veteriner sebanyak 307 orang; Pengawas Mutu Pakan sebanyak 124 orang; Pengawas Bibit Ternak sebanyak 185 orang; JFT lainnya sebanyak 100 orang; JFU sebanyak 71 orang; dan Struktural sebanyak 879 orang.





Grafik 1. Komposisi SDM Ditjen PKH Tahun 2020

Selengkapnya data pegawai Ditjen PKH disajikan pada Lampiran 2

1.5 Dukungan Anggaran

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Ditjen PKH pada tahun 2020 memperoleh dukungan dari APBN sebesar Rp 1,299 Triliun. Anggaran tersebut dibagi berdasarkan kewenangan, dimana bobot terbesar anggaran terdapat pada Kantor Daerah (KD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKH sebesar Rp 744,43 Miliar (64,14%).

Berdasarkan jenis belanja bobot terbesar pada Belanja Barang sebesar Rp 1,038 Triliun (79,89%), dan berdasarkan jenis kegiatan bobot terbesar pada Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp 619,45 Miliar (47,67%).

Tabel 1. Anggaran Ditjen PKH TA. 2020 Per Kewenangan Per Jenis Belanja

No	Kewenangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
1	Kantor Pusat	29.787.807.000	170.732.489.000	18.165.341.000	218.685.637.000
2	Kantor Daerah	112.802.314.000	531.057.568.000	100.613.235.000	744.473.117.000
3	Tugas Pembantuan Provinsi	-	336.436.524.000	-	336.436.524.000
	Total	142.590.121.000	1.038.226.581.000	118.778.576.000	1.299.595.278.000
	Proporsi	10,97%	79,89%	9,14%	100%

Sumber : Aplikasi OM SPAN

Tabel 2. Anggaran Ditjen PKH TA. 2020 Per Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Proporsi
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	77.088.165.000	5,93%
2	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	171.602.744.000	13,20%
3	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	619.452.682.000	47,67%
4	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	30.369.127.000	2,34%
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	375.253.827.000	28,87%
6	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	25.828.733.000	1,99%
Total		1.299.595.278.000	100%

Sumber : Aplikasi OM SPAN



II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1.6 Rencana Strategis (Renstra)

Dalam melaksanakan visi dan misinya pada tahun 2020, Ditjen PKH telah mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2020-2024, yang telah mengalami revisi pada bulan November 2020 menyesuaikan perubahan Renstra Kementerian Pertanian.

Visi

Ditjen PKH dengan mengacu visi Kementerian Pertanian “Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” merumuskan Visi Ditjen PKH sebagai berikut:

“Terwujudnya peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern”

Misi

Menjabarkan dari Visi yang ditetapkan, Ditjen PKH akan mengemban Misi:

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.

Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun *biomassa* ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.



3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat.

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar internasional.

5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing

Potensi basis komoditas dan produk unggulan subsektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing subsektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan Indonesia, antara lain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan sistem logistik, dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.



6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi profesional dan modern.

Reformasi birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan reformasi birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik. Misi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di atas, sudah relevan dengan misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian dan meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tujuan

Tujuan penting dari pembangunan Ditjen PKH selama 2020-2024 mencakup:

1. Tersedianya benih/bibit ternak yang berkualitas

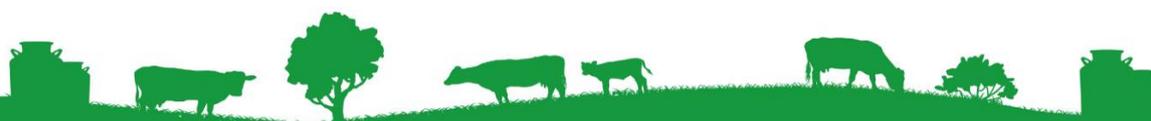
Bibit dan benih ternak merupakan komponen yang akan mempengaruhi dalam produksi. Untuk itu kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyediaan bibit/benih ternak berbasis sumber daya lokal harus dapat diwujudkan dengan baik. Upaya untuk penyediaan bibit dan benih ternak terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan melakukan pengembangan baik secara teknis maupun manajerial.

2. Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan

Pakan merupakan faktor penting didalam menghasilkan produk peternakan disamping bibit ternak. Penyediaan pakan yang berkualitas, murah dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam sistem produksi yang efisien. Optimalisasi penyediaan pakan berbasis bahan pakan lokal termasuk *biomassa* ikutan hasil tanaman dengan menggunakan teknologi yang adaptif dan modern sangat diperlukan menunjang peningkatan produksi.

3. Meningkatnya kesehatan hewan

Peningkatan kesehatan hewan ditujukan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) serta penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia (*zoonosis*). Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui tindakan penanggulangan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Keberhasilan dalam penanggulangan dan pengendalian diindikasikan dengan status kesehatan hewan disuatu wilayah (bebas, sporadik, endemik, dan wabah). Kegiatan seperti pengamatan penyakit



hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, bimbingan teknis dan pengawasan obat hewan adalah kegiatan yang terkait untuk meningkatkan status kesehatan hewan (*prevention better than cure*).

4. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional.

Penyelenggaraan Kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH), pengendalian dan penanggulangan zoonosis serta penerapan kesejahteraan hewan. Pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan kesejahteraan hewan pada produk hewan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hewan baik skala nasional maupun internasional.

5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing.

Produk peternakan baik pangan maupun non pangan harus mampu berkompetisi dengan produk sejenis dari luar, untuk itu peningkatan kualitas dan daya saing produk harus dapat diwujudkan. Disamping untuk penyediaan dalam negeri diharapkan produk peternakan juga mampu diekspor untuk pasar luar negeri. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing produk dilakukan melalui peningkatan SDM, pemenuhan standar mutu, serta pemanfaatan teknologi modern mulai dari proses pengolahan sampai distribusi pemasaran.

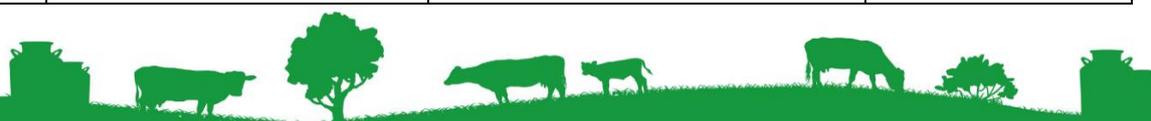
6. Terwujudnya reformasi birokrasi Ditjen PKH.

Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi profesional pada pelayanan prima, maka perbaikan 8 area perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut aspek kelembagaan, SDM, tata kelola aset, kebijakan, program dan penganggaran akan terus ditingkatkan. Sebagai organisasi publik, perbaikan dalam hal pelayanan yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan terus ditingkatkan. Tujuan dan indikator tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2020-2024.

Untuk mengukur tujuan yang akan dicapai maka ditetapkanlah indikator tujuan Ditjen PKH tahun 2020-2024 yang disampaikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Tujuan Ditjen PKH

Tujuan		Indikator Tujuan	Satuan
a.	Tersedianya bibit/benih ternak berkualitas dan berkesinambungan	Jumlah bibit/benih ternak tersertifikasi yang tersedia	Sertifikat
b.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pakan secara berkelanjutan	Pakan berkualitas dan berkelanjutan	Indeks
c.	Meningkatnya kesehatan hewan	Status kesehatan hewan	%



Tujuan		Indikator Tujuan	Satuan
d.	Terwujudnya Kesehatan masyarakat veteriner nasional	Jaminan kesehatan masyarakat veteriner	%
e.	Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing	Jumlah produk peternakan yang berhasil dihilirisasi	Ton
		Ekspor produk peternakan kuantitatif	US\$
f.	Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai <i>roadmap</i> RB Kementan	Nilai RB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Indeks

Sumber : Renstra Revisi 1 Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Sasaran

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi pangan asal hewan, daya saing dan pendapatan peternak. Masing-masing sasaran tersebut mempunyai indikator yang ingin dicapai selama kurun waktu 2020-2024 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Adapun IKSP tersebut disampaikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Tahun 2020-2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Satuan	Target	
					2020	2024
SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan produksi daging	%	0,4	1,28
		2	Peningkatan produksi susu	%	2,5	2,9
		3	Peningkatan produksi telur	%	2,15	2,16
SP2	Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan	4	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan	%	15	30
SP3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	5	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	81,5	83,5
SP4	Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan	6	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan	%	85	95
SP5	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan	7	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80	81
SP6	Terkendalnya kasus zoonosis pada manusia	8	Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Kasus	122	114



Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target		
			2020	2024	
SP7 Terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	9	Nilai PMPRB (pengungkit) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah	32,3	35,5
	10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala Likert (1-4)	3,37	3,58
SP8 Terkelolanya anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akuntabel dan berkualitas	11	Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,25	90,85

Sumber : Renstra Revisi I Ditjen PKH Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Arah dan Kebijakan

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyesuaikan dengan Kementerian Pertanian. Dalam arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tersebut telah ditetapkan kebijakan untuk peternakan dan kesehatan hewan yaitu :

a) Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan *Good Breeding* dan *Good Farming Practices*

Good Breeding Practices dan *Good Farming Practices* adalah pelaksanaan usaha peternakan di bidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. *Good Breeding Practises* dan *Good Farming Practices* meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit; pelestarian lingkungan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan. Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- 1) Penyelenggaraan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan
- 2) Penyediaan pakan yang cukup dan berkualitas berbasis bahan pakan lokal
- 3) Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir

b) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan kesehatan hewan

Peningkatan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk dari proses pengolahan hingga pemasaran peternakan. Daya saing merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki produk hewan nasional terhadap produk hewan negara lain. Peningkatan pada dua aspek nilai tambah dan daya saing akan memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional dari sektor pertanian.



Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- 1) Pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing
- 2) Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan

c) Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan higiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- 1) Meningkatkan kesehatan hewan untuk kesehatan manusia.
- 2) Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

d) Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundangundangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Arah kebijakan Kementerian Pertanian yang berkaitan langsung dengan rumusan kebijakan Ditjen PKH yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.



Program dan Kegiatan

1. Program

Dengan melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2020 –2024 maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah merumuskan programnya yaitu :

**“Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat”**

Program mengarah pada 2 (dua) kata kunci dalam program tersebut, yaitu: kata kunci pertama, pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada pencapaian peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu). Kata kunci kedua adalah agribisnis peternakan rakyat yang mengarah pada peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan.

2. Kegiatan

Untuk mencapai Sasaran Program yaitu: (1) Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak (2) Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan (3) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak (4) Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan dalam mendukung terwujudnya Sasaran Strategis Kementan yang terkait dengan Ditjen Peternakan dan Keswan, diperlukan langkah operasional sebagai berikut:

- a) Peningkatan produksi pakan ternak akan ditempuh dengan kegiatan/langkah operasional yaitu:
 - 1) Hijauan pakan ternak
 - 2) Pakan olahan dan bahan pakan
 - 3) Mutu dan keamanan pakan
 - 4) Norma, standar/pedoman dan kriteria pakan
- b) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dengan langkah operasional:
 - 1) Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan
 - 2) Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan
 - 3) Pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan
 - 4) Obat hewan dan bahan biologik
 - 5) Kelembagaan veteriner
 - 6) Norma, standar, pedoman dan kriteria kesehatan hewan
- c) Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak dengan langkah operasional:
 - 1) Optimalisasi reproduksi
 - 2) Benih ternak unggul
 - 3) Bibit ternak unggul
 - 4) Ternak ruminansia potong



- 5) Ternak ruminansia perah
- 6) Unggas dan aneka ternak (unggas dan babi)
- 7) Fasilitas dukungan teknis penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak
- d) Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH dengan langkah operasional:
 - 1) Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH
 - 2) Pengawasan mutu dan keamanan produk
 - 3) Pengendalian pemotongan betina produktif
 - 4) Sarana dan prasarana penjaminan keamanan produk hewan
 - 5) Norma, standar, pedoman, dan kriteria kesehatan masyarakat veteriner
- e) Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dengan langkah operasional:
 - 1) Pengembangan pengolahan pangan dan non pangan
 - 2) Pengembangan pemasaran peternakan
 - 3) Kelembagaan dan usaha peternakan
 - 4) Norma, standar, pedoman, dan kriteria pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
 - 5) Pengelolaan informasi pemasaran
- f) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan dengan langkah operasional
 - 1) Layanan dukungan manajemen eselon 1
 - 2) Layanan dukungan manajemen satker
 - 3) Layanan sarana dan prasarana internal
 - 4) Layanan perkantoran (gaji dan operasional)

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Rencana Strategis 2020-2024 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Utama Ditjen PKH Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 5.



Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

Sasaran Program		Indikator		Satuan	Target	
					2020	2024
SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	0,4	1,28
		2	Peningkatan produksi susu	%	2,5	2,9
		3	Peningkatan produksi telur	%	2,15	2,16
SP2	Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan Kesehatan hewan	4	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan	%	15	30
SP3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	5	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	81,5	83,5
SP4	Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan	6	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan	Indeks	85	95
SP5	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan	7	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80	81
SP6	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	8	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Kasus	122	114
SP7	Terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	9	Nilai PMPRB (pengungkit) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,3	35,5
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala likert (1-4)	3,37	3,58
SP8	Terkelolanya anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akuntabel dan berkualitas	11	Nilai kinerja anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,25	90,85

Sumber : Renstra Ditjen PKH Tahun 2020-2024 Revisi I

2.3 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2020 Direktur Jenderal PKH menyepakati perjanjian kinerja dengan 11 indikator yang ingin dicapai yaitu: (1) Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik); (2) Peningkatan produksi susu; (3)



Peningkatan produksi telur; (4) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan; (5) Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pakan; (6) Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan; (7) Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis; (8) Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia; (9) Nilai PMPRB (pengungkit) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (10) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (11) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selengkapnya target indikator kinerja perjanjian kinerja Dirjen PKH Tahun 2020 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2020

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Target 2020
SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	0,4
		2	Peningkatan produksi susu	%	2,5
		3	Peningkatan produksi telur	%	2,15
SP2	Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan	4	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan	%	15
SP3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	5	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	81,5
SP4	Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan	6	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan yang sesuai peruntukan	%	85
SP5	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan	7	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80
SP6	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	8	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Kasus	122
SP7	Terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	9	Nilai PMPRB (pengungkit) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,3
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala likert (1-4)	3,37



SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Target 2020
SP8	Terkelolanya anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akuntabel dan berkualitas	11	Nilai kinerja anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,25

Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Menteri Pertanian Tahun 2020 disampaikan pada Lampiran 3. Untuk mencapai sasaran program tersebut, pada tahun 2020 Ditjen PKH melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel 7. Kegiatan/Output Ditjen PKH TA. 2020

Kegiatan / Output		Satuan	Pagu (Rp.)	Target (Volume)
1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak		77.088.165.000	11.256
400	Hijauan Pakan Ternak	Ha	21.682.142.000	1.069
400	Pakan Olahan dan bahan pakan	Ton	42.186.577.000	7.836
400	Mutu dan keamanan pakan	Sampel	6.895.174.000	2.346
400	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	NSPK	6.324.272.000	5
1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan		171.602.744.000	20.093.377
401	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Sampel	37.432.459.000	98.000
402	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Dosis	43.335.465.000	2.978.886
404	Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	Sampel	6.079.670.000	1.410
405	Obat Hewan dan Bahan Biologik	Dosis	22.313.023.000	5.147.575
406	Kelembagaan Veteriner	Unit	21.962.809.000	11
407	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	Dokumen	38.887.637.000	7
408	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	Laporan	1.591.681.000	9
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak		619.452.682.000	19.696.437
319	Optimalisasi Reproduksi	Akseptor	236.131.271.000	3.000.000
400	Benih Ternak Unggul	Dosis	53.419.811.000	4.940.800
401	Bibit Ternak Unggul	Ekor	56.931.543.000	754.280
402	Pengembangan ternak ruminansia potong	Ekor	190.535.446.000	21.100
403	Pengembangan ternak ruminansia perah	Ekor	30.000.000	1
404	Pengembangan unggas dan aneka ternak	Ekor	35.868.481.000	36.025
406	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	NSPK	46.536.130.000	6

Kegiatan / Output		Satuan	Pagu (Rp.)	Target (Volume)
1786	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)		30.369.127.000	16.803
400	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	3.646.529.000	130
401	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Sampel	14.822.230.000	16.630
402	Pengendalian Pematangan Betina produktif	Lokasi	1.773.782.000	33
403	Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan	Unit	4.351.831.000	4
404	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesmavet	Dokumen	5.774.755.000	6
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan		375.253.827.000	4
950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	40.227.635.000	1
970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	22.864.713.000	1
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	91.526.111.000	1
994	Layanan Perkantoran	Layanan	220.635.368.000	1
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak		25.828.733.000	182
400	Pengembangan Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Unit	4.167.409.000	32
401	Pengembangan Pemasaran Peternakan	Unit	201.260.000	1
402	Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Lokasi	8.722.144.000	113
403	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	NSPK	11.039.661.000	21
405	Pengelolaan Informasi Pemasaran	Lokasi	1.698.259.000	15
TOTAL			1.299.595.278.000	

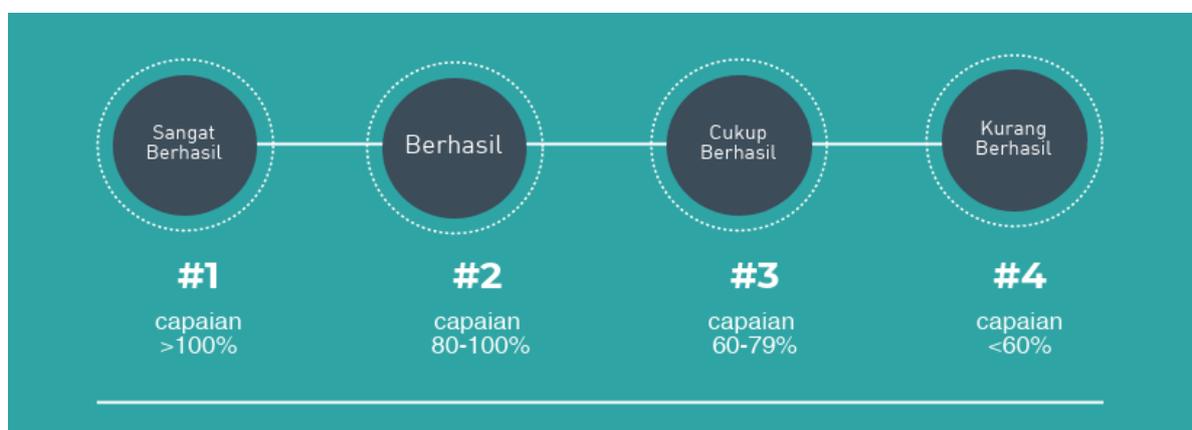
Sumber : SMART Kemenkeu, 2020.



III AKUNTABILITAS KINERJA

1.7 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian menggunakan metode *scoring*, yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60- <80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Ditjen PKH tahun 2020 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2020 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*:



Evaluasi kinerja Ditjen PKH tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2020 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2020. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

1.8 Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2020

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi I) memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 11 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui 2 jenis target yaitu *maximize target* dan *minimize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target



nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Sebaliknya, yang dimaksud dengan *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya.

Indikator kinerja yang termasuk dalam kategori *maximize target* adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik); (2) Peningkatan produksi susu; (3) Peningkatan produksi telur; (4) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan; (5) Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; (6) Tingkat kemanfaatan sarana prasana peternakan; (7) Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis; (8) Nilai PMPRB (pengungkit) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (9) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (10) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Maximize target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator kinerja yang termasuk dalam kategori *minimize target* adalah Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia

Kategori *minimize target* dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan PMK 214/2017, maka dilakukan perhitungan Nilai Efisiensi (NE) dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut :

<p>$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$</p> <p>Dimana :</p> <p>NE = Nilai Efisiensi</p> <p>E = Efisiensi</p>	<p>* Catatan :</p> <p>Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.</p>
---	--

Nilai Efisiensi dapat dilihat pada lampiran 5 dan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2020 selengkapnya disajikan pada Tabel 8.



Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Ukuran Keberhasilan
SP1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	1	Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	%	0,4	0,14	35	Kurang berhasil
		2	Peningkatan produksi susu	%	2,5	0,33	13,20	Kurang berhasil
		3	Peningkatan produksi telur	%	2,15	5,56	258,60	Sangat berhasil
SP2	Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan	4	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan	%	15	29,60	197,33	Sangat berhasil
SP3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	5	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	%	81,5	86,6	106,26	Sangat berhasil
SP4	Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan	6	Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan	%	85	90,94	106,99	Sangat Berhasil
SP5	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan	7	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80	80,01	100,13	Sangat Berhasil
SP6	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	8	Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Kasus	122	76	137,70	Sangat berhasil
SP7	Terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	9	Nilai PMPRB (pengungkit) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,3	32,3	100	Berhasil
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Skala likert (1-4)	3,37	3,48	103,26	Sangat berhasil
SP8	Terkelolanya anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang A akuntabel dan berkualitas	11	Nilai kinerja anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,25	91,23	103,38	Sangat berhasil

Sumber: 1) Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2020; 2) BPS; 3) Direktorat lingkup Ditjen PKH; 4) Pusdatin.

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 8 di atas, dapat dikatakan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berhasil. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan, serta segenap



jajaran Kementerian Pertanian dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) Peningkatan produksi telur; (2) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan; (3) Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; (4) Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia; (5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (6) Nilai kinerja anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7). Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis; dan (8). Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan.

Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: Nilai PMPRB (pengungkit) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Indikator kinerja yang masuk kategori **kurang berhasil** yaitu: (1) Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik) dan (2) Peningkatan produksi susu.

Selengkapnya analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis disampaikan sebagai berikut:

Sasaran Program 1 (SP1) **MENINGKATNYA KETERSEDIAAN PANGAN ASAL TERNAK**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan produksi daging sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan pokok, Kementerian Pertanian menetapkan Sasaran Strategis (SS), yaitu Meningkatkan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri. Untuk sub sektor peternakan target indikator program yang ingin dicapai, yaitu peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, itik).

SP1. IKU1	
Peningkatan Produksi Daging	
(sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, itik)	
Target 0,40%	Realisasi 0,14%
% Capaian 35,00%	



Peningkatan produksi daging merupakan peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) pada tahun 2020 dibandingkan dengan peningkatan produksi daging tahun 2019. Total produksi daging yang dihitung adalah mengacu pada *meatyield* bukan karkas. *Meatyield* dihitung berdasarkan konversi karkas yang tertuang dalam buku Statistik Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Proses pengumpulan data produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, babi dan itik) dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi (verval) yang dilaksanakan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional, sedangkan untuk data produksi daging ayam ras pedaging berdasarkan laporan perunggasan online dari Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH.

Cara perhitungan capaian indikator peningkatan produksi daging adalah akumulasi rata-rata peningkatan produksi daging pada tahun berjalan (A^t) ($t=2020$) dikurangi akumulasi rata-rata peningkatan produksi daging tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2019$), dibagi dengan akumulasi rata-rata peningkatan produksi daging tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2019$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil perhitungan IKU peningkatan produksi daging dapat dilihat pada Tabel 10 dan realisasi capaian IKU dapat dilihat pada Tabel 9.

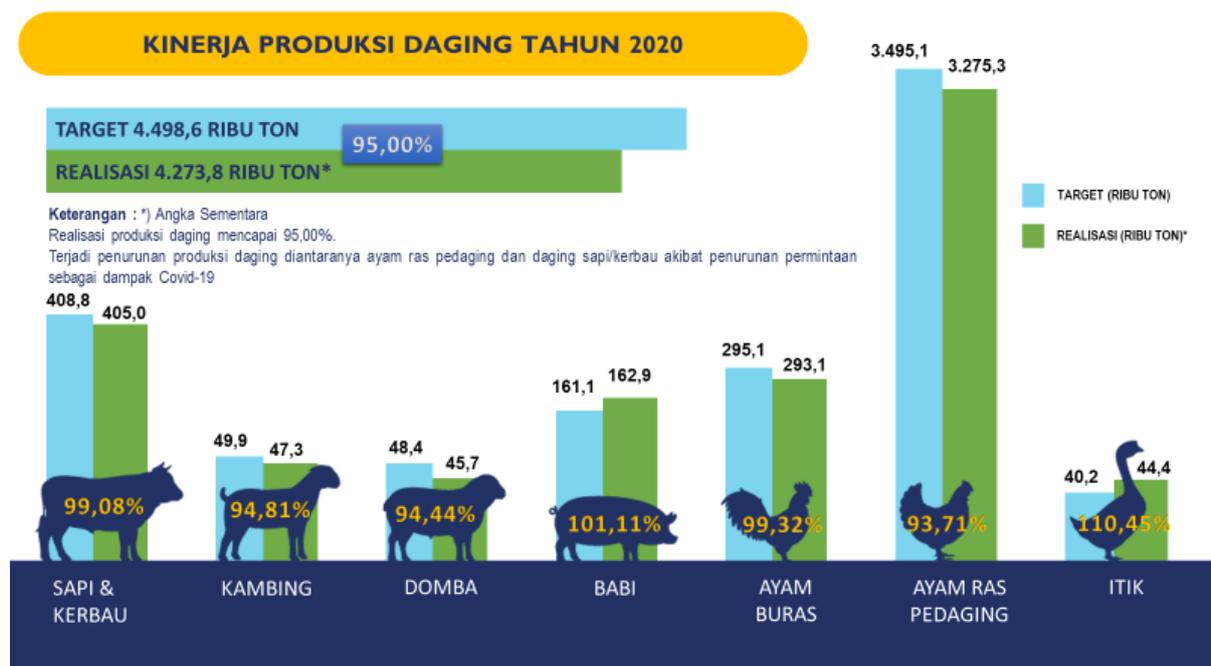
Tabel 9. Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Daging

Target dan Realisasi IKSP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target Thn 2020	% Realisasi th 2020 thd 2019	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)		0,40	0,85	1,20	1,24	1,28	35,00	14,00	10,94
Realisasi IKSP (%)	1,00	0,14							

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Pada tabel 9 dapat dilihat, produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) tahun 2020 dalam bentuk *meatyield* sebesar 4.273,80 ribu ton atau mencapai 95,00% dari target sebesar 4.498,60 ribu ton. Namun apabila dibandingkan antara target dengan realisasi tahun ini, maka baru diperoleh angka rata-rata peningkatan produksi daging sebesar 0,14% atau mencapai 35,00% dengan kategori “**Kurang Berhasil**” apabila dibandingkan dengan target peningkatan produksi daging pada tahun ini sebesar 0,40%. Kinerja produksi daging tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik 2.





Sumber: BPS

Grafik 2. Kinerja Produksi Daging Tahun 2020

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya:

Indikator kinerja peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) ini merupakan indikator kinerja baru pada Renstra 2020-2024, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target atau realisasi IKU tahun sebelumnya. Target IKU pada Laporan Kinerja Tahun 2019 adalah produksi daging sapi dan kerbau dalam bentuk karkas dengan jumlah tonase, sedangkan untuk tahun 2020 produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) dalam bentuk *meatyield*. Secara rinci pertumbuhan produksi daging pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Pertumbuhan produksi daging pada tahun 2018-2020

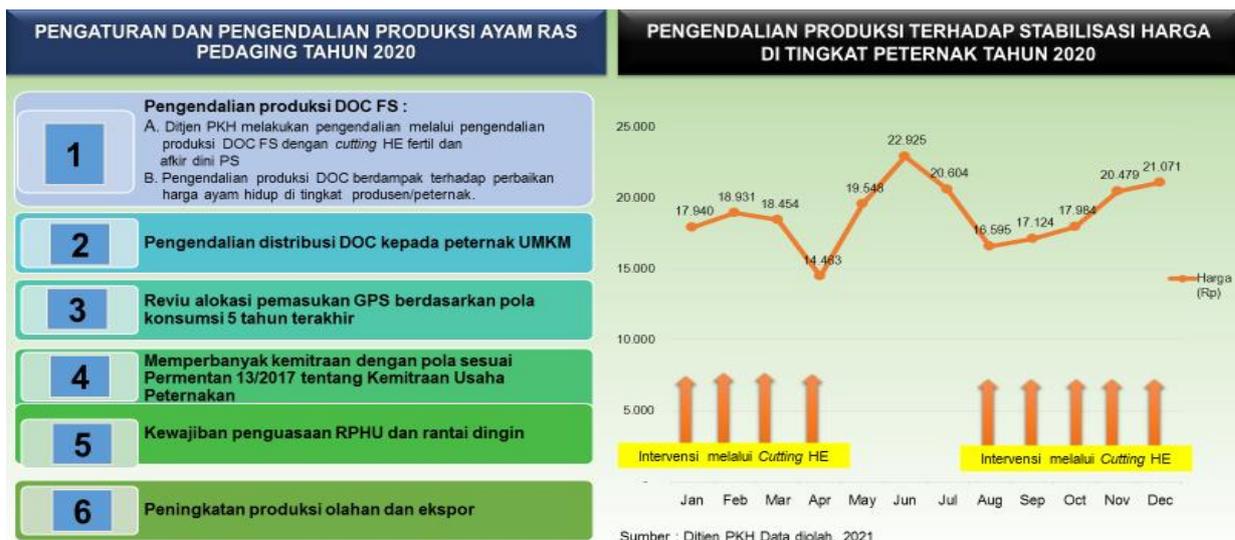
No	Jenis Ternak	Tahun			% Peningkatan 2020/2019	% Peningkatan 2019/2018
		2018	2019	2020*)		
1	Sapi & Kerbau	392,12	396,82	405,00	2,06	1,20
2	Kambing	47,59	49,42	47,35	(4,18)	3,85
3	Domba	56,26	47,92	45,78	(4,47)	(14,83)
4	Babi	145,61	159,42	162,84	2,15	9,48
5	Ayam Buras	287,16	292,33	293,14	0,28	1,80
6	Ayam Ras Pedaging	3.409,56	3.495,09	3.275,33	(6,29)	2,51
7	Itik	38,65	39,81	44,36	11,44	2,99
Rata-rata Pertumbuhan Produksi Daging Komoditas Utama					0,14	1,00

Sumber: BPS, diolah Ditjen PKH

Keterangan : *) Angka Sementara

Namun demikian, apabila kita hitung berdasarkan angka capaian produksi daging pada tahun 2020 dengan tahun 2019 dengan menggunakan perhitungan dan komoditas yang sama, maka rata-rata peningkatan produksi daging tahun 2020 dibandingkan dengan rata-rata peningkatan produksi daging tahun 2019 mencapai 14,00%, atau mengalami penurunan sebesar 0,86% apabila dibandingkan dengan rata-rata peningkatan tahun 2019 yang mencapai sebesar 1,00%. Realisasi produksi daging mengalami penurunan utamanya untuk komoditas daging ayam ras dan daging kambing/domba akibat menurunnya permintaan sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Dimana pada saat pandemi, terdapat kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) seperti hajatan, ditutupnya tempat wisata, perhotelan, usaha kuliner hampir di semua daerah di seluruh tanah air yang berpengaruh terhadap penurunan konsumsi daging ayam ras dan daging kambing/domba.

Konsumsi Daging Ayam Ras pada tahun 2019 sebesar 12,18 kg/kapita/tahun, sedangkan realisasi konsumsi Daging Ayam Ras akibat pandemi *Covid-19* turun menjadi sebesar 10,10 kg/kapita/tahun, sehingga kebutuhan daging ayam ras tahun 2020 sebesar 2,72 juta ton, dengan produksi sebesar 3,22 juta ton, maka masih terdapat surplus sebesar 0,50 juta ton. Sebagaimana diketahui bahwa industri perunggasan, terutama ayam ras telah berkembang pesat. Pertumbuhan yang cukup besar ini yang menyebabkan Indonesia mengalami *over supply*. Sehingga dengan menurunnya konsumsi daging ayam ras, maka berpengaruh terhadap turunnya harga ayam broiler hidup (*livebird*) di tingkat peternak. Oleh karena itu, dalam rangka stabilisasi harga telah dilaksanakan pengaturan dan pengendalian produksi ayam broiler dengan melakukan pengendalian produksi DOC *Final Stock* (FS) melalui *cutting Hatching Egg* (HE) fertil dan akhir dini *Parent Stock* (PS). Upaya Pengaturan Pengendalian Produksi Ayam Ras Pedaging Tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik 3.



Sumber: Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, 2020

Grafik 3. Pengaturan Pengendalian Produksi Ayam Ras Pedaging Tahun 2020



Untuk mendorong produksi daging ayam ras, maka Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mendorong pelaku usaha perunggasan terutama industri perunggasan atau integrator untuk melakukan ekspor dan bersaing di perdagangan global, serta peningkatan konsumsi protein hewani di dalam negeri melalui kampanye Gemar Makan Ayam berkolaborasi dengan para pelaku usaha.

Penurunan jumlah pemotongan untuk komoditas kambing dan domba diduga dipengaruhi oleh jumlah ekspor ternak kambing domba dari Indonesia ke negara lain seperti Malaysia dan Brunai Darusalam. Berdasarkan data Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Bibit Ternak Ruminansia Potong telah dikeluarkan rekomendasi sebanyak 14.350 ekor yang akan di ekspor ke luar Negara Republik Indonesia. Selain itu Tahun 2020 terjadi wabah nasional *Covid-19* yang mengakibatkan penurunan permintaan masyarakat terhadap ternak kambing/domba. Data pemotongan kambing dan domba terjadi di sentra-sentra produksi, seperti: Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, kecuali Jawa Timur. Data Penurunan Produksi Daging Kambing dan Domba di Sentra Produsen tahun 2020.

Tabel 11. Data Penurunan Produksi Daging Kambing dan Domba di Sentra Produsen Tahun 2020

No	Provinsi	Domba (Ton)			No	Provinsi	Kambing (Ton)		
		2019	2020	Penurunan			2019	2020	Penurunan
1	Jawa Barat	47.167	44.906	-2.261	1	Jawa Timur	25	44.906	44.881
2	Jawa Timur	7.610	7.800	190	2	Jawa Tengah	7.610	7.800	190
3	Jawa Tengah	7.006	6.408	-598	3	Jawa Barat	7.006	6.408	-598
4	Banten	3.790	3.473	-317	4	Banten	3.790	3.473	-317
5	DI. Yogyakarta	2.921	2.741	-180					

Sumber: BPS, diolah Ditjen PKH

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ditjen PKH untuk meningkatkan produksi daging kambing dan domba dengan mendorong pelaku usaha kambing/domba untuk melakukan ekspor dan bersaing di perdagangan global, serta peningkatan konsumsi protein hewani di dalam negeri melalui promosi kepada masyarakat untuk menjadikan daging kambing/domba sebagai alternatif pangan protein hewani yang terjangkau dibandingkan dengan daging sapi/kerbau yang berkolaborasi dengan para pelaku usaha.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah:

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa capaian kinerja peningkatan produksi daging tahun 2020 baru mencapai 10,94% apabila dibanding dengan target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2024 dengan target sebesar 1,28%. Sedangkan terkait dengan *roadmap* swasembada daging sapi/kerbau dimulai pada tahun 2016, dengan kondisi ketersediaan daging sapi/kerbau lokal sebesar 68,00%, Selanjutnya pada tahun 2026,



direncanakan Indonesia sudah mampu melakukan ekspor yang dimantapkan pada tahun 2035 dan menjadi lumbung pangan Asia pada tahun 2045.

Pada tahun 2020 kebutuhan daging sapi nasional sebesar 681.180 ton, dengan produksi/stok dalam negeri hanya mampu memenuhi kebutuhan sebesar 404.997 ton, sehingga masih terdapat kekurangan (*defisit*) sebesar 276.183 ton atau 44,55% dari kebutuhan yang dipenuhi dari impor daging sapi/kerbau dan sapi bakalan. Hal tersebut tentunya masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu swasembada yang direncanakan tercapai pada tahun 2022, dengan porsi impor maksimal 10,00%.

Dalam *Grand Design* Pengembangan Sapi dan Kerbau tertuang adanya penambahan sapi indukan impor dimana pada tahun 2022 mencapai 3.200.000 ekor untuk pencapaian swasembada daging tahun 2026. Sementara realisasi impor sapi indukan dari 2016 sampai 2020 yang berasal dari APBN baru terealisasi sebanyak 7.049 ekor. Hal ini disebabkan:

- a) Pengadaan sapi impor melalui APBN banyak mengalami kegagalan Pelaksanaan program penambahan sapi indukan impor Kementerian Pertanian pada tahun 2015 hingga tahun 2018 realisasinya tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena adanya kendala dalam pengadaan sapi seperti pada tabel berikut:

Tabel 12. Penambahan Indukan Impor 2015, 2016 dan 2018

Tahun	Target	Realisasi	Perkembangan
2015	10.000	1.926	1.950
2016	4.550	4.397	5.839
2018	6.000	2.652	2.869

Sumber: Direktorat Bitpro, Ditjen PKH

- b) Tahun 2019 Adanya pengalihan fokus anggaran untuk kegiatan strategis lainnya, antara lain Program #Bekerja (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera)
- c) Tahun 2020 terdapat pengalihan fokus anggaran untuk kegiatan penanganan *Covid-19*. Selain itu, juga adanya peraturan dari Pemerintah Australia yang membatasi perdagangan sapi ke seluruh negara mitra termasuk Indonesia.

Hal tersebut menyebabkan penambahan populasi tidak tercapai sesuai target. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan usulan dari Kementerian Pertanian perihal pengadaan khusus untuk ternak dapat dilaksanakan dengan mekanisme penunjukan langsung yang diatur dalam Perpres Pengadaan Ternak Impor diluar Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional:

Menindaklanjuti amanat RPJMN 2020-2024 dalam Kegiatan Prioritas 2, yaitu peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan peningkatan produksi daging (daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik) sebagai salah



satu indikator kinerja utama. Target produksi daging nasional yang telah ditetapkan oleh Bappenas pada tahun 2020 sebesar 4,10 juta ton, sedangkan capaian produksi daging tahun 2020 sebesar 4.273,79 ribu ton, sehingga realisasi capaian kinerja produksi daging tahun 2020 dengan kategori “**Sangat Berhasil**” atau mencapai 106,85% apabila dibandingkan dengan target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja:

Keberhasilan peningkatan populasi dan produksi daging pada tahun 2020, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi program yang dilakukan oleh Ditjen PKH, diantaranya:

1. Pengembangan ternak ruminansia melalui optimalisasi reproduksi mampu menambah kelahiran sebanyak 4.126.452 ekor, sehingga mampu meningkatkan populasi dan produksi daging sapi/kerbau dan menurunkan impor daging sapi sebesar 1,43% pada tahun 2020 dari tahun 2019. Namun demikian, pengembangan sapi potong di Indonesia, saat ini masih terkendala belum banyaknya pengembangan budidaya yang berskala ekonomi, sehingga produksi daging sapi/kerbau belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.
2. Produksi daging khususnya ruminansia kecil (kambing dan domba) telah mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan sudah ekspor ke Brunei Darussalam dan Malaysia.
3. Produksi unggas (telur dan daging ayam ras) saat ini sudah swasembada, bahkan sudah ekspor ke beberapa negara, namun terdapat kendala di aspek hilirisasi untuk market dalam negeri.

Untuk menjawab permasalahan terkait dengan ketersediaan daging sapi/kerbau, maka upaya yang akan dilakukan oleh Ditjen PKH, antara lain:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
2. Menyusun program terobosan sebagai solusi untuk akselerasi percepatan peningkatan populasi dan produksi sapi/kerbau di dalam negeri.
3. Penambahan impor bibit sapi indukan untuk meningkatkan jumlah induk sapi/kerbau dalam negeri dengan mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tahun-tahun sebelumnya.
4. Memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.
5. Mendorong pembiayaan yang bersumber dari non APBN antara lain: kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara.
6. Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif.
7. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).



Untuk mengatasi permasalahan terkait upaya stabilisasi harga unggas, maka upaya yang akan dilakukan oleh Ditjen PKH Kementerian Pertanian antara lain:

1. Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk mendorong adanya *Roadmap* Perunggasan Nasional.
2. Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
3. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor sub sektor peternakan.
4. Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah.
5. Mendorong investasi di industri hilir dan perluasan negara tujuan ekspor.

Upaya-upaya khusus yang akan dilakukan untuk peningkatan produksi daging kambing/domba:

1. Fasilitasi pemberian bantuan kambing/domba sebanyak 11.000 ekor kepada kelompok peternak terpilih sebagai stimulan untuk menumbuhkan usahanya.
2. Koordinasi dengan asosiasi peternak kambing/domba atau Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan peternak
3. Berkoordinasi dengan asosiasi peternak kambing/domba agar melakukan penyeleksian terhadap ternak yang diekspor (bukan merupakan bibit unggul)
4. Berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk melakukan promosi peningkatan konsumsi daging kambing/domba sebagai alternative sumber protein hewani dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan daging sapi/kerbau.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Berdasarkan Aplikasi Sistem Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran (SMART) Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi merupakan perbandingan antara capaian output dengan anggaran yang telah dikeluarkan. Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Nilai efisiensi yang positif menandakan bahwa pelaksanaan program/kegiatan telah efisien.

Kinerja produksi daging didukung oleh sumber daya dari kegiatan: 1) Pengembangan Hijauan Pakan Ternak; 2) Pengembangan Pakan Olahan dan Bahan Pakan; 3) Mutu dan Keamanan Pakan; 4) Optimalisasi Reproduksi; 5) Produksi Benih Ternak Unggul; 6) Produksi Bibit Ternak Unggul; 7) Pengembangan Ruminansia Potong; 8) Pengembangan Unggas Lokal dan Aneka Ternak; 9) Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH; 10) Pengendalian Pemotongan Betina Produktif; 11) Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pakan; 12) Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak. Nilai efisiensi sumber daya dalam rangka peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)



adalah sebesar **50,76%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**. Tabel hasil perhitungan nilai efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 13. Kegiatan Pendukung IKU 1 Tahun 2020

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Rp. Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Hijauan Pakan Ternak	Ha	21.682	21.091	97,27	1.069	1.069	100,00
2	Pakan Olahan dan bahan pakan	Ton	42.187	41.945	99,43	7.836	7.802	99,57
3	Mutu dan keamanan pakan	Sampel	6.895	6.848	99,31	2.346	2.346	100,00
4	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	NSPK	6.324	6.257	98,94	5	5	100,00
5	Optimalisasi Reproduksi	Akseptor	236.131	233.378	98,83	3.000.000	3.634.738	121,16
6	Benih Ternak Unggul	Dosis	53.420	51.365	96,15	4.940.800	6.445.035	130,45
7	Bibit Ternak Unggul	Ekor	56.932	55.340	97,20	754.280	810.027	107,39
8	Pengembangan ternak ruminansia potong	Ekor	190.535	167.886	88,11	21.100	18.393	87,17
9	Pengembangan unggas dan aneka ternak	Ekor	35.868	35.595	99,24	36.025	36.025	100,00
10	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	NSPK	46.536	43.434	93,33	6	6	100,00
11	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	3.647	3.556	97,51	130	168	129,23
12	Pengendalian Pematangan Betina produktif	Lokasi	1.774	1.721	97,01	33	33	100,00

Sumber: SMART Kemenkeu, 2020

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi daging ditunjang oleh beberapa kegiatan/program yang dilaksanakan oleh Ditjen PKH yang dilaksanakan antara lain:

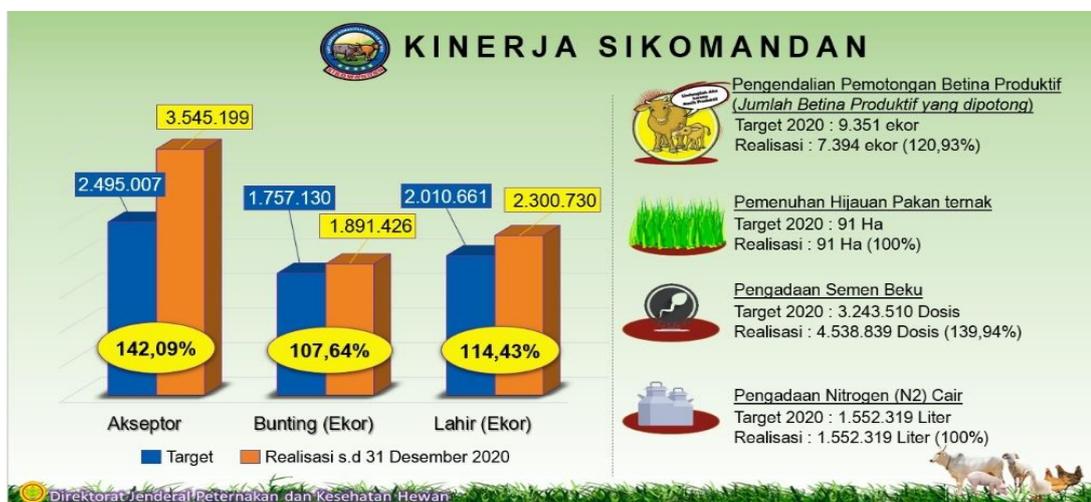
- (1) Peningkatan kelahiran ternak melalui kegiatan Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN)

Kinerja peningkatan kelahiran melalui optimalisasi reproduksi melalui IB dan Kawin Alam secara kumulatif Januari-Desember 2020 mencapai 3.545.199 akseptor (142,09%) dari target 2.495.007 akseptor. Realisasi kebuntingan 1.891.426 ekor (107,64%) dari target 1.757.130 ekor. Realisasi kelahiran 2.300.730 ekor (114,43%) dari target tahunan 2.010.661 ekor, dengan alokasi semen beku target 4.648.547 dosis realisasi 4.648.547 dosis (100,00%).

Peningkatan produktivitas melalui kegiatan penanaman dan pengembangan hijauan pakan berkualitas tahun 2020 dengan target penanaman hijauan pakan ternak setelah dilakukan penyesuaian output dan anggaran adalah seluas 91



hektar yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, Bali, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Maluku Utara. Secara rinci kinerja SIKOMANDAN dapat dilihat pada Grafik 4.



Grafik 4. Kinerja SIKOMANDAN Tahun 2020

Keamanan dan mutu pangan dengan didukung kegiatan Pengendalian Pemotongan betina produktif dengan capaian kegiatan dari Januari- Desember 2020 total ternak betina yang masuk ke Rumah Potong Hewan (RPH) sebanyak 140.463 ekor, dengan rincian sebanyak 131.630 ekor (93,71%) merupakan ternak betina tidak produktif dan 8.833 ekor (6,24%) ternak betina produktif. Dari 8.833 ekor ternak betina produktif ini sebanyak 7.733 ekor (87,55%) dilakukan pemotongan dan sebanyak 1.100 ekor (12,45 %) berhasil ditolak untuk dipotong/berhasil dikendalikan. Dukungan kesehatan hewan yakni kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular pada sapi/kerbau di fokuskan pada 3 (tiga) jenis penyakit yaitu Brucellosis, Antraks dan Jembrana dengan target vaksin sebesar 380.100 dosis, Penanganan Gangguan Reproduksi serta Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan.

- (2) Aspek pembiayaan (Realisasi pemberian kredit pembibitan dan penggemukan)
Aspek pembiayaan sangat penting dalam mewujudkan akselerasi peningkatan populasi dan produksi ternak, terutama melalui peningkatan skala usaha dan efisiensi usaha. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing usaha, semakin efisien usaha maka daya saing usaha akan meningkat. Fasilitas pembiayaan usaha peternakan terutama dilakukan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN.

Pada tahun 2020, Kementerian Pertanian menargetkan KUR untuk usaha Peternakan sebesar Rp 9.01 Triliun, dan dapat direalisasikan sebesar Rp 10,57 Triliun atau mencapai 117,30% dari target. KUR tersebut diakses oleh 353.815

debitur untuk usaha produktif pembibitan dan budidaya sapi, ternak perah, kambing/domba, dan unggas.



Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH
Grafik 5. Realisasi KUR bidang Usaha Peternakan

Selain itu, berdasarkan data pada Sistem Informasi Kredit Program Kemenko Bidang Perekonomian, realisasi KUR peternakan juga terdapat pada *mix farming*, yaitu kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan (*mix-farming*) sebesar Rp 3,12 Triliun untuk 141.403 debitur. Dimana minimal 60% dari nilai KUR *mix farming* untuk usaha peternakan, sehingga apabila dihitung sebagai usaha peternakan yang terintegrasi, maka kontribusi KUR terhadap usaha peternakan sebesar Rp 13,75 triliun yang diakses oleh 495.218 debitur. Realisasi akad kredit KUR Subsektor Peternakan pada tahun 2020 berdasarkan komoditas didominasi oleh usaha pembibitan dan budidaya sapi/kerbau Rp 5,25 triliun (49,76%), usaha pembibitan dan budidaya unggas Rp 2,39 Triliun (22,61%), dan usaha pembibitan dan budidaya kambing domba Rp 1,28 Triliun (12,20%) dan sisanya untuk ternak perah dan babi.

Pada tahun 2020 telah dilakukan kerja sama dan pembinaan dalam upaya memanfaatkan program kemitraan BUMN sebesar Rp. 5,96 Milyar. Program kemitraan tersebut diberikan kepada:

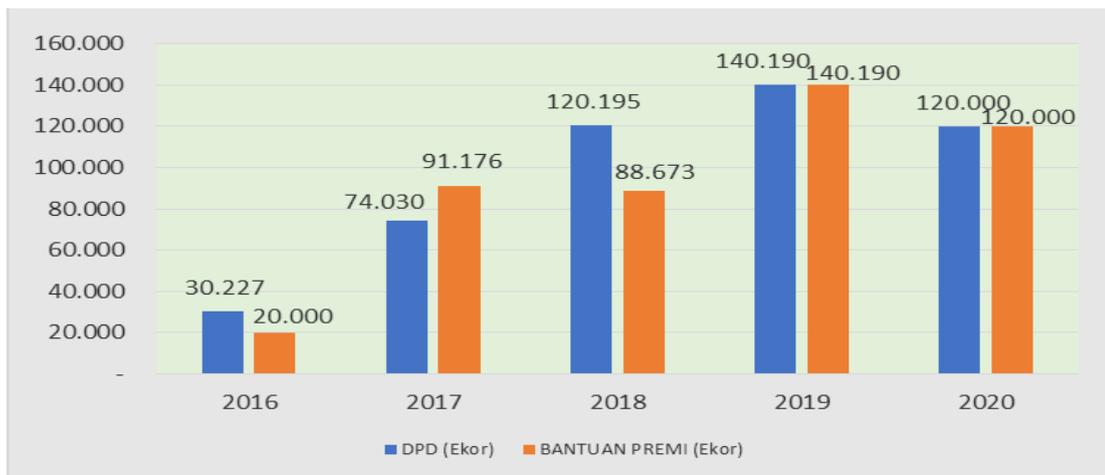
- Koperasi Sapto Argo Raharjo, Magelang-Jawa Tengah sebesar 1,075 Milyar.
- Koperasi Saroni Makmur, Sleman, DIY sebesar 0,25 Milyar.
- Peternak Lampung Tengah sebesar Rp. 15 Milyar.
- KAN Jabung-Malang, Jawa Timur sebesar Rp. 1 Milyar.
- SPR Ngudi Rejeki-Kediri, Jawa Timur sebesar Rp. 1 Milyar.
- Koperasi Rojokoyo Gama Mandiri-Sleman, DIY sebesar Rp 0,99 Milyar.

- g) Koperasi Berkah Salama Jaya masih dalam proses dengan rencana akses sebesar Rp. 34 Milyar dari program kemitraan PT. Pertamina untuk usaha peternakan sapi potong di Kalimantan Timur.

Dana pinjaman program kemitraan BUMN ini oleh peternak digunakan untuk pembelian ternak dan sarana seperti kandang. Total fasilitasi selama 3 tahun (2018-2020) sebesar Rp 33,84 Milyar untuk lebih dari 604 peternak. Pada tahun 2019 dan 2020 sebagian besar untuk pembelian ternak perah, yaitu dara siap bunting atau induk produktif dari *rearing* dan impor.

(3) Asuransi Ternak

Pada periode tahun 2016-2020, dialokasikan bantuan premi untuk sapi yang diasuransikan 120.000 ekor per tahun. Besaran premi asuransi 2% dari nilai pertanggungan yang telah ditetapkan yaitu 10 juta rupiah ($2\% \times \text{Rp. } 10.000.000$) = Rp. 200.000,- /ekor/tahun. Bantuan premi dari Pemerintah/APBN: 80% (160 ribu rupiah) dari butir (b) sisanya premi swadaya petani 20% (40 ribu rupiah). Realisasi bantuan premi AUTS/K pada tahun 2020 tercapai 100% atau 120.000 ekor.

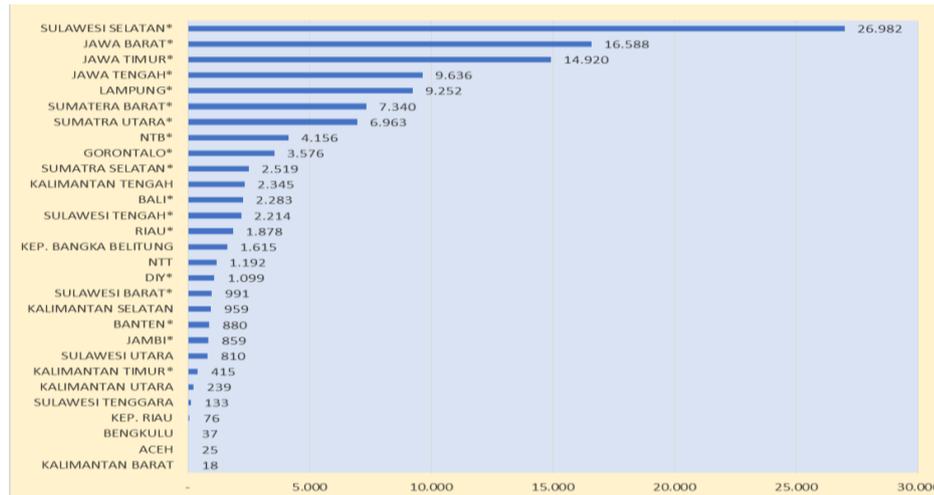


Keterangan :) * Realisasi peserta berdasar DPD dan bantuan premi AUTSK per 31 Desember 2020;
Sumber: Data Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian 'SIAP' diolah

Grafik 6. Realisasi Peserta dan Bantuan Premi AUTSK Tahun 2016-2020

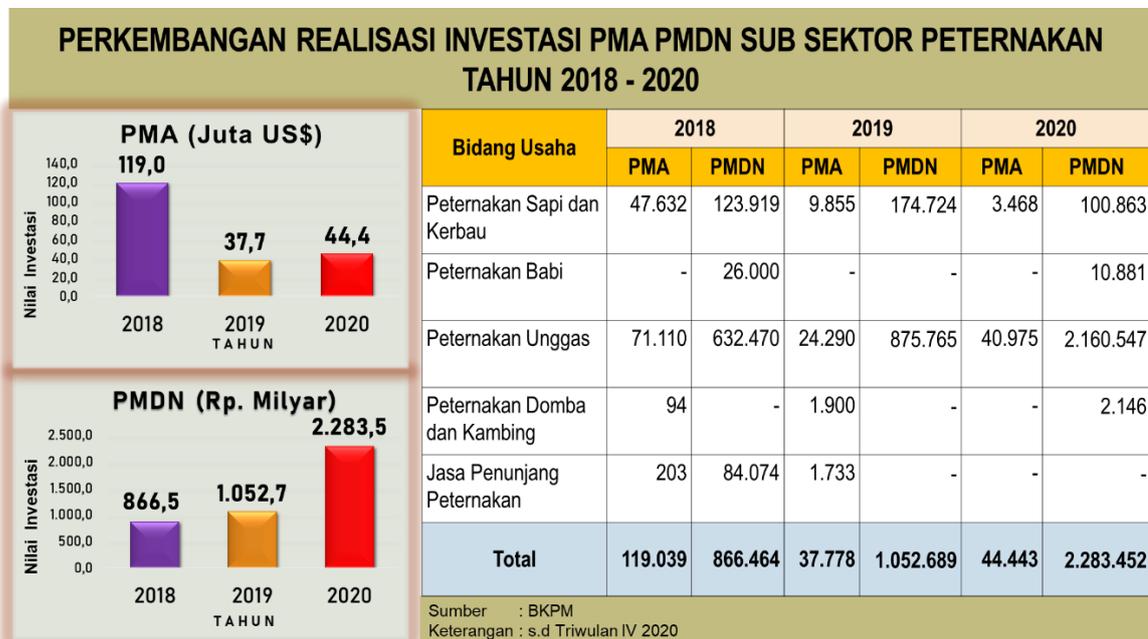
Realisasi peserta dan bantuan premi AUTSK tahun 2020 berdasarkan laporan Daftar Peserta Definitif (DPD) dari dinas kabupaten/kota yang terdapat pada Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) sebanyak 120.000 ekor (100% dari target 120.000 ekor) tersebar di 29 Provinsi sentra ternak sapi/kerbau. Secara rinci realisasi peserta dan bantuan premi dapat dilihat pada Grafik 7.



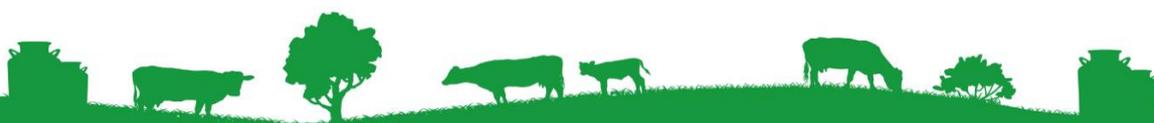


Grafik 7. Realisasi Peserta Auts/K Per Provinsi Berdasarkan DPD Tahun 2020

- (4) Penyertaan modal (investasi) yang bergerak di sub sektor peternakan
- Investasi PMDN untuk peternakan sapi dan kerbau tahun 2018-2020 mengalami penurunan sebesar 0,64%, dan apabila realisasi tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019, maka mengalami penurunan sebesar 42,27%. Investasi PMA peternakan sapi kerbau mengalami penurunan sebesar 72,06% pada periode 2018-2020. Penurunan investasi pada bidang usaha peternakan sapi dan kerbau tahun 2020 terjadi karena adanya peraturan dari Pemerintah Australia yang membatasi perdagangan sapiunya ke seluruh negara mitra termasuk Indonesia.



Grafik 8. Perkembangan Realisasi Investasi PMA-PMDN Sub Sektor Peternakan Tahun 2018-2020



(5) Penguatan kelembagaan

Pada tahun 2020, penguatan kelembagaan peternakan dilakukan melalui koordinasi dan pendampingan, dalam upaya pengembangan kemitraan usaha peternakan dan pengembangan kawasan korporasi. Pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak tahun 2020 dialokasikan di 6 (enam) kawasan, yaitu Kawasan Sapi Potong di Subang Jawa Barat, Kawasan Sapi Potong di Subang Jawa Timur, Kawasan Kambing di Banyumas Jawa Tengah, Kawasan Sapi Potong di Lombok Timur NTB, Kawasan Sapi Potong di Bengkulu Utara Bengkulu, dan Kawasan Sapi Potong di Lampung Selatan Lampung. Selanjutnya dengan adanya alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada tahun 2020 penumbuhan korporasi dilaksanakan juga di Kab. Gowa, Kab. Ngada, Kab. Lombok Tengah, dan Kab. Probolinggo. Secara ringkas kinerja pengembangan kawasan korporasi peternak dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Kinerja Penguatan Kelembagaan dan Hilirisasi Usaha Pada Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi Tahun 2020

Kabupaten	Kelembagaan	Komoditas & Hilirisasi
1. Subang	Koperasi Brahman Sejahtera (proses PT)	Sapi Potong-daging-pupuk
2. Tuban	Koperasi Wahyu Sejahtera Utama	Sapi Potong-daging-bakso
3. Banyumas	UMKK Satria Lestari	Kambing-pupuk
4. Lombok Timur	Koperasi Ridho Illahi	Sapi Potong-pupuk
5. Bengkulu Utara	Koperasi Sinar Usaha Tani Mulya	Sapi Potong-pupuk
6. Lampung Selatan	Koperasi Produksi Ternak Maju Bersama	Sapi Potong-bakso, abon-pupuk

Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH

(6) Penguatan sistem logistik

Pada tahun 2020 terdapat 6 kapal khusus angkutan ternak yang beroperasi, yaitu CN 1, CN 2, CN 3, CN 4, CN 5 dan CN 6 untuk mengangkut ternak dari sentra-sentra produsen ternak ke sentra-sentra konsumen. Ditjen PKH selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kelancaran tataniaga ternak melalui pemanfaatan kapal ternak dan optimalisasi muatan pada trayek kapal ternak. Total jumlah ternak yang diangkut dengan keenam kapal ternak tersebut pada 2020 sebanyak 40.716 ekor dalam 85 *voyage* dengan rata-rata *loading factor* 87%. Secara rinci rute pelayaran dan rekapitulasi muatan ternak tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 15.



Tabel 15. Rute Pelayaran dan Rekapitulasi Muatan Ternak Tahun 2020

No	Pangkalan/ Provinsi	Kapal	Jaringan Trayek	Jml Pelayaran	Jml Ternak (ekor)	Rata-rata Loading Factor (%)
1	Kupang, NTT	CN 1	Kupang-Waingapu-Tj Priok-Cirebon-Kupang	13	5.930	83
2	Kupang, NTT	CN 3	Kupang-Wini-Atapupu-Tj Priok/Banjarmasin/ Samarinda-Kupang	11	5.489	91
3	Kupang, NTT	CN 2	Kupang/Bima-Tj Priok- Cirebon-Kupang/Bima	13	6.386	89
4	Kupang, NTT	CN 4	Kupang-Wini-Atapupu- Samarinda/Balikpapan- Kupang	15	8.203	99
5	Kupang, NTT	CN 6	Kupang-Banjarmasin- Bima-Banjarmasin- Kupang	14	8.618	100
6	Kwandang, Gorontalo	CN 5	Kwandang-Tarakan- Balikpapan/Samarinda- Palu- Balikpapan/Samarinda- Kwandang	19	6.090	61
TOTAL				85	40.716	87

Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasarah Hasil Peternakan, Ditjen PKH

(7) Regulasi dan deregulasi

Dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Berdasarkan peraturan ini untuk bidang usaha pembibitan dan pembiakan sapi potong dan pembibitan dan budidaya perah mendapat fasilitas pengurangan pajak dengan persyaratan teknis. Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah tersebut telah diusulkan rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Petunjuk Teknis Fasilitas *Tax Allowance* Sub Sektor Peternakan kepada Biro Hukum Kementerian Pertanian melalui surat Direktur Jenderal PKH Nomor 24175/HK.140/F1/06/2020 tanggal 24 Juni 2020. Sampai saat ini, belum dilakukan pembahasan rancangan permentan tersebut di tingkat Kementan, sementara diperlukan Permentan dimaksud dalam proses fasilitasi pengurangan pajak belum dapat dimanfaatkan oleh investor.



SP1. IKU2 Peningkatan Produksi Susu	
Target 2,50%	Realisasi 0,33%
% Capaian 13,20%	

Peternakan sapi perah dan kondisi persusuan di tanah air masih menghadapi berbagai hal yang dilematis. Saat ini Indonesia masih harus impor sekitar 80% untuk mencukupi kebutuhan nasional karena produksi lokal baru mampu memenuhi 20% dari total kebutuhan nasional. Data produksi susu diperoleh dari buku Statistik Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana proses pengumpulan data dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi (verval) yang dilaksanakan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Cara perhitungan capaian indikator peningkatan produksi susu adalah produksi susu pada tahun berjalan (A^t) ($t=2020$) dikurangi produksi susu tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2019$), dibagi produksi susu tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2019$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil perhitungan IKU peningkatan produksi susu dapat dilihat pada lampiran 6 dan realisasi capaian IKU dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Realisasi Capaian IKU Produksi Susu

Target dan Realisasi IKSP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target Thn 2020	% Realisasi th 2020 thd 2019	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)		2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	13,20	148,53	11,38
Realisasi IKSP (%)	- 0,68	0,33							

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini:

Produksi susu tahun 2020 sebesar 947.685 ton atau mencapai 97,89% dari target sebesar 968.150 ton. Peningkatan produksi susu pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya hanya mampu meningkat sebesar 0,33% dari target 2,50%, artinya capaian kinerja peningkatan produksi susu hanya sebesar 13,20% atau **“Kurang Berhasil”** dari target yang sudah ditetapkan pada tahun 2020.



b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya:

Indikator kinerja peningkatan produksi susu ini merupakan indikator kinerja baru pada Renstra 2020-2024, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target atau realisasi IKU tahun sebelumnya. Namun demikian, apabila dilihat dari realisasi peningkatan produksi susu pada tahun 2019 yang justru menurun sebesar 0,68%, maka capaian kinerja peningkatan produksi susu pada tahun 2020 sebesar 0,33% atau sangat berhasil meningkatkan 148,53% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah:

Capaian kinerja peningkatan produksi susu tahun 2020 sebesar 0,33% atau baru mencapai 11,38% apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2024 dengan target sebesar 2,90%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Realisasi capaian kinerja peningkatan produksi susu tahun 2020 sebesar 0,33% atau baru mencapai 13,20% dari target standar nasional Kementerian Pertanian yaitu sebesar 2,50%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja:

Dari Grafik 8 dapat dilihat bahwa berdasarkan data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, produksi susu nasional tahun 2020 sebesar 947.685 ton atau mengalami kenaikan sebesar 0,33% dari pada tahun 2019. Populasi sapi perah mengalami kenaikan dari 565.001 ekor pada tahun 2019 menjadi 568.265 ekor pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan 0,58%. Demikian juga dengan impor susu juga mengalami penurunan sebanyak 2,08% pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan impor susu pada tahun 2019.

Namun demikian, kinerja peningkatan produksi susu hanya mampu mencapai sebesar 13,20% atau “**Kurang Berhasil**” dari target yang sudah ditetapkan pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan:

1. Anggaran untuk mensupport pengembangan sapi perah sangat terbatas, apabila dibandingkan dengan anggaran untuk pengembangan sapi potong.
2. Produktivitas susu sapi di tingkat peternak masih rendah.
3. Pemilikan sapi perah di tingkat peternak di bawah skala ekonomis.





Grafik 9. Pertumbuhan Produksi dan Impor Susu Tahun 2018-2020

Peningkatan populasi dan produksi pada tahun 2020 karena adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

1. Penyediaan/Produksi Benih (semen Beku dan Embrio) dan Bibit Unggul yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKH.
2. Pemasukan bibit dari luar negeri, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta.
3. Kelahiran pedet dari kegiatan Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, yang dilanjutkan dengan kegiatan SIKOMANDAN (Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri).

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Nilai efisiensi sumber daya dalam rangka peningkatan produksi susu adalah sebesar **50,25%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**.

Kinerja produksi susu didukung oleh sumber daya dari kegiatan: 1) Pengembangan Hijauan Pakan Ternak; 2) Pengembangan Pakan Olahan dan Bahan Pakan; 3) Pengembangan Ternak Ruminansia Perah; 4) Produksi Bibit Ternak Unggul; 5) Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH. Nilai efisiensi sumber daya dalam rangka peningkatan produksi susu adalah sebesar **50,25%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**. Tabel hasil perhitungan nilai efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Lampiran 5.



Tabel 17. Kegiatan Pendukung IKU 2 Tahun 2020

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Rp. Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Hijauan Pakan Ternak	Ha	21.682	21.091	97,27	1.069	1.069	100,00
2	Pakan Olahan dan bahan pakan	Ton	42.187	41.945	99,43	7.836	7.802	99,57
3	Bibit Ternak Unggul	Ekor	56.932	55.340	97,20	754.280	810.027	107,39
4	Pengembangan ternak ruminansia perah	Ekor	30	30	100,00	1	1	100,00
5	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	3.647	3.556	97,51	130	168	129,23

Sumber: SMART Kemenkeu, 2020

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi perah, diantaranya:

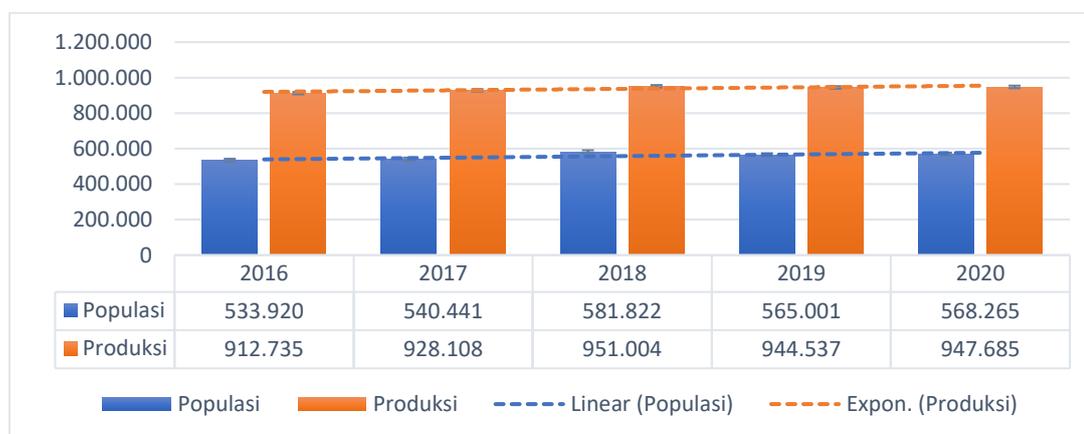
1. Kelahiran pedet yang dihasilkan dari kegiatan UPSUS SIWAB dan SIKOMANDAN Sejak tahun 2017, Pemerintah menggulirkan program Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) yang berjalan sampai dengan tahun 2019, kemudian dilanjutkan dengan Program Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Indukan Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) di tahun 2020 ini. Baik UPSUS SIWAB maupun SIKOMANDAN adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau, guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu daging dan susu.

Khusus untuk komoditi sapi perah, dalam kurun waktu dua tahun terakhir sampai akhir Desember 2020 ini tercatat di dalam sistem iSIKHNAS bahwa telah terdapat kelahiran pedet sapi perah sebanyak 276.448 ekor, dengan rincian di tahun 2018 sebanyak 77.035 ekor, tahun 2019 sebanyak 94.025 ekor dan di tahun 2020 sebanyak 105.388 ekor. Rata-rata kelahiran selama dua tahun terakhir diperoleh kurang lebih 92 ribu ekor/tahun. Berdasarkan data statistik Ditjen PKH, pertumbuhan populasi sapi perah, 5 tahun terakhir (tahun 2016 s.d. tahun 2020), terdapat pertumbuhan 6,43% dan produksi susu nya sebesar 3,83%.

Hasil pelaporan program SIKOMANDAN pada ternak sapi perah, diperoleh bahwa jumlah kelahiran sebanyak 276.448 ekor (periode 2018-2020) tersebut didapatkan rata-rata perbandingan atau rasio jenis kelamin (sex ratio) betina : jantan yaitu 51% : 49% (betina 141.576 ekor; jantan 134.872 ekor). Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi penambahan populasi calon sapi dara (*heifer*) sebanyak 51% dari total kelahiran per tahun sebagai *replacement stock* sapi-sapi induk yang sudah tidak produktif. Selain itu juga, terdapat potensi penambahan populasi sapi bakalan sebanyak 49% dari total kelahiran per tahun yang diperoleh dari kelahiran pedet jantan untuk digemukkan (*fattening*) sehingga diperkirakan pertumbuhan populasi



betina produktif sapi perah yang dalam menghasilkan susu dalam lima tahun kurang lebih 3-4%.



Sumber : Data Statistik Ditjen PKH, 2020.

Grafik 10. Perkembangan Produksi Susu Untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional

2. Kegiatan lain yang mendukung untuk peningkatan populasi ternak perah adalah :
 - a) Penyusunan regulasi atau NSPK (Norma, Standar, Peraturan dan Kebijakan)
 - b) Kerja sama dengan dengan NGO/LSM *Mercy-USA* untuk pengembangan ternak sapi perah pada kelompok dan di wilayah pengembangan sapi perah di Prov. Sumatera Barat dan Prov. Jawa Barat;
 - c) Impor sapi perah

Rekomendasi teknis pemasukan bibit ternak perah yang diterbitkan pada periode 2016-2020 adalah sebanyak 13.902 ekor dan terealisasi 11.999 ekor, dengan rincian tahun 2016 sebanyak 1050 ekor; 2017 sebanyak 2320 ekor; 2018 sebanyak 3482 ekor, tahun 2019 sebanyak 4124 ekor dan tahun 2020 sebanyak 899 ekor Rekomendasi teknis pemasukan bibit kambing perah yang diterbitkan pada periode 201-2019 adalah sebanyak 297 ekor terealisasi 295 ekor, dengan rincian tahun 2017 sebanyak 25 ekor, 2018 sebanyak 60 ekor, 2019 sebanyak 210 ekor, dan tahun 2020 sebanyak 124 ekor. Rekomendasi teknis pemasukan bibit domba perah yang diterbitkan pada 2018 adalah sebanyak 75 ekor dan terealisasi 75 ekor yang berlokasi di Jawa Timur.

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan produksi susu diantaranya: 1). Kegiatan rearing sapi perah di lima propinsi, yaitu jatim, Jateng, DIY, Jabar, Sumbar; 2). optimalisasi IB melalui sikomandan menggunakan semen dari pejantan unggul hasil uji zuriat; 3) penguatan kelompok peternak sapi perah di Jatim, Jateng, sumbar, Jabar, Sulsel; 4) produksi bibit unggul sapi perah di BBPTU Baturraden 500 ekor per tahun; 5) Produksi semen dari pejantan unggul di BBIB Singosari dan BIB Lembang.



SP1. IKU3 Peningkatan Produksi Telur	
Target 2,15%	Realisasi 5,56%
% Capaian 258,60%	

Peningkatan produksi telur merupakan peningkatan produksi telur (ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) pada tahun 2020 dibandingkan dengan produksi telur tahun 2019. Data produksi telur diperoleh dari buku Statistik Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana proses pengumpulan data produksi telur (ayam buras, itik, itik manila dan puyuh) dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi (verval) yang dilaksanakan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional, sedangkan untuk data produksi telur ayam ras petelur berdasarkan laporan perunggasan *online* dari Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH.

Cara perhitungan capaian indikator peningkatan produksi telur adalah produksi telur pada tahun berjalan (A^t) ($t=2020$) dikurangi produksi telur tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2019$), dibagi produksi telur tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2019$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

Secara rinci hasil perhitungan IKU peningkatan produksi telur untuk produk peternakan dapat dilihat pada tabel 19 dan realisasi capaian IKU dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 18. Realisasi Capaian IKU Peningkatan Produksi Telur

Target dan Realisasi IKSP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target Thn 2020	% Realisasi th 2020 thd 2019	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)		2,15	2,15	2,16	2,16	2,16	258,60	337,84	257,41
Realisasi IKSP (%)	1,65	5,56	-	-	-	-			

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Produksi telur tahun 2020 sebesar 5.652,48 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 5,56% dari tahun sebelumnya. Kinerja peningkatan produksi telur pada tahun 2020 tersebut mampu mencapai 258,60% atau “**Sangat Berhasil**” dari target yang sudah ditetapkan pada tahun 2020, yaitu sebesar 2,15%.



b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya:

Indikator kinerja peningkatan produksi telur ini merupakan indikator kinerja baru pada Renstra 2020-2024, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target atau realisasi IKU tahun sebelumnya. Namun demikian pada Tabel 19 dapat dilihat bahwa peningkatan produksi telur pada tahun 2020 sebesar 5,56% atau meningkat 337,84% apabila dibandingkan dengan peningkatan produksi pada tahun 2019 yang hanya sebesar 1,65%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi telur ayam buras meningkat 1,73% (250,97 ribu ton), telur ayam ras 6,12% (5.044,40 ribu ton), telur itik 1,34% (297,95 ribu ton), telur itik manila 0,81% (34,96 ribu ton), sedangkan yang mengalami penurunan adalah telur puyuh sebanyak -6,41%. Perkembangan produksi telur (Ribu Ton) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Perkembangan Produksi Telur (Ribu Ton)

No	Jenis Ternak	Tahun			Rata-rata Pertumbuha
		2018	2019	2020*)	
Produksi Telur					
1	Ayam Buras	212,34	246,69	250,97	1,73
2	Ayam Ras Petelur	4.688,12	4.753,38	5.044,39	6,12
3	Itik	306,54	294,01	297,95	1,34
4	Puyuh	28,96	25,86	24,21	-6,41
5	Itik Manila	31,97	34,67	34,95	0,81
	Jumlah	5.267,93	5.354,62	5.652,48	5,56
	Rata-rata pertumbuhan		1,65	5,56	

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH, 2020

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah:

Pada tabel 18 dapat dilihat bahwa capaian kinerja peningkatan produksi telur tahun 2020 sebesar 5,56% atau mencapai 257,41% apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2024 dengan target sebesar 2,16%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Pada tabel 18 dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja peningkatan produksi telur tahun 2020 sebesar 5,56% atau **“Sangat Berhasil”** mencapai 258,60% dari target standar nasional Kementerian Pertanian yaitu sebesar 2,15%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja:

Produksi telur tahun 2020 ditargetkan mencapai 4.795.165 ton dan terealisasi sebesar 5.044.395 ton atau tercapai 105,2% dari target, sedangkan pertumbuhannya apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya berhasil meningkat 337,84%.



Peningkatan pertumbuhan produksi telur ini, salah satunya didorong oleh peningkatan konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh saat pandemi *Covid-19*. Dimana konsumsi telur nasional naik dari sebelum *Covid-19* hanya sebesar 18,16 kg/kapita/tahun menjadi 19.98 kg/kapita/tahun pada masa *Covid-19*.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Kinerja produksi telur didukung oleh sumber daya dari kegiatan: bibit ternak unggul, pengembangan unggas dan aneka ternak, pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH. Nilai efisiensi sumber daya dalam rangka peningkatan produksi telur adalah sebesar **50,30%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**. Hasil perhitungan nilai efisiensi dapat dilihat pada lampiran 5.

Tabel 20. Kegiatan Pendukung IKU 3 Tahun 2020

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Rp. Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Bibit Ternak Unggul	Ekor	56.932	55.340	97,20	754.280	810.027	107,39
2	Pengembangan unggas dan aneka ternak	Ekor	35.868	35.595	99,24	36.025	36.025	100,00
3	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	3.647	3.556	97,51	130	168	129,23

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Pertumbuhan populasi ayam ras petelur di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat, bahkan pertumbuhan yang cukup besar ini yang menyebabkan Indonesia mengalami *oversupply* telur. Oleh karena itu, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan harus terus menerus mendorong pelaku usaha perunggasan terutama industri perunggasan atau integrator untuk melakukan ekspor dan bersaing di perdagangan global, serta peningkatan konsumsi protein hewani di dalam negeri. Kebutuhan telur ayam ras tahun 2020 sebesar 4,95 juta ton, dengan produksi sebesar 5,14 juta ton, maka masih terdapat surplus sebesar 0,19 juta ton.

Adapun kegiatan yg dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi telur adalah:

1. Koordinasi dengan stakeholder terkait (peternak rakyat, PINSAR Petelur, Peternak layer Nasional, BPS dan BKP Kementan);
2. Pemantauan pelaporan secara online;
3. Koordinasi penetapan impor GPS layer dengan tim analisis, penyediaan, kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.



Sasaran Program 2 (SP2) MENINGKATNYA DAYA SAING KOMODITAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas sub sektor peternakan telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti obat hewan dan produk unggas. Hal ini mengingat komoditas pertanian termasuk peternakan dan Kesehatan hewan merupakan salah satu penyumbang devisa negara, namun masih dinilai perlu peningkatan daya saingnya di pasar luar negeri. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan Kesehatan hewan, menuju pertanian maju, mandiri dan modern.

SP2. IKU 4	
Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan	
Target 15,00%	Realisasi 29,60%
% Capaian 197,33%	

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur indikator “Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan”. Nilai ekspor produk peternakan terdiri dari: a) Nilai ekspor hewan hidup; b) Nilai ekspor pangan segar dan olahan; c) Nilai ekspor produk non pangan; d) Nilai ekspor obat hewan; dan e) Nilai ekspor benih dan bibit ternak.

a. Nilai ekspor hewan hidup

Nilai ekspor hewan hidup adalah nilai ekspor hewan hidup berupa babi, kambing/domba, unggas dan aneka ternak. Tujuan ekspor ternak babi secara tradisional masih ke negara Singapura, ternak kambing dan domba ke negara-negara di ASEAN. Potensi hewan hidup juga dari aneka ternak seperti kelinci dan burung berkicau yang telah di ekspor ke negara di kawasan Asia.

b. Nilai ekspor pangan segar dan olahan

Ekspor pangan segar dan olahan akan terus ditingkatkan. Pangan Segar dan Olahan merupakan bahan pangan yang berasal dari daging sapi, kambing/domba, ayam, telur dan susu, termasuk di dalamnya adalah madu dan burung sarang walet. Produk pangan segar adalah produk yang memerlukan rantai dingin dalam perdagangan seperti daging dan susu sedangkan produk pangan segar yang tidak memerlukan rantai dingin dalam perdagangan adalah telur. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan metode tertentu. Produk pangan



bahan baku daging ayam antara lain dalam bentuk karkas ayam, nugget, dan sosis. Produk susu yang diekspor dalam bentuk diversifikasi produk olahan yaitu susu pasteurisasi, yogurt, kefir, keju, es krim, mentega. Produk telur yang diekspor diantaranya yaitu telur asin. Salah satu produk pangan yang menjadi andalan karena bernilai tinggi yaitu sarang burung walet, dengan penguasaan produksi di dunia sebesar 80%.

c. Nilai ekspor produk non pangan

Potensi ekspor produk non pangan antara lain berupa kulit, tanduk dan kuku, bulu unggas dan domba, dan pakan ternak. Ekspor produk non pangan berupa cangkang telur yang biasanya dipakai untuk bahan baku pupuk organik, hiasan dan sebagai bahan baku tepung cangkang telur. Tulang diekspor untuk bahan gelatin, sebagai bahan pakan ternak/ikan, pupuk organik dan tepung tulang. Ekspor kulit berupa kulit samak atau dipakai sebagai biogas, hiasan dan garmen. Wol atau bulu domba dipakai sebagai benang wol sedangkan bulu ayam untuk pembuatan *shuttlecock*, pakan ternak, garmen, pengisi bantal dan kursi, kemoceng dan karpet. Produk non pangan lainnya yaitu limbah dari ternak, darah untuk bahan pakan ternak/ikan, tanduk untuk hiasan dan bahan baku pupuk organik dan feses maupun urin sebagai pupuk kandang biogas, bioarang dan bahan pakan ternak maupun ikan. Produk non tradisional dalam kategori non pangan saat ini yaitu *bat guano* dan *larva magot*, yang mempunyai nilai tambah daya saing yang cukup tinggi. Bat Guano merupakan bahan dasar pembuatan pupuk organik yang berasal dari hewan kelelawar sedangkan larva magot berasal dari larva lalat *black shoulder flies* yang dapat diekspor dalam bentuk hidup, kering, tepung, dan minyak larva yang digunakan sebagai penyusun bahan pakan ternak, hewan kesayangan dan ikan di negara tujuan.

d. Nilai ekspor obat hewan

Obat hewan dalam bentuk sediaan vaksin, obat hewan dan bahan *feed aditif* dan *feed suplemen* lainnya akan terus ditingkatkan ekspornya ke lebih dari 93 negara. Jangkauan negara ekspor terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha ekspor yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan ekspor. Obat hewan termasuk produk yang bernilai tambah tinggi karena telah menggunakan teknologi tinggi dan penerapan standar persyaratan internasional untuk dapat diterima di negara tujuan ekspor.

e. Nilai ekspor benih dan bibit ternak

Ekspor benih berupa semen beku dan telur tertunas (unggas ayam dan itik). Produk semen beku termasuk yang diminati oleh beberapa negara karena jaminan kualitas produksinya. Saat ini diproduksi oleh Balai Inseminasi Buatan yang merupakan UPT Ditjen PKH. Sedangkan telur tertunas berupa *Hatching Egg* baik ayam dan itik telah secara rutin dilakukan ekspor ke beberapa negara.

Cara perhitungan capaian indikator pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan adalah akumulasi total nilai ekspor seluruh komoditas tahun berjalan (A^t) ($t=2020$) dikurangi akumulasi total nilai ekspor seluruh komoditas tahun sebelumnya



($A^{(t-1)}$) ($t-1=2019$), dibagi akumulasi total nilai ekspor seluruh komoditas tahun sebelumnya ($A^{(t-1)}$) ($t-1=2019$) dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A^t - A^{(t-1)}}{A^{(t-1)}} \times 100\%$$

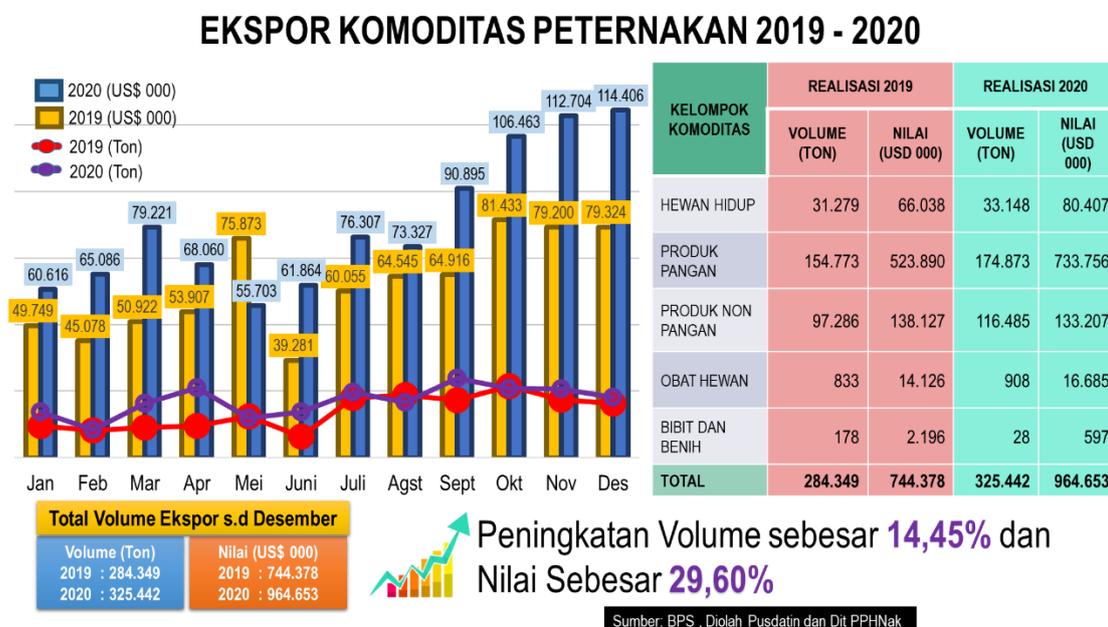
Secara rinci hasil perhitungan IKU peningkatan nilai ekspor untuk produk peternakan dapat dilihat pada lampiran 8 dan realisasi capaian IKU dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Realisasi capaian IKU peningkatan nilai ekspor untuk produk peternakan

Target dan Realisasi IKSP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target Thn 2020	% Realisasi th 2020 thd 2019	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	15,00	15	20,00	25,00	30,00	197,33	181,82	98,67
Realisasi IKSP (%)	16,28	29,60	-	-	-	-			

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini:

Realisasi nilai ekspor tahun 2020 yang terdiri dari hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, serta benih dan bibit ternak seluruhnya mencapai total sebesar US\$ 964,65 juta atau 29,60% atau mencapai sebesar 197,33% dengan kategori “**Sangat Berhasil**”, jika dibandingkan dengan target ekspor tahun 2020, yaitu sebesar 15,00%. Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pertumbuhan Nilai Ekspor Peternakan tahun 2020

Dari gambar 1 dapat dilihat pertumbuhan nilai ekspor pada tahun 2020 mengalami peningkatan setiap bulannya. Nilai ekspor tertinggi terjadi pada bulan desember 2020 sebesar US\$ 114.406.000. Pada Tabel 22 menunjukkan bahwa dari 5 (lima)



pengelompokan komoditi ekspor terdapat 2 komoditi yang belum mencapai target yakni produk non pangan, serta benih dan bibit, sedangkan 3 komoditi melebihi target nilai ekspor yakni hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, serta obat hewan. Dengan demikian total capaian nilai ekspor tahun 2020 secara keseluruhan dari kelima kelompok komoditi yang terdiri dari hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, serta benih dan bibit ternak telah melebihi yang ditargetkan, yaitu mencapai sebesar US\$ 964,65 juta atau 112,69% jika dibandingkan dengan total target nilai ekspor tahun 2020 sebesar US\$ 856,03 juta.

Tabel 22. Capaian Nilai Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020

No	Komoditi	Nilai Ekspor (US\$ 000)		%
		Target	Capaian	
1	Hewan hidup	75.944	80.407	105,97
2	Produk pangan segar dan olahan	602.474	733.756	121,79
3	Produk non pangan	158.846	133.207	83,87
4	Obat hewan	16.245	16.685	102,70
5	Benih dan bibit ternak	2.526	597	23,63
		856.035	964.653	112,69

Sumber: BPS, diolah

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya:

Indikator kinerja peningkatan nilai ekspor produk peternakan ini merupakan indikator kinerja baru pada Renstra 2020-2024, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target atau realisasi IKU tahun sebelumnya. Namun demikian pada tabel 23 dapat dilihat, realisasi kinerja ekspor tahun 2020 apabila dibandingkan dengan capaian peningkatan nilai ekspor tahun 2019 adalah sebesar 181,82%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan nilai ekspor selama periode 2015-2019, maka pertumbuhan tahun 2020 dari 2019 sebesar 29,60% dimaksud lebih besar dibandingkan rerata pertumbuhan periode 2015-2019 yang mencapai 14,07%. Nilai Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 23.

Tabel 23. Nilai Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015-2020

No	Komoditas	Nilai Ekspor (USD)						Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019 - 2020	2015 - 2019
1	Hewan Hidup	59.136.490	57.312.868	63.985.608	60.949.932	66.038.048	80.478.276	21,87	3,04
2	Produk Pangan Segar dan Olahan	248.893.904	348.988.698	436.078.594	446.993.171	523.890.058	733.762.823	40,06	21,22
3	Produk Non Pangan	123.211.374	123.014.666	112.489.463	118.124.463	138.127.221	133.219.708	(3,55)	3,31
4	Obat Hewan	11.784.321	12.133.855	10.210.191	13.126.425	14.126.487	16.684.860	18,11	5,82
5	Benih dan Bibit Ternak	406.759	1.842.200	2.380.194	976.894	2.196.295	597.528	(72,79)	111,99
	Jumlah/Total	443.432.848	543.292.287	625.144.050	640.170.885	744.378.110	964.743.194	29,60	14,07

Sumber : BPS diolah



Pada tahun 2020 nilai ekspor non pangan mengalami penurunan 3,55% dibanding tahun 2019, namun tetap mengalami peningkatan dibandingkan 2 tahun sebelumnya 2018 sebesar 12,77%. Penyebab utama penurunan nilai ekspor produk non pangan tahun 2020 adalah produk kulit yang mengalami penurunan nilai ekspor sebesar 33,07% dari tahun 2019 senilai US\$ 74,33 juta menjadi US\$ 49,75 juta pada tahun 2020. Kemudian menyusul nilai ekspor produk bulu pada tahun 2019 senilai US\$ 7,02 juta yang turun 72,33% pada tahun 2020 menjadi US\$ 1,94 juta. Salah satu penyebab kurang optimalnya capaian ekspor produk non pangan ini adalah masih terhambatnya ijin pemasukan di negara tujuan ekspor seperti Kanada yang masih pada tahap *desk study* untuk pemasukan *Bat Guano* asal Indonesia, dan proses pemenuhan persyaratan teknis tepung bulu asal Indonesia untuk masuk pasar Jepang.

Tabel 24. Perbandingan Rincian Ekspor Produk Non Pangan

No.	Komoditas Hewan Hidup	2018		2019		r ¹ Nilai Ekspor (%)	2020 ³		r ² Nilai Ekspor (%)
		Vol (ton)	Nilai (000. USD)	Vol (ton)	Nilai (000. USD)		Vol (ton)	Nilai (000. USD)	
1	Bulu	2.327,1	4.717,7	2.809,6	7.024,4	48,89	1.506,6	1.943,9	(72,33)
2	Tulang dan Tanduk	443,9	220,4	568,87	298,9	35,62	594,1	1.367	357,34
3	Kulit	3.822,8	74.065,8	4.425,4	74.339,3	0,37	3.784,4	49.756,7	(33,07)
4	Wol	6,79	16,3	0,067	0,1	(99,39)	0,44	0,7	600
5	Pakan Hewan	59.492,6	38.918,3	89.421,9	55.881,8	43,59	110.572,2	79.943,9	43,06
6	Ulat Sutera	11,5	185,8	59,9	582,4	213,46	28	207,2	(64,42)

Keterangan: ¹ r = pertumbuhan nilai ekspor tahun 2019-2018; ² r = pertumbuhan nilai ekspor tahun 2020-2019

Sumber: Data BPS, Pusdatin, diolah Dit pphnak , 2020

Dari data pada Tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk komoditas tulang dan tanduk serta pakan hewan mengalami peningkatan nilai ekspor dari tahun 2019 masing masing sebesar 357,34% dan 43,06%. Tulang dan tanduk berpotensi untuk diekspor menjadi bahan baku pupuk maupun bahan baku industri lain, saat ini sudah rutin ekspor ke Jepang dan untuk bisa masuk ke negara Uni Eropa masih dalam tahap proses registrasi ke dalam aplikasi *traces*. Produk pakan hewan baik untuk ternak maupun hewan kesayangan juga memiliki potensi besar khususnya untuk memenuhi permintaan di beberapa negara tetangga seperti Timor Leste dan Brunei, meningkatnya permintaan pakan juga sebagai dampak meningkatnya ekspor bibit ternak seperti DOC (*Day Old Chicken*).

Salah satu produk yang masih belum meningkat dari tahun sebelumnya yaitu produk bulu. Potensi ekspor bulu dalam bentuk tepung bulu (*feather meal*) cukup besar ke Jepang, tetapi masih ada hambatan untuk penyelesaian G to G dengan Jepang, bahwa *feather meal* yang akan di ekspor ke Jepang harus sesuai dengan persyaratan *standard food safety*. Pelaku usaha saat ini masih berusaha memenuhi persyaratan yang diminta oleh Jepang.



Capaian nilai ekspor benih dan bibit ternak tahun 2020 tersebut turun dibandingkan 2 tahun terakhir: 27,18% jika dibandingkan dengan realisasi ekspor pada tahun 2019 yang sebesar US\$ 2,19 juta; dan 61,16% jika dibandingkan nilai ekspor tahun 2018 yang sebesar US\$ 976,89 ribu. Belum tercapainya realisasi ekspor benih dan bibit dari yang ditargetkan ini, terutama karena adanya penurunan ekspor *Hatching Egg* (HE) unggas 80,09% dari US\$ 1,76 juta pada tahun 2019 menjadi US\$ 351 ribu pada tahun 2020.

Ekspor *Hatching Egg* selama ini dengan negara tujuan ke Myanmar, sedikit mengalami hambatan transportasi saat pandemi Covid 19, meskipun terdapat pelaku usaha baru perunggaan unggas yang juga melakukan ekspor HE Myanmar.

Upaya perluasan akses pasar HE ke Brunei Darussalam telah dirintis sejak tahun 2019, saat ini masih belum selesai G to G antar kedua Negara terkait pemenuhan persyaratan Bebas *Avian Influenza*. Pada tahun 2020 juga telah diperoleh izin prinsip dari Pemerintah Timor Leste untuk memasukkan HE dari salah satu pelaku usaha perunggasan, namun sampai saat ini masih belum terealisasi karena penerbangan dari Indonesia ke Dili belum dibuka sejak pandemi *Covid-19*.

Untuk produk semen beku, masih diperlukan promosi produk dan pendampingan akses pasar ekspor serta kebijakan ketersediaan semen beku dalam negeri diperlukan support informasi dan data jumlah dan jenis semen beku dari jenis bangsa sapi yang dapat diekspor.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah:

Pada tabel 21 dapat dilihat, realisasi capaian peningkatan nilai ekspor tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2024 mencapai sebesar 98,67% dengan kategori “**Berhasil**”. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian).

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Realisasi capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 29,59% telah melebihi standar nasional Kementerian Pertanian yaitu 15,00%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja di atas, Ditjen PKH telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka pengembangan



pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Beberapa faktor yang mendorong keberhasilan peningkatan ekspor untuk produk peternakan diantaranya:

1. Adanya peningkatan nilai ekspor dari beberapa komoditas hewan hidup, terutama babi dan domba. Peningkatan ekspor hewan hidup tahun 2020 tersebut terutama disumbang oleh nilai ekspor babi sebesar US\$ 75,48 juta yang mengalami peningkatan 24,40% dari tahun sebelumnya. Tujuan ekspor utama ternak babi asal Indonesia adalah ke Singapura. Selanjutnya juga disumbang oleh peningkatan nilai ekspor biri-biri atau domba 674,5% menjadi US\$ 756,69 ribu yang utamanya diekspor ke Malaysia dan pada akhir tahun 2020 lalu juga diekspor ke Brunei Darussalam.

Faktor keberhasilan peningkatan nilai ekspor babi dan domba, untuk babi ada peningkatan volume ekspor sekitar sebesar 2.000 ton di Singapura, hal ini adanya peningkatan permintaan karena dampak penerapan pembatasan di negara tersebut sehingga *supply* babi hidup dari negara lain selain Indonesia ke Singapura berkurang, dan Indonesia memproduksi babi untuk kebutuhan pasar Singapura di Pulau Bulan yang secara geografis sangat dekat. Indonesia juga telah menjamin bahwa status Kesehatan hewan babi di Pulau Bulan bebas dari penyakit *African Swine Fever* (ASF) yang juga mewabah di negara lain. Untuk Domba mengalami peningkatan ekspor, khususnya dengan terbukanya akses pasar ke negara tujuan baru yaitu Brunei Darussalam, yang proses *G to G* nya telah dilakukan sejak tahun 2019. Ekspor ke Brunei dilakukan pada bulan Desember oleh Koperasi Peternak yang bekerja sama dengan peternak di daerah Jawa Timur. Ekspor Domba Hidup ke negara lain seperti Malaysia masih rutin dilakukan dari daerah Sumatera Utara dan sekitarnya meskipun pada awal pandemi *Covid-19*, beberapa pelaku usaha mengeluh karena permintaan turun di Malaysia, namun pada bulan Juni 2020 sudah kembali ada permintaan.

2. Capaian nilai ekspor pangan segar dan olahan ini juga mengalami kenaikan secara terus-menerus selama 2 tahun terakhir. Nilai ekspor tahun 2020 tersebut 140,06% jika dibandingkan dengan realisasi ekspor pada tahun sebelumnya 2019 yang sebesar US\$ 523,89 juta; dan 164,15% jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya 2018 yang baru mencapai US\$ 446,99 juta. Produk yang diekspor diantaranya adalah daging sapi, daging babi, daging kambing/domba, daging unggas, susu dan kepala susu, yoghurt, mentega, keju, telur, madu, lemak, sarang burung walet dan makanan olahan lainnya asal hewan.

Nilai ekspor terbesar adalah dari komoditas sarang burung walet yang mencapai 540,6 juta USD, dengan penambahan nilai dari tahun 2019 sebesar 48,50%. Hal ini karena semakin berkembangnya pemrosesan sarang burung walet sehingga sarang walet dapat diekspor dalam keadaan bersih yang menambah *value* dari sarang walet tersebut. Produk turunan susu seperti yoghurt dan keju jika

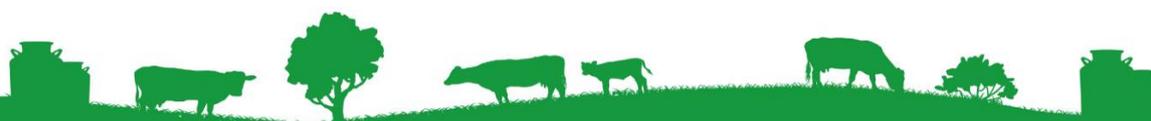


dibandingkan dengan tahun 2019 juga mengalami peningkatan nilai ekspor yaitu 54,82% dan 77,04%, dan jika dilihat dari data pada tabel, dalam 3 tahun terakhir yoghurt dan keju selalu mengalami peningkatan baik secara volume dan nilai ekspor. Komoditas Telur mengalami peningkatan nilai ekspor sebesar 50,15% jika dibandingkan tahun 2019, telur olahan dalam bentuk telur asin sudah secara rutin diekspor ke Singapura.

3. Penambahan pelaku usaha ekspor produk obat hewan ikut mendorong semakin meningkatnya ekspor obat hewan. Dengan pemanfaatan teknologi dan penerapan standar cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB), pelaku usaha ekspor obat hewat telah berhasil menembus 93 negara di 5 benua. Nilai ekspor obat hewan pada tahun 2020 tersebut 118,10% jika dibandingkan dengan realisasi ekspor pada tahun 2019 yang sebesar US\$ 14,12 juta; dan 127,10% jika dibandingkan nilai ekspor 2 tahun sebelumnya 2018 yang baru mencapai US\$ 13,12 juta. Peningkatan nilai ekspor produk obat hewan disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor vaksin sebesar 22,46% dari tahun 2019 yang baru senilai US\$ 12,96 juta menjadi US\$ 15,87 juta pada tahun 2020. Strategi peningkatan ekspor obat hewan ke depan diperlukan diversifikasi produk yang termasuk dalam kategori obat hewan tidak hanya vaksin hewan, tetapi dapat berupa bahan baku obat hewan, *feed additive* maupun *feed suplement*. Perluasan dan promosi obat hewan ke negara-negara nontradisional seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin diharapkan dapat mencapai target ekspor peternakan di tahun 2024.
4. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan para pelaku usaha dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Instansi terkait tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPOM dan perwakilan Indonesia di luar negeri seperti Atase Perdagangan dan Atase Pertanian, serta *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) untuk mendorong pembukaan akses pasar bagi komoditi dan produk peternakan Indonesia ke mancanegara. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dengan beberapa *market place* seperti Aspenku untuk pasar ekspor, sedangkan yang untuk memfasilitasi pengembangan pasar dalam negeri telah difasilitasi kerja sama antara para para pelaku usaha peternakan dengan market place PT. Transportasi Indonesia (Grab); PT. Solusi Pangan Perwiratama (Etanee); PT. Tani Supply Indonesia; PT. Kreasi Tani Laksmi (Sayur Box); dan Tokopedia.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Kinerja peningkatan nilai ekspor produk peternakan didukung oleh sumber daya dari kegiatan: 1). Pengembangan Pengolahan Pangan dan Non Pangan; 2). Pengembangan Pemasaran Peternakan; 3). Kelembagaan dan Usaha Peternakan; 4). Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; 5). Pengelolaan Informasi Pemasaran; 6). Pengujian Mutu Obat Hewan



dan Sertifikasi Obat Hewan; 7). Obat Hewan dan Bahan Biologik; 8). Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH. Nilai efisiensi sumber daya dalam rangka pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan adalah sebesar **51,14%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**. Hasil perhitungan nilai efisiensi dapat dilihat pada Lampiran 5.

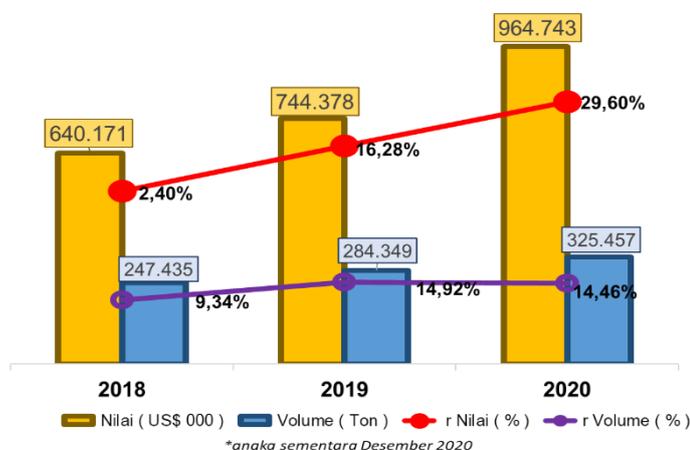
Tabel 25. Kegiatan Pendukung IKU 4 Tahun 2020

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Rp. Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengembangan Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Unit	4.167	4.005	96,10	32	32	100,00
2	Pengembangan Pemasaran Peternakan	Unit	201	201	99,90	1	1	100,00
3	Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Lokasi	8.722	8.441	96,77	113	113	100,00
4	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	NSPK	11.040	10.820	98,01	21	21	100,00
5	Pengelolaan Informasi Pemasaran	Lokasi	1.698	1.674	98,60	15	15	100,00
6	Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	Sampel	6.080	6.049	99,49	1.410	1.664	118,01
7	Obat Hewan dan Bahan Biologik	Dosis	22.313	22.247	99,70	5.147.575	8.737.344	169,74
8	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	3.647	3.556	97,51	130	168	129,23

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2020

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Berdasarkan data BPS RI, nilai ekspor Subsektor Peternakan tahun 2020 sebesar US\$ 964.743 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 29,60% dibandingkan tahun 2019 (Grafik 11).



Grafik 11. Ekspor Komoditas PKH Tahun 2018-2020

Salah satu program strategis Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan ekspor adalah Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GRATIEKS). Oleh karena itu, dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan, menuju pertanian maju, mandiri dan modern. Terdapat 5 kebijakan strategis Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ekspor komoditas pertanian, yang juga menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam upaya mencapai target GRATIEKS, yakni:

- 1) Mendorong pertumbuhan eksportir baru, dengan cara menyiapkan unit usaha dan memberikan pembekalan kepada pelaku usaha agar siap ekspor.
Pada tahun 2020 telah dilakukan upaya identifikasi pelaku usaha ekspor di daerah dengan melibatkan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan di seluruh provinsi. Melalui kegiatan identifikasi pelaku usaha ekspor tersebut, dapat diidentifikasi potensi komoditi dimasing-masing wilayah yang memiliki potensi ekspor, dan para pelaku usaha peternakan yang siap ekspor atau perlu dilakukan pendampingan agar siap ekspor. Disamping itu, pada tahun 2020 juga telah dilakukan beberapa pertemuan dan penyampaian informasi kepada para pelaku usaha baik skala industri maupun UMKM yang memiliki potensi ekspor, untuk fasilitasi akses pasar ekspor, diantaranya yakni:
 - a) Fasilitasi pertemuan dengan *market place* Aspenku.com yang berorientasi ekspor sebagai sarana promosi produk yang berbasis digital.
 - b) Penyampaian informasi terkait peluang promosi dan akses pasar ekspor komoditi peternakan dan kesehatan hewan di beberapa negara seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Afrika Selatan, Jepang, Brunei Darussalam, dan Singapura.
- 2) Menambah ragam komoditas ekspor, dengan cara: mendorong ekspor dalam bentuk jadi, kerja sama dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* menggali potensi daerah, serta mendorong tumbuhnya investasi dibidang industri agribisnis. Pada tahun 2020 telah dilakukan berbagai upaya dalam menambah jenis produk yang dapat diterima di negara yang telah menjadi tujuan ekspor Indonesia, diantaranya adalah:
 - a) Jepang yang sebelumnya baru menerima produk olahan daging ayam yang telah melewati proses pemanasan, maka telah mulai dilakukan proses *G to G* untuk produk lainnya seperti daging beku ayam, dan daging sapi beserta olahannya. Pihak Jepang masih memerlukan informasi lebih lanjut terkait sertifikasi bebas kompartemen AI yang dilakukan Indonesia, serta proses *self declaration* bebas kompartemen AI tersebut di OIE.
 - b) Singapura yang sebelumnya baru menerima produk daging babi dan telur asin, maka tengah dilakukan proses *G to G* untuk akses pasar daging ayam beserta olahannya, dan telur ayam untuk konsumsi.
 - c) Brunei Darussalam yang sebelumnya telah menerima produk susu Indonesia, maka pada tahun 2020 telah selesai proses *G to G* perizinan ekspor kambing



dan domba dari Indonesia yang telah terealisasi pengiriman ekspor perdana pada Desember 2020. Sedangkan untuk penambahan komoditi *Hatching Egg* (HE) masih dalam proses *G to G*.

- d) Cina yang sebelumnya telah menerima produk sarang burung walet asal Indonesia, maka pada tahun 2020 telah diproses permintaan dibukanya akses pasar untuk produk daging ayam, daging sapi, dan ceker ayam. Namun proses *G to G* masih terkendala, karena pihak Cina meminta akses pasar untuk komoditi yang sama. Di sisi lain Cina merupakan negara endemis flu burung.
- 3) Meningkatkan frekuensi pengiriman ekspor dilakukan melalui kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan rekomendasi untuk ekspor di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 4) Menambah negara mitra dagang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, KBRI sebagai Perwakilan Negara Indonesia di negara tujuan ekspor serta memanfaatkan berbagai forum kerja sama. Pada tahun 2020 negara yang menjadi target mitra dagang baru yakni Uni Emirat Arab dan telah dilakukan beberapa komunikasi dan pertemuan secara virtual dengan pihak *the Ministry of Climate Change and Environment* dalam membahas proses *G to G* perizinan ekspor komoditas peternakan. Hingga akhir tahun 2020, perkembangan proses *G to G* yang dihasilkan adalah pihak UEA telah menerima produk olahan daging ayam yang telah melalui proses pemanasan dan *table eggs* Indonesia untuk diekspor, sedangkan untuk daging beku ayam masih memerlukan tahapan proses analisis resiko dan informasi terkait sertifikasi bebas kompartemen yang dilakukan di Indonesia.
- 5) Meningkatkan volume ekspor dengan cara koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para *stakeholder* termasuk para pelaku usaha ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K). Upaya yang telah dilakukan, yakni dengan mendorong para pelaku usaha ekspor terutama untuk komoditi ternak hidup kambing dan domba dengan melakukan kemitraan dengan para peternak serta melakukan pendampingan kepada mitranya dalam aspek produksi. Dengan demikian dapat dihasilkan ternak yang memiliki kualitas sesuai dengan persyaratan ekspor, serta memiliki daya saing baik secara mutu maupun harga di pasar ekspor. Pada akhirnya diharapkan kontinuitas dari ternak yang akan diekspor tanpa menggerus ketersediaan dalam negeri.

Adapun upaya peningkatan ekspor yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni:



- a. Melakukan penetapan komoditas strategis ekspor yang terdiri dari: hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk nonpangan, obat hewan, benih dan bibit ternak
- b. Melakukan pemetaan produk (produksi dan daerah sentra), yaitu di provinsi:
 - a) Sumatera Utara (babi, domba, Sarang Burung Walet/SBW)
 - b) Riau (Ayam buras, ayam ras)
 - c) Kepulauan Riau (babi, SBW)
 - d) Lampung (kambing, ayam buras, ayam petelur)
 - e) Banten (ayam ras, SBW, ayam petelur, obat hewan)
 - f) DKI Jakarta (obat hewan)
 - g) Jawa Barat (domba, ayam ras, obat hewan, SBW)
 - h) Jawa Tengah (domba, kambing, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, SBW)
 - i) DI Yogyakarta (domba, kambing, ayam buras)
 - j) Jawa Timur (kambing, domba, ayam buras, ayam ras, SBW, ayam petelur, obat hewan)
 - k) Bali (babi, ayam petelur, ayam ras)
 - l) NTT (ayam ras, babi)
 - m) Kalimantan Utara (babi)
 - n) Kalimantan Barat (kambing, babi, SBW)
 - o) Kalimantan Timur (ayam pedaging)
 - p) Kalimantan Tengah (babi, ayam buras)
 - q) Kalimantan Selatan (ayam ras, ayam petelur)
 - r) Gorontalo (kambing, ayam buras)
 - s) Sulawesi Tengah (kambing, babi, ayam buras, ayam petelur)
 - t) Sulawesi Selatan (kambing, babi, ayam buras, ayam petelur)
 - u) Papua (babi).
- c. Melakukan pemetaan potensi negara tujuan berdasarkan hasil analisis *market intelligent*, antara lain negara UEA, Jepang, Canada, Cina, Brunei Darussalam dan Singapura.
- d. Melakukan harmonisasi persyaratan kesehatan hewan, dengan negara target tujuan ekspor. Pada tahun 2020 dilakukan proses *G to G* dengan UEA, Singapura, Jepang, Singapura dan Brunei Darussalam yang diantaranya adalah untuk produk ayam, kambing dan domba, serta telur.
- e. Melakukan promosi produk, misi dagang dan negosiasi akses pasar ekspor. Namun pada tahun 2020 ini kegiatan promosi dan misi dagang ke beberapa negara batal dilaksanakan karena pandemi *Covid-19* diantaranya adalah keikutsertaan bersama pelaku usaha untuk mengikuti event pameran dan misi dagang di Qatar, Afrika Selatan, Saudi Arabia, Jepang dan Brunei Darussalam.
- f. Melakukan sinergisme dengan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga seperti Biro Kerja sama Luar Negeri Kementan, Kementerian Luar Negeri. Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka identifikasi produk dan pelaku usaha yang berpotensi ekspor di wilayahnya. Disamping itu, juga dilakukan



koordinasi baik melalui pertemuan maupun komunikasi intensif dengan instansi terkait seperti Biro Kerja sama Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri dalam pemanfaatan forum kerja sama untuk mencari peluang ekspor.

- g. Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor dan peningkatan pengetahuan kepada pelaku usaha yang berpotensi ekspor. Hal ini terutama dilakukan kepada pelaku usaha yang akan melakukan ekspor baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis yang diminta negara tujuan ekspor, maupun dalam pengisian kuesioner *establishment* yang diberikan oleh negara tujuan ekspor.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan ekspor tersebut, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan langkah dan strategi peningkatan ekspor peternakan yang terdiri

- a. Penguatan kelembagaan peternak dengan pengembangan kemitraan dengan *off taker* dan berkoordinasi dengan asosiasi HPDKI terkait ekspor kambing dan domba.
- b. Identifikasi komoditas dan wilayah produksi potensi komoditas ekspor dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Komoditas ternak hidup kambing domba wilayah produksi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo.
 - 2) Komoditas Sarang Burung Wallow (SBW) wilayah produksi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat
 - 3) Komoditas ternak babi wilayah produksi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua.
 - 4) Komoditas ayam petelur wilayah produksi Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan.
 - 5) Komoditas ayam pedaging wilayah produksi Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan)
 - 6) Komoditas ayam buras wilayah produksi di Riau, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan.
 - 7) Komoditas Obat hewan wilayah produksi di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur.
- c. Pendataan negara tujuan ekspor. Pada tahun 2020 pendataan negara yang menjadi potensi tujuan ekspor dan telah dilakukan proses *G to G* pembukaan akses pasar adalah Singapura, Brunei Darussalam, China, Jepang, Canada dan UEA.
- d. Perluasan akses pasar telah dilakukan untuk komoditi:
 - (1) *Bat Guano* ke Canada yang saat ini masih dalam proses *G to G*.



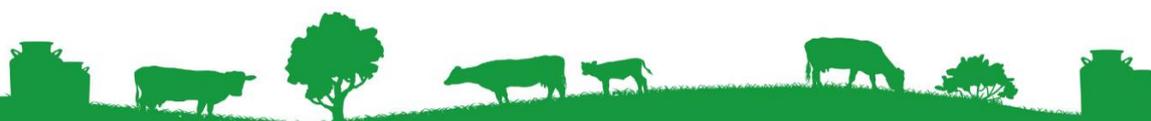
- (2) Kambing dan Domba ke Brunei Darussalam telah disetujui oleh pihak Brunei Darussalam.
 - (3) HE ke Brunei Darussalam yang saat ini masih dalam tahap *G to G*.
 - (4) Tepung Bulu ke Jepang masih dalam tahap *G to G*.
 - (5) Daging ayam ke Jepang masih dalam tahap *G to G*.
 - (6) Produk olahan daging ayam yang melalui proses pemanasan dan telur ke UEA telah disetujui, dan saat ini sedang proses registrasi produk dan pelaku usaha yang akan ekspor.
 - (7) Daging unggas ke UEA masih dalam tahap *G to G*.
 - (8) Daging unggas, ceker ayam, daging sapi dan daging babi ke Cina masih proses *G to G*.
 - (9) Produk daging ayam dan olahannya serta telur ke Singapura masih proses *G to G*.
 - (10) Kambing dan Domba ke Singapura masih proses *G to G*.
- e. Pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan ekspor telah dilakukan kepada 12 Unit perusahaan, dan ke banyak perusahaan lainnya dalam rangka mendorong untuk memasuki pasar ekspor baik melalui pertemuan dengan market place berorientasi ekspor yakni aspenku.com maupun tawaran promosi daging ke luar negeri.
 - f. Penambahan pelaku usaha ekspor produk obat hewan ikut mendorong semakin meningkatnya ekspor obat hewan. Dengan pemanfaatan teknologi dan penerapan standar cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB), pelaku usaha ekspor obat hewat telah berhasil menembus 93 negara di lima benua. Strategi peningkatan ekspor obat hewan ke depan diperlukan diversifikasi produk yang termasuk dalam kategori obat hewan tidak hanya vaksin hewan, tetapi dapat berupa bahan baku obat hewan, *feed aditif* maupun *feed suplemen*. Perluasan dan promosi obat hewan ke negara-negara non tradisional seperti afrika, timur tengah, dan amerika latin diharapkan dapat mencapai target ekspor peternakan di tahun 2024. Kementan juga terus menyarankan produsen obat hewan agar kreatif mengembangkan produk dari bahan lokal. Menggunakan bahan lokal diharapkan dapat mengurangi impor.
 - g. *Market Inteligent*, promosi, misi dagang pada tahun 2020 telah dilakukan bekerja sama dengan perwakilan Indonesia di KBRI negara tujuan ekspor dan para pelaku usaha yakni dengan UEA, Jepang, Cina, Brunei Darussalam dan Singapura.
 - h. Penguatan mutu ternak yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Kesehatan Hewan (Keswan) dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet). Penguatan mutu hasil ternak (produk pangan dan non pangan) oleh Direktorat PPHNak dan Direktorat Kesmavet.
 - i. Pada tingkat produsen, dalam upaya memberikan jaminan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada unit usaha produk hewan yang pelaksanaannya



didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Propinsi dibawah pembinaan pusat. Sertifikat NKV diberikan sebagai bukti terpenuhinya persyaratan hygiene sanitasi unit usaha produk hewan dan. Sertifikat NKV juga menjadi salah satu persyaratan bagi unit usaha yang akan melakukan pemasukan (import) dan/atau pengeluaran (*eksport*) sebagai *establishment number* (nomor registrasi unit usaha) disamping menjadi salah satu nilai tambah dan daya saing bagi produk hewan yang dihasilkan. Sampai dengan tahun 2020 telah diterbitkan sertifikat NKV untuk 2.990 unit usaha.

- j. Peningkatan status wilayah bebas penyakit yang dilaksanakan oleh Direktorat Keswan. Penerapan Sistem Kompartemen bebas penyakit *Avian Influenza* (AI) yang merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pertanian untuk mendorong peningkatan kualitas produk peternakan yang akan diekspor. Sejak merebaknya penyakit AI (*Avian Influenza*) di Indonesia pada tahun 2004, beberapa negara telah menutup impor produk unggas dari Indonesia. Dengan adanya kompartemen bebas AI, maka Indonesia dapat kembali mengekspor daging unggas olahan ke beberapa negara.
- k. Peningkatan Investasi dengan pengembangan investasi bidang usaha peternakan.
- l. Pemanfaatan KUR baik untuk usaha budidaya maupun pasca panen dan pengolahan. Dalam upaya mengembangkan usaha peternakan, terutama pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), maka Ditjen PKH memfasilitasi peternak untuk mempermudah akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada aspek pembiayaan telah dilakukan koordinasi intensif kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam upaya penyediaan skema pembiayaan yang terjangkau dan sesuai kriteria usaha peternakan. Realisasi akad kredit KUR Subsektor Peternakan tahun 2020 mencapai Rp.13,75 triliun atau meningkat 83,33% dibandingkan tahun 2019 dan telah diakses oleh 497.353 debitur. Pada tahun 2021 hingga 26 Januari 2021 telah terealisasi akad kredit KUR Subsektor Peternakan sebesar Rp 0,61 triliun yang diakses oleh 20.312 debitur untuk usaha produktif pembibitan dan budidaya sapi, ternak perah, kambing/domba, dan unggas dan *mix farming*.
- m. Pengembangan Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi Peternak baik di tingkat nasional maupun daerah.
- n. Dukungan KOSTRATANI dalam pengelolaan informasi dan penyuluhan usaha peternakan.

Selain itu, dalam upaya akselerasi peningkatan ekspor produk peternakan Direktorat Jenderal PKH membentuk Tim Percepatan Pengeluaran Benih, Bibit, Hewan, Produk Hewan, Bahan Pakan atau Pakan dan Obat Hewan dari Wilayah RI dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 4542 tahun 2019. Tim ini bertugas untuk membantu kesiapan pelaku usaha calon eksportir dan pelaku usaha eksportir dalam proses ekspor baik secara teknis maupun membantu penyiapan dokumen



persyaratan teknis dan kelengkapannya yang dipersyaratkan negara tujuan, dan membantu koordinasi dengan daerah dan kementerian/lembaga terkait.

Sasaran Program 3 (SP3) **TERJAMINNYA KEAMANAN DAN MUTU PANGAN** **ASAL TERNAK**

Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, kegiatan pengawasan keamanan menjadi sangat penting agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.

SP3. IKU5	
Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	
Target 81,50%	Realisasi 86,60%
% Capaian 106,26%	

Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Meskipun pangan asal hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (*perishable food*) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*hazardous food*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi masyarakat.

Cara perhitungan capaian indikator persentase pangan segar asal hewan yang untuk produk peternakan adalah identifikasi jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan dibagi dengan identifikasi jumlah seluruh sampel produk pangan segar asal hewan, dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:



$$\left(\frac{\sum \text{sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan}}{\sum \text{sampel produk pangan segar asal hewan}} \right) \times 100\%$$

Jumlah seluruh sampel produk pangan segar asal hewan tahun 2020 sebanyak 18.900 sampel yang terdiri atas 14.900 sampel aktif dan 4.000 sampel pasif. Adapun sampel aktif diambil dari 816 unit usaha, yang meliputi tempat penampungan susu, tempat pengolahan susu, gudang kering, rumah potong/gudang, tempat pengolahan daging, peternakan/pengumpul/pengemas telur konsumsi, tempat pengolahan telur. Setelah dilakukan analisis, didapatkan jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sebanyak 16.367 sampel.

Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan tahun 2020 yaitu 86,60% didapatkan dari perhitungan: Jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan/Jumlah seluruh sampel produk pangan segar asal hewan dikalikan 100%. Hasil perhitungan realisasi capaian IKU Peningkatan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan dapat dilihat pada tabel 26.

Tabel 26. Hasil Perhitungan Realisasi Capaian IKU Peningkatan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan

Target dan Realisasi IKSP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target Thn 2020	% Realisasi th 2020 thd 2019	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (Jumlah)	-	81,5	82	82,5	83	84	106,26	108,25	103,71
Realisasi IKSP (Jumlah)	80	86,6	-	-	-	-			

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

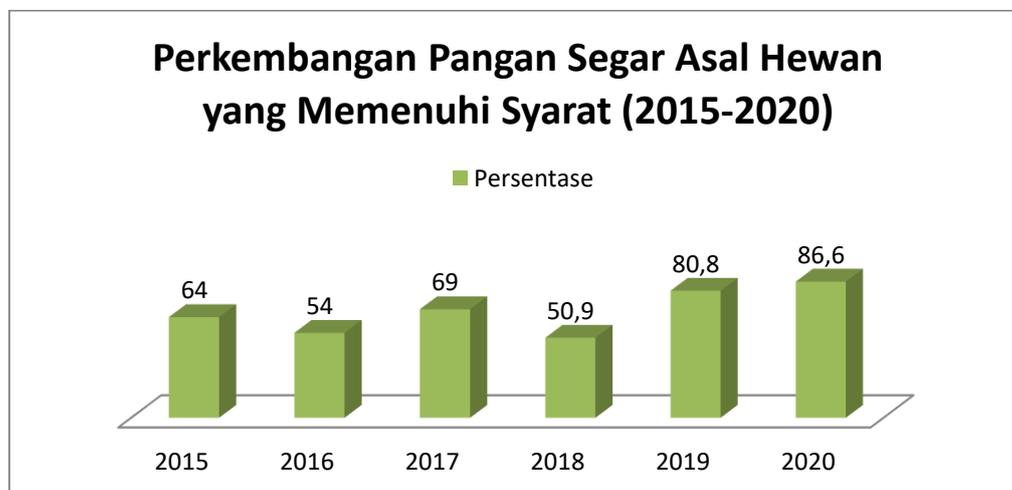
Pada Tabel 26 dapat dilihat, persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan tahun 2020 mencapai 86,60% dari target sebesar 81,50%, sehingga capaian kinerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk indikator kinerja sasaran program ini masuk dalam kategori **“sangat berhasil”** dengan capaian sebesar 106,26%.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya:

Indikator kinerja peningkatan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ini merupakan indikator kinerja baru pada Renstra 2020-2024, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target atau realisasi IKU tahun sebelumnya. Namun demikian dari data yang ada pada tahun 2020, pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (berdasarkan parameter residu dan cemaran mikroba) mencapai 86,60%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2019, maka mencapai sebesar



108,25%. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam capaian pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sejak tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan pangan segar asal hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Grafik 11.



Sumber: Hasil Surveilans BPMSPH dan BB/BVet lingkup Ditjen PKH

Grafik 12. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2020

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah:

Pada tabel 26 dapat dilihat, jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 84,00% yang jatuh pada tahun 2024, maka indikator persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan mencapai sebesar 103,71% dari target.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Realisasi capaian kinerja peningkatan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan tahun 2020 sebesar 86,60% telah melebihi standar nasional Kementerian Pertanian yaitu 81,50%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Dalam rangka penjaminan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan, terutama pangan segar asal hewan. Sehubungan dengan hal tersebut telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan



output pengawasan mutu dan keamanan produk hewan. Output ini dilaksanakan melalui tiga komponen meliputi: (1) Pengawasan keamanan produk hewan yang melibatkan pemerintah daerah (Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota), (2) Monitoring dan surveilans keamanan produk hewan (residu, cemaran mikroba serta resistensi antimikroba) yang melibatkan 9 Laboratorium Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang meliputi: BPMSPH, BBVet, dan BVet dan (3) Pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan yang dilaksanakan oleh BPMSPH. *Outcome* yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan.

Peningkatan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ini dikarenakan telah meningkatnya pemenuhan persyaratan teknis produk hewan melalui penerapan cara yang pada rantai produksi produk hewan. Meskipun demikian masih diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Kesmavet serta peningkatan kapasitas laboratorium kesmavet baik pusat maupun daerah untuk lebih mengoptimalkan kegiatan penjaminan keamanan produk hewan.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Kinerja peningkatan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan didukung oleh sumber daya dari kegiatan: 1) Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH; dan 2) Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk. Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan didapatkan hasil nilai efisiensi sebesar **50,70%** atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya. Hasil perhitungan efisiensi dapat dilihat pada Lampiran 5, sedangkan kegiatan pendukung IKU ini dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Kegiatan Pendukung IKU 5 Tahun 2020

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Rp. Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	3.647	3.556	97,51	130	168	129,23
2	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Sampel	14.822	14.564	98,26	16.630	18.900	113,65

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2020

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Keberhasilan kegiatan ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pelaku unit usaha produk hewan. Fungsi pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan pengawasan yang



telah dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan. Keberhasilan output ini juga tidak terlepas dari kinerja *output* pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH.

Sasaran Program 4 (SP4) TERSEDIANYA SARANA PETERNAKAN

Penggunaan sarana peternakan untuk kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak dalam setiap aspek proses produksi merupakan bentuk transformasi pertanian modern dan mutlak harus dilakukan. Transformasi ke arah peternakan modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas, efisien dalam penggunaan sumber daya dan teknologi, serta mampu menghasilkan output yang berkualitas, bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Dalam penyediaan pangan asal ternak bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dibutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis. Namun dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, adanya keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitasi di daerah maupun pusat menyebabkan terbatasnya penyediaan fasilitas tersebut di Indonesia.

SP4. IKU6	
Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Peternakan	
Target 85%	Realisasi 90,94%
% Capaian 106,99	

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bantuan sarana peternakan (sarana pengolahan hasil peternakan, sarana Kesehatan masyarakat veteriner dan sarana Kesehatan hewan, sarana perbibitan dan produksi ternak, sarana pakan), maka dilakukan survei terhadap sarana yang diberikan. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan (termanfaatkan) sesuai dengan tujuannya.

Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dengan menggunakan kuisisioner (survei) ke seluruh UPH (Unit



Pengolahan Hasil) penerima. Tingkat kemanfaatan sarana-prasarana laboratorium Kesehatan hewan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan ke 10 UPT Veteriner. Sedangkan tingkat kemanfaatan sarana prasarana Kesmavet, Sarana Pakan dan saran perbibitan dan produksi ternak dengan menggunakan kuesioner yang diberikan ke Dinas Provinsi yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang menerima bantuan. Jenis sarana-prasarana dapat dilihat pada Lampiran 10 dan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Hasil Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Peternakan

Jenis Sarana Pertanian	Jumlah Alsintan yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel Alsintan (Unit)	Alsintan Yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
Direktorat Pakan				
Sarana Prasana UPP (Unit Pengolahan Pakan) Ruminansia	20	20	20	100%
Sarana Prasana UPP (Unit Pengolahan Pakan) Unggas	13	13	9	87,88%
Direktorat Perbibitan dan Produksi ternak				
Container Semen Beku	446	446	444	99,55%
Direktorat Keswan				
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	10	10	10	91%
Direktorat Kesmavet				
Sarana Prasarana Pematangan Kurban	2	2	2	100%
Direktorat PPHNak				
Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan	10	10	9	90%
Unit Pengolahan Unggas dan Aneka Ternak	2	2	1	50%
Unit Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	5	5	5	100%
Sarana Pemasaran	1	1	1	100%
Rata - rata Tingkat Kemanfaatan				90,94%

Sumber: Hasil perhitungan dari Kuesioner yang dibagikan ke Responden yang diolah oleh Direktorat lingkup Ditjen PKH

Realisasi capaian IKU tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29. Realisasi capaian IKU Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Peternakan

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	85,00	87,00	90,00	92,00	95,00	106,99	95,73
Realisasi IKSP (%)	90,94	-	-	-	-		

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini:

Pada tabel 29 dapat dilihat bahwa tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan tahun 2020 sebesar 90,94% atau mencapai 106,99% dari target sebesar 85%, artinya capaian kinerja “**Sangat Berhasil**” dari target yang sudah ditetapkan pada tahun 2020.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya:



Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target atau realisasi tahun sebelumnya karena pada tahun 2019 belum dilakukan survei ke penerima manfaat bantuan sarana prasarana yang diberikan ke masyarakat.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah:

Pada tabel 29 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan tahun 2020 sebesar 90,94% atau mencapai 95,73% apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2024 dengan target sebesar 95,00%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Realisasi capaian kinerja kemanfaatan sarana prasarana peternakan tahun 2020 sebesar 90,94% atau mencapai 109,15% dari target standar nasional Kementerian Pertanian yaitu sebesar 83,32%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja:

Beberapa hal yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian kinerja tingkat sarana peternakan, diantaranya:

1) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

Idul Adha merupakan Hari Raya bagi pemeluk agama Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia dimana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban (sapi, kerbau, kambing, dan domba) menjadi bagian penting dari Hari Raya tersebut. Pemotongan hewan kurban di Indonesia selama ini masih dilakukan secara tradisional, serba darurat, apa adanya, dan cenderung mengabaikan aspek hygiene sanitasi, kesejahteraan hewan dan kesehatan lingkungan. Pemotongan hewan kurban umumnya dilakukan di luar Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), seperti di halaman rumah, masjid, atau di tepian jalan dengan fasilitas pemotongan hewan dan penanganan karkas/daging yang sangat minim, sehingga tidak ada jaminan terhadap keamanan dan kelayakan daging hewan kurban yang akan dibagikan dan tentunya sangat berisiko mengancam kesehatan orang yang mengkonsumsi.

Dalam rangka upaya penjaminan keamanan daging ASUH tersebut, maka diberikan bantuan anggaran untuk memfasilitasi tempat pemotongan hewan kurban. Sehingga diharapkan fasilitasi sarana prasarana pemotongan kurban dapat menyediakan tempat pemotongan hewan kurban yang memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.



Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat veteriner dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana kesehatan masyarakat veteriner tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan (termanfaatkan) sesuai dengan tujuannya. Target tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat tahun 2020 adalah 90% dengan realisasi 100% (111,11%) atau **sangat berhasil**.

Tingkat kemanfaatan sarana prasana kesehatan masyarakat veteriner dihitung berdasarkan kemanfaatan fasilitasi sarana prasarana yang diberikan pada tahun 2019 yaitu Fasilitasi Sarana Prasarana Pemotongan Hewan Kurban sebanyak 2 unit, di Masjid Uswatuh Khasanah Kota Tangerang Provinsi Banten dan Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Kedua fasilitas pemotongan hewan kurban tersebut sudah dibangun sesuai dengan persyaratan teknis kesmavet dan sudah dimanfaatkan untuk pemotongan kurban tahun 2020. Fasilitasi sarana prasarana pemotongan hewan kurban terdiri atas: sarana penerapan kesejahteraan hewan, sarana penerapan higiene dan sanitasi, sarana pendukung dapat berupa sarana penanganan limbah dan kotoran, dan kegiatan pendukung berupa pembinaan dan pendampingan pelaksanaan pemotongan hewan kurban terhadap panitia pelaksana kurban dan pengurus masjid. Pengukuran pemanfaatan fasilitasi sarana prasarana pemotongan kurban dilakukan melalui monitoring pada saat pelaksanaan pemotongan kurban.

Tabel 30. Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Penerima	Tingkat Kemanfaatan
1	Fasilitasi Sarana Prasarana Pemotongan Kurban	1	Masjid Uswatuh Khasanah Kota Tangerang Provinsi Banten	Termanfaatkan
2	Fasilitasi Sarana Prasarana Pemotongan Kurban	1	Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat	Termanfaatkan

Sumber: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2020

2) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan Hewan

Efektivitas pengelolaan laboratorium secara umum dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium yang sesuai standar. Kemanfaatan sarana prasarana laboratorium didapat dengan distribusi kuisioner ke 10 UPT Veteriner. Jenis alat laboratorium yang dinilai kemanfaatannya adalah alat yang digunakan di 6 Lab yaitu Laboratorium Virologi, Bakteriologi, Parasitologi, Bioteknologi, Patologi dan Kesmavet dengan jumlah per unit Laboratorium Veteriner 83 jenis alat dengan hasil penilaian bahwa



91% masih dimanfaatkan dan dilakukan pemeliharaan dengan baik selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10.

3) Tingkat Kemanfaatan Pengolahan Hasil Peternakan

Target tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun 2020 adalah 85% dengan realisasi 88,88% (104,57%) atau **sangat berhasil**. Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah: Fasilitas sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan T-1 (tahun 2019) berjumlah 18 unit terdiri dari 17 unit sarana prasarana pengolahan dan 1 unit sarana prasarana pemasaran hasil peternakan. Tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan seperti tertera pada Tabel 32.

Tabel 31. Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

No	Jenis Sarana Prasarana	Kelompok Penerima	Tingkat Kemanfaatan
1	Peningkatan Mutu Produk Olahan Produk : keju mozarella	Kelompok Talang Perindu (Lazi Farm) Kab. Agam, Provinsi Sumbar	Termanfaatkan
2	Peningkatan Mutu Produk Olahan Produk : susu pasteurisasi	Sentra Susu Pondok Rangon, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI	Termanfaatkan
3	Peningkatan Mutu Produk Olahan Produk : susu pasteurisasi	Kelompok Bina Kreatif, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat	Termanfaatkan
4	Peningkatan Mutu Produk Olahan Produk : susu pasteurisasi	Kelompok Cipta Priangan, Kab. Sukabumi, Provinsi Jabar	Termanfaatkan
5	Peningkatan Mutu Produk Olahan Produk : susu kambing PE bubuk	Kelompok Maju Mapan, Kab. Gunung Kidul, Provinsi DIY	Termanfaatkan
6	Peningkatan Mutu Produk Olahan Produk : susu pasteurisasi	Kelompok Nedyo Rahayu, Kab. Madiun. Provinsi Jawa Timur	Termanfaatkan
7	Peningkatan Mutu Produk Olahan Produk : susu pasteurisasi	Kelompok Minanga Jaya, Kab. Enrekang, Provinsi Sulsel	Termanfaatkan
8	Peningkatan Mutu Produk Olahan Produk : susu segar kambing organik	Kelompok Usaha Tani, Kab. Trenggalek, Provinsi Jatim	Termanfaatkan
9	Peningkatan Mutu Produk Olahan Produk : susu pasteurisasi	Kelompok Sugih Mukti Mandiri, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat	Termanfaatkan
10	Peningkatan Mutu Produk Olahan Produk : susu pasteurisasi	Kelompok Karya Bersama, Kota Binjai, Provinsi Sumut.	Tidak Termanfaatkan
11	Pengolahan unggas dan aneka ternak Produk : karkas ayam organik	Kelompok Berkat Usaha Bersama, Kota Metro, Provinsi Lampung	Tidak Termanfaatkan
12	Pengolahan unggas dan aneka ternak Produk : telur asin	KTT. Kamboja, Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB	Termanfaatkan
13	Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair Produk : Pupuk organik padat	Kelompok Karya Lestari Kab. Pelalawan, Provinsi Riau	Termanfaatkan
14	Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair Produk : Pupuk organik padat dan cair	Kelompok Mandiri Jaya Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat	Termanfaatkan



No	Jenis Sarana Prasarana	Kelompok Penerima	Tingkat Kemanfaatan
15	Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair Produk : Pupuk organik padat	Kelompok Citawa, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat	Termanfaatkan
16	Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair Produk : Pupuk organik padat	Kelompok Manik Amerta, Kab. Tabanan, Provinsi Bali	Termanfaatkan
17	Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair Produk : Pupuk organik padat	Kelompok Sumber Makmur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Termanfaatkan
18	Sarana pemasaran	Oesapa Barat, Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi NTT	Termanfaatkan
Rerata Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana			88,88%

Sumber: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, 2020.

Dari fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran tahun 2019 sebanyak 18 unit telah termanfaatkan sebanyak 16 unit sedangkan 2 unit tidak termanfaatkan dengan optimal, yaitu:

- a) Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan susu di Kelompok Karya Bersama, Kota Binjai, Provinsi Sumut tidak termanfaatkan dengan optimal karena keterbatasan bahan baku susu segar sehingga sarana tidak beroperasi setiap hari (terbatas).
- b) Fasilitasi sarana prasarana pengolahan unggas dan aneka ternak di Kelompok Berkat Usaha Bersama di Kota Metro Lampung tidak termanfaatkan dengan optimal karena ketidaksesuaian spesifikasi salah satu alat mesin dengan output yang diharapkan (mesin pemarut jamu).

4) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Perbibitan dan Produksi Ternak

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana perbibitan dan produksi ternak tahun 2020 maka dilakukan identifikasi jumlah sarana berupa kontainer yang diberikan ke dinas provinsi yang menangani fungsi peternakan dan Kesehatan hewan.

Target tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana perbibitan dan produksi ternak tahun 2020 adalah 90% dengan realisasi 99,55% (110,61%) atau **sangat berhasil**. Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana perbibitan dan produksi ternak adalah: Fasilitasi sarana Kontainer T-1 (tahun 2019) sebanyak 446 unit kepada 29 provinsi, dan yang dimanfaatkan sebanyak 444 unit karena 2 unit kontainer di Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta kondisinya rusak dan mudah menguap. Tingkat kemanfaatan sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak seperti tertera pada Tabel 33.

Tabel 32. Tingkat kemanfaatan sarana prasarana perbibitan dan produksi



No	Provinsi	Jumlah	Tingkat Kemanfaatan
1	Sumatera Utara	30 Unit	Termanfaatkan
2	Sumatera Barat	50 Unit	Termanfaatkan
3	Riau	8 Unit	Termanfaatkan
4	Sumatera Selatan	10 Unit	Termanfaatkan
5	Lampung	70 Unit	Termanfaatkan
6	Bangka Belitung	4 Unit	Termanfaatkan
7	Kepulauan Riau	5 Unit	Termanfaatkan
8	DKI Jakarta	2 Unit	Tidak Termanfaatkan (rusak dan mudah menguap)
9	Jawa Barat	32 Unit	Termanfaatkan
10	Jawa Tengah	62 Unit	Termanfaatkan
11	Jawa Timur	20 Unit	Termanfaatkan
12	Banten	5 Unit	Termanfaatkan
13	Bali	6 Unit	Termanfaatkan
14	NTB	2 Unit	Termanfaatkan
15	NTT	16 Unit	Termanfaatkan
16	Kalimantan Barat	18 Unit	Termanfaatkan
17	Kalimantan Tengah	10 Unit	Termanfaatkan
18	Kalimantan Timur	7 Unit	Termanfaatkan
19	Kalimantan Utara	2 Unit	Termanfaatkan
20	Sulawesi Utara	5 Unit	Termanfaatkan
21	Sulawesi Tengah	6 Unit	Termanfaatkan
22	Sulawesi Selatan	3 Unit	Termanfaatkan
23	Sulawesi Tenggara	12 Unit	Termanfaatkan
24	Gorontalo	15 Unit	Termanfaatkan
25	Sulawesi Barat	10 Unit	Termanfaatkan
26	Maluku	10 Unit	Termanfaatkan
27	Maluku Utara	6 Unit	Termanfaatkan
28	Papua Barat	15 Unit	Termanfaatkan
29	Papua Barat	5 Unit	Termanfaatkan
Total		446	444

Sumber: Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, 2020

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kemanfaatan} &= \frac{\text{Jumlah yang disalurkan}}{\text{Jumlah yang dimanfaatkan}} \times 100\% \\ &= \frac{444}{446} \times 100 \\ &= \mathbf{99,55\%} \end{aligned}$$

5) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Pakan

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pakan tahun 2020 maka dilakukan identifikasi jumlah sarana berupa peralatan untuk pengembangan pakan olahan untuk ternak ruminansia dan unggas yang diberikan ke kepada kelompok peternak. Target tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pakan tahun 2020 adalah 85% dengan realisasi 93,94% (110,52%) atau **sangat berhasil**.



Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pakan adalah: Fasilitas sarana peralatan untuk pengembangan pakan olahan untuk ternak ruminansia dan unggas T-1 (tahun 2019) sebanyak 33 unit yang diberikan kepada 33 kelompok peternak, dan yang dimanfaatkan sebanyak 29 unit karena 4 unit Sarana Prasarana UPP (Unit Pengolahan Pakan) Unggas yang tidak memanfaatkan. Fasilitas sarana prasarana pengolah pakan di kelompok Pelita Jaya dan Hidup Bersama di Kabupaten Tanah Laut dan kelompok Mufakat 1 dan Cinta Bertani di kabupaten Hulu Sungai Utara tidak memanfaatkan dikarenakan kegagalan proses lelang pengadaan bahan pakan. Hal ini menyebabkan alsin pengolah pakan tidak dimanfaatkan secara optimal (produksi hanya menggunakan bahan pakan seadanya dan tidak rutin). Tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolah pakan seperti tertera pada Tabel 34.

Tabel 33. Tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolah pakan

No	Jenis Sarana Prasarana	Kelompok Penerima	Alamat	Tingkat Kemanfaatan
1	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Ayam/Itik	Maju Jaya Mandiri	Ds. Jati Mulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung	Termanfaatkan
2	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Ayam/Itik	KWT Sehati	Ds. Sri Katon, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Lampung	Termanfaatkan
3	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Ayam/Itik	Sumber Rejeki	Ds. Suka Pura, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan, Lampung	Termanfaatkan
4	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Ayam/Itik	Mekar Tani IV	Ds. Sukamanah, kec. Tanara, Kab. Serang, Banten	Termanfaatkan
5	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Ayam/Itik	Karya Tani	Ds. Tamiang, Kec. Gunung Kaler, Kab. Tangerang, Banten	Termanfaatkan
6	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Ayam/Itik	Mutiara Alam Pesawahan	Ds. Pringkasep, Kec. Pabuaran, kab. Subang, Jawa Barat	Termanfaatkan
7	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Ayam/Itik	Sido Dadi	Ds. Sari Kemuning, Kec. Senduro, kab. Lumajang, Jawa Timur	Termanfaatkan
8	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Ayam/Itik	Pelita Jaya	Ds. Handil babirik, Kec. Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut, Kalsel	Tidak Termanfaatkan
9	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Ayam/Itik	Hidup Bersama	Ds. Maluka Baulin, Kec. Kurau, Kab. Tanah Laut, Kalsel	Tidak Termanfaatkan
10	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Ayam/Itik	Mufakat 1	Ds. Banyu Hirang, Kec. Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalsel	Tidak Termanfaatkan
11	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Ayam/Itik	Cintai Bertani	Ds. Rantau Karau Hulu, Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalsel	Tidak Termanfaatkan
12	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Ayam/Itik	Sari Alam Tani	Ds. Motilango, Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango, Gorontalo	Termanfaatkan
13	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Ayam/Itik	Unggas Perkasa	Kel. Hunggaluwa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, Gorontalo	Termanfaatkan
14	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Gasik	Ds. Pegajahan, Kec. Pegajahan, Kab. Serdang Bedagai, Sumut	Termanfaatkan
15	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Karya Bersama	Kel. Bandar Sinembah, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Sumut	Termanfaatkan
16	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Merbau Makmur II	Ds. Teluk Merbau, Kec. Dayun, Kab. Siak, Riau	Termanfaatkan
17	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Bahagia Bersama	Ds. Tasik Juang, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu, Riau	Termanfaatkan

No	Jenis Sarana Prasarana	Kelompok Penerima	Alamat	Tingkat Kemanfaatan
18	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Maju Bersama Group	Ds. Sumber Baru, Kec. Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah, Lampung	Termanfaatkan
19	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Sendang Kamulyan	Ds. Panca Karsa Jaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, Lampung	Termanfaatkan
20	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Sulanjana	Ds. Sukalarang, Kec. Sukalarang, kab. Sukabumi, Jawa Barat	Termanfaatkan
21	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Tanjung Jaya	Kp. Kandang Sapi, Ds. Pananggapa, Kec. Cibinong, Kab. Cianjur, Jawa Barat	Termanfaatkan
22	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Budiasih	Ds. Padamulya, Kec. Cipunagara, Kab. Subang, Jawa Barat	Termanfaatkan
23	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Sejahtera Sahabat Mandiri	Ds. Purwadadi, Kec. Purwadadi, Kab. Subang, Jawa Barat	Termanfaatkan
24	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Karya Kinasih	Ds. Bakung Kidul, Kec. Jamblang, Kab. Cirebon, Jawa Barat	Termanfaatkan
25	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Mukti Andhini I	Ds. Cucukan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, Jawa Tengah	Termanfaatkan
26	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Margo Raharjo Empat	Ds. Kumpul Rejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah	Termanfaatkan
27	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Andini Lestari 2	Pranti, Ds. Srihardono, Kec. Pundong, Kab. Bantul, DI Yogyakarta	Termanfaatkan
28	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Rukum Mulyo	Suruh, Ds. Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DI Yogyakarta	Termanfaatkan
29	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Sumber Rejeki	Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, Jawa Timur	Termanfaatkan
30	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Kedung Gondang	Ds. Jono, Kec. Temayang, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur	Termanfaatkan
31	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Ustan Mandiri	Ds. Dolokgede, Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur	Termanfaatkan
32	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Sapi (Ruminansia)	Bareng Mele II	Ds. Kelayu Jorong, Kec. Selong, kab. Lombok Timur, NTB	Termanfaatkan
33	Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan. Produk: Pakan Silase (Sapi/Ruminansia)	Hurip Mekar	Ds. Cihurip, Kec. Cihurip, Kab. Garut, Jawa Barat	Termanfaatkan

Sumber: Direktorat Pakan, 2020

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

Kinerja tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan tahun 2020 didukung oleh sumber daya dari kegiatan Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan dan Pengembangan Pengolahan Pangan dan Non Pangan. Nilai efisiensi sumber daya dalam rangka peningkatan produksi telur adalah sebesar **50,05%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan **efisien**. Kegiatan pendukung IKU tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dapat dilihat pada Tabel 30 dan hasil perhitungan nilai efisiensi dapat dilihat pada lampiran 5.

Tabel 34. Kegiatan Pendukung IKU 6 Tahun 2020



No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Rp. Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan	Unit	4.352	4.329	99,48	4	4	100,00
2	Pengembangan Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Unit	4.167	4.005	96,10	32	32	100,00

Sumber: SMART Kemenkeu, 2020.

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Keberhasilan kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Bantuan sarana peternakan yang diberikan sesuai dengan permintaan dan pengajuan proposal dari provinsi;
- 2) Bantuan sarana peternakan diberikan berdasarkan kawasan komoditas;
- 3) Penerima bantuan sarana pertanian merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CP/CL yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi setempat;
- 4) Adanya koordinasi yang optimal dan terencana antara satker provinsi, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

Sasaran Program 5 (SP5) MENINGKATNYA LUAS WILAYAH YANG TERBEBAS DARI PENYAKIT HEWAN

Persentase wilayah yang terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis *Zoonosis* (PHMS) merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten/kota. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih difokuskan pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza*, dan *Hog Cholera* atau yang sering dikenal dengan RABAH. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status Kesehatan hewan di kabupaten/kota, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi dan penyakit bersifat *zoonosis* atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas. Perhitungan wilayah terkendali PHMS didapat dari rata-rata Angka Kesehatan Hewan (AKH) 402 Kab/Kota di 34 Provinsi dengan hasil 80,01%.



SP5. IKU7 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	
Target 80,00%	Realisasi 80,01%
% Capaian 100,13%	

Cara perhitungan capaian indikator Per wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis adalah Identifikasi total wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota) (a) dibagi dengan Identifikasi total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota) (b), dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Persentase wilayah yang terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis dapat dilihat pada tabel 35.

Tabel 35. Hasil perhitungan Persentase wilayah yang terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis

Target dan Realisasi IKSP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target Thn 2020	% Realisasi thd 2020 thd 2019	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	-	80	80,5	80,5	81,0	81,0	100,13	102,56	98,89
Realisasi IKSP (%)	78,1	80,1	-						

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Pada tabel 35 dapat dilihat bahwa persentase wilayah yang terkendali tahun 2020 mencapai 80,01% dari target sebesar 80,00%, sehingga capaian kinerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk indikator kinerja sasaran program ini masuk dalam kategori **“sangat berhasil”** dengan capaian sebesar 100,13%. Penghitungan Persentase wilayah terkendali PHMS berdasarkan pada Angka Kesehatan hewan di 404 Kabupaten/kota di 34 Provinsi. Data status kesehatan hewan per provinsi tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 36

Tabel 36. Data status kesehatan hewan per provinsi tahun 2020

Provinsi	Nilai Rata-rata AKH
Aceh	69,38
Bali	74,13
Bangka Belitung	90,70

Provinsi	Nilai Rata-rata AKH
Banten	85,82
Bengkulu	88,18
Di Yogyakarta	76,84
Dki Jakarta	82,47
Gorontalo	61,61
Jambi	78,14
Jawa Barat	78,59
Jawa Tengah	78,71
Jawa Timur	77,67
Kalimantan Barat	89,32
Kalimantan Selatan	82,11
Kalimantan Tengah	82,46
Kalimantan Timur	92,79
Kalimantan Utara	87,06
Kepulauan Riau	76,91
Lampung	90,59
Maluku	86,17
Maluku Utara	88,89
Nusa Tenggara Barat	89,49
Nusa Tenggara Timur	77,16
Papua	93,48
Papua Barat	82,73
Riau	69,96
Sulawesi Barat	79,08
Sulawesi Selatan	71,78
Sulawesi Tengah	76,22
Sulawesi Tenggara	78,02
Sulawesi Utara	79,48
Sumatera Barat	73,10
Sumatera Selatan	85,99
Sumatera Utara	77,14
Grand Total	80,01

Sumber: Direktorat Kesehatan Hewan, 2020

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya:

Pada tabel 36 dapat dilihat bahwa capaian persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis pada tahun 2020 sebesar 80,01% atau meningkat 2,40% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang hanya sebesar 78,10%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 78,10%, maka persentase wilayah yang terkendali PHMS mencapai sebesar 102,56%.



c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah:

Pada tabel 35 dapat dilihat bahwa persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dimana target pada akhir tahun 2024 sebesar 81,00%, maka capaian tahun 2020 adalah sebesar 98,89% dan ditargetkan akan mencapai 100% di tahun 2024.

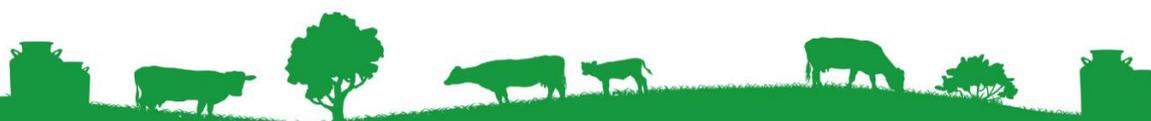
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Realisasi capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 80% telah melebihi standar nasional Kementerian Pertanian yaitu 80,10% atau masuk dalam kategori “**sangat berhasil**” dengan capaian sebesar 100,13%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Keberhasilan pencapaian realisasi kinerja untuk wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis, diantaranya disebabkan:

1. Pelaksanaan surveilans ke wilayah tertarget yang dilakukan oleh 8 UPT Veteriner yaitu: Balai Veteriner Medan, Balai Veteriner Bukittinggi, Balai Veteriner Lampung, Balai Veteriner Banjarbaru, Balai Besar Veteriner Maros, Balai Besar Veteriner Wates, Balai Besar Veteriner Denpasar, serta Balai Veteriner Subang. Kegiatan surveilans untuk penyakit rabies sebanyak 9.000 sampel. Kegiatan surveilans untuk penyakit Avian Influenza sebanyak 33.423 sampel. Surveilans yang dilakukan untuk penyakit Brucellosis sebanyak 18.987 sampel.
2. Pengendalian penyakit Rabies melalui kegiatan vaksinasi terutama di wilayah risiko tinggi untuk meningkatkan kekebalan kelompok hewan penular di 31 provinsi dengan penyediaan vaksin di pusat sebanyak 340.000 dosis. Pengendalian penyakit Avian Influenza (AI) secara nasional, pada tahun 2020 telah dialokasikan 937.750 dosis vaksin AI di 6 wilayah risiko tinggi melalui anggaran TP (Tugas Pembantuan) di dinas provinsi dan 1.062.500 dosis yang disediakan sebagai stok pusat apabila terjadi wabah atau kekurangan vaksin. Kegiatan pengendalian brucellosis yang dilakukan antara lain: alokasi vaksin brucellosis sebanyak 67.000 dosis pada 8 provinsi. Rencana selanjutnya dalam mencapai target bebas brucellosis tahun 2025 antara lain:
 - a. Surveilans di wilayah bebas untuk memastikan tidak ditemukannya agen penyakit, serta di wilayah endemis untuk mengukur prevalensi
 - b. Melanjutkan program bebas brucellosis Pulau Jawa
 - c. Menindaklanjuti mentoring dan surveilans di UPT perbibitan untuk dapat menetapkan status brucellosis
3. Produksi Obat dan Vaksin oleh Pusvetma pada tahun 2020 sebanyak 5.147.575 dosis



4. Pengujian dan sertifikasi obat hewan dalam rangka penjaminan mutu obat hewan yang beredar.
5. Pengawasan lalu lintas hewan dan bahan asal hewan dan penerapan biosecurity
6. Pengawasan Obat Hewan
7. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, peningkatan koordinasi dan fasilitasi Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner di Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya.
8. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan melalui aplikasi iSIKHNAS dan kapasitas Laboratorium Veteriner. iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang mutakhir. Sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan. Selain itu, iSIKHNAS memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi untuk membuat berbagai sistem tersebut lebih efisien dan terjangkau bagi lebih banyak pengguna. Integrasi berbagai sistem ini membuat data pada sistem tersebut menjadi jauh lebih kuat dan akan memberikan dukungan yang lebih baik bagi para pengambil keputusan di berbagai tingkatan.

Kendala dalam Pengendalian PHM dan penyakit Zoonosis, diantaranya:

- 1) Data populasi ternak atau HPR (rabies) tidak diketahui di daerah wabah atau tertular sehingga pelaksanaan vaksinasi tidak sesuai persyaratan;
- 2) Belum tersedianya ROADMAP pembebasan penyakit disetiap wilayah sehingga pembebasan penyakit tidak tertarget dengan baik.
- 3) Kurangnya kesadaran peternak atau pemilik hewan (anjing) dalam pelaksanaan vaksinasi dan masih banyak pemilik hewan (anjing) yang melepasliarkan sehingga sulit dilakukan vaksinasi.
- 4) Keterbatasan SDM (Drh, paramedik) di daerah sehingga pelaksanaan pengobatan maupun vaksinasi tidak bisa dilakukan secara optimal
- 5) Masih kurangnya ketersediaan vaksin dan obat serta sarana pendukung keswan lainnya di beberapa wilayah karena keterlambatan penyediaan vaksin serta minimnya dukungan APBD I dan APBD II dalam pengadaan vaksin maupun obat.
- 6) Lemahnya pengawasan lalulintas hewan dan produk hewan antar wilayah sehingga memudahkan penyebaran penyakit dari daerah tertular ke daerah bebas.
- 7) Kurangnya sosialisasi biosecurity dan tata cara peternak yang baik oleh petugas kepada peternak.
- 8) Pelaksanaan otonomi daerah yang belum rapi. Sifat penyakit yang tidak mengenal batas administratif akan mengalami kendala apabila pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan masih terbatas oleh kebijakan daerah.



- 9) Adanya pandemi covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan pelayanan terkendala
- 10) Aspek pendanaan perlu mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menangani penyakit hewan spesifik lokasi yang menjadi prioritas daerah. Keterbatasan dana memiliki konsekuensi pembatasan jumlah penyakit hewan yang dapat dilakukan pengendalian dan pemberantasan.
- 11) Faktor kelembagaan dan keterbatasan sumberdaya yang terlibat dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. Jumlah SDM dokter hewan dan tenaga paramedik veteriner baik di pusat maupun UPT masih jauh dari kebutuhan. Meskipun rekrutment Tenaga Harian Lepas (THL) telah dilaksanakan dan perannya sangat membantu memperkuat basis utama peternakan dan kesehatan hewan yaitu puskesmas serta penguatan kelembagaan pelayanan kesehatan hewan (surveillans, pengendalian penyakit hewan, pengawasan obat hewan) namun masih belum dapat mencukupi kebutuhan akan tenaga medik maupun paramedik veteriner di lapangan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Pencapaian kinerja persentase wilayah yang terkendali PHMS didukung oleh sumber daya dari kegiatan: 1) Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan; 2) Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan; 3) Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan; 4) Obat Hewan dan Bahan Biologik; 5) Kelembagaan Veteriner; 6) Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Kesehatan Hewan; 7) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan dengan nilai efisiensi sebesar **50,92%** atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya. Kegiatan pendukung IKU dapat dilihat pada tabel 37 dan Hasil perhitungan nilai efisiensi dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 37. Kegiatan Pendukung IKU 7 Tahun 2020

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Rp. Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Sampel	37.432	36.814	98,35	98.000	150.013	153,07
2	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Dosis	43.335	42.582	98,26	2.978.886	2.978.431	99,98
3	Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	Sampel	6.080	6.049	99,49	1.410	1.664	118,01
4	Obat Hewan dan Bahan Biologik	Dosis	22.313	22.247	99,70	5.147.575	8.737.344	169,74
5	Kelembagaan Veteriner	Unit	21.963	21.432	97,58	11	11	100,00
6	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	Dokumen	38.888	38.134	98,06	7	7	100,00
7	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	Laporan	1.592	1.482	93,08	9	9	100,00

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2020

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian persentase wilayah yang terkendali PHMS, antara lain:

1. Pemberian alokasi anggaran untuk obat dan vaksin dan operasional pelaksanaan vaksinasi melalui dana Tugas Pembantuan Provinsi atau pengobatan serta penyediaan bahan pengendalian sebagai stok pusat dalam keadaan wabah.
2. Pelaksanaan surveilans tertarget oleh 8 UPT Veteriner.
3. Produksi Obat dan Vaksin oleh Pusvetma.
4. Pengujian dan sertifikasi obat hewan dalam rangka penjaminan mutu obat hewan yang beredar.
5. Pengawasan lalu lintas hewan dan bahan asal hewan dan penerapan *biosecurity*.
6. Pengawasan Obat Hewan.
7. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sdm, peningkatan koordinasi dan fasilitasi Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner di Puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya.
8. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan dan kapasitas Laboratorium Veteriner.

Sasaran Program 6 (SP6) TERKENDALINYA KASUS ZONOSIS PADA MANUSIA

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat karena merupakan rantai penghubung antara bidang kesehatan hewan dan kesehatan manusia yang berkaitan dengan pengobatan, pengendalian dan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui hewan (*zoonosis*) serta penyakit yang ditularkan melalui pangan (*foodborne diseases*), dalam hal ini pangan yang berasal dari hewan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Kesehatan Masyarakat Veteriner didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

SP6. IKU8	
Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	
Target 122 kasus	Realisasi 67 kasus
% Capaian 145,10%	



Cara perhitungan capaian indikator jumlah maksimal kasus *zoonosis* yang terjadi penularan kepada manusia adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Hasil perhitungan capaian indikator jumlah maksimal kasus *zoonosis* yang terjadi penularan kepada manusia dapat dilihat pada tabel 37

Tabel 38. Capaian Indikator Jumlah Maksimal Kasus *Zoonosis* yang Terjadi Penularan kepada Manusia

Target dan Realisasi IKSP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target Thn 2020	% Realisasi th 2020 thd 2019	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (Jumlah)	127	122	120	118	116	114	137,70	137,70	133,33
Realisasi IKSP (Jumlah)	122	76	-	-	-	-			

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Pada tabel 37 dapat dilihat bahwa jumlah kasus *zoonosis* yang dilaporkan sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 76 kasus terdiri dari *Rabies* sebanyak 40 kasus dan *Anthrax* sebanyak 36 kasus. Realisasi pengendalian kasus *zoonosis* pada tahun 2020 sebanyak 76 kasus atau mencapai 137,70% dari target 122 kasus, dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya:

Pada Tabel 37 dapat dilihat bahwa jumlah kasus *zoonosis* yang dilaporkan tahun 2020 sebanyak 76 kasus, dengan demikian apabila dibandingkan dengan tahun 2019 (122 kasus) jumlah kasus pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 46 kasus atau 37,70%. Realisasi pengendalian kasus *zoonosis* pada tahun 2020 sebanyak 76 kasus atau mencapai 137,70% dari target tahun sebelumnya sebanyak 122 kasus, dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Data Jumlah Maksimal Kasus *Zoonosis* Tahun 2014-2020 dapat dilihat pada Grafik 12.



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020

Grafik 13. Jumlah Maksimal Kasus Zoonosis yang Terjadi Penularan Kepada Manusia Tahun 2016-2020



Jumlah kasus *Rabies* yang dilaporkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 13,00% dibandingkan tahun 2016, dan mengalami kenaikan sebesar 35,44% pada tahun 2018. Jumlah kasus *Rabies* tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 62,62% dibandingkan tahun 2019. Data jumlah kasus *Rabies* tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39. Jumlah Kasus *Rabies*, *AI* dan *Anthrax* Tahun 2019 - 2020

No	Provinsi	2019			2020		
		<i>Rabies</i>	<i>Avian Influenza</i>	<i>Anthrax</i>	<i>Rabies</i>	<i>Avian Influenza</i>	<i>Anthrax</i>
1	Aceh	0	0	0	0	0	0
2	Riau	1	0	0	4	0	0
3	Jambi	8	0	0	0	0	0
4	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
5	Sumatera Utara	11	0	0	1	0	0
6	Sumatera Barat	0	0	0	2	0	0
7	Sumatera Selatan	0	0	0	2	0	0
8	Lampung	0	0	0	1	0	0
9	Banten	0	0	0	0	0	0
10	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0
11	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0
12	Bali	4	0	0	2	0	1
13	NTT	14	0	0	5	0	0
14	Sulawesi Barat	1	0	2	0	0	8
15	Sulawesi Utara	15	0	0	7	0	0
16	Sulawesi Tengah	8	0	0	1	0	0
17	Sulawesi Selatan	12	0	0	4	0	0
18	Sulawesi Tenggara	1	0	7	0	0	0
19	Gorontalo	3	0	0	1	0	0
20	Kalimantan Tengah	0	0	3	0	0	24
21	Kalimantan Barat	14	0	0	2	0	0
22	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
23	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
25	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
26	Maluku	2	0	0	2	0	0
27	NTB	13	0	0	6	0	0



No	Provinsi	2019			2020		
		Rabies	Avian Influenza	Anthrax	Rabies	Avian Influenza	Anthrax
28	DIY	0	0	0	0	0	0
29	Kalimantan Timur	0	0	3	0	0	3
Sub Total		107	0	15	40	0	36
Total		122			76		

Sumber : Kementerian Kesehatan, 2020

Jumlah kasus *Anthrax* tahun 2020 sebanyak 36 kasus dengan rincian 24 kasus terjadi Provinsi Gorontalo, 8 kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 3 kasus di Provinsi DIY, dan 1 kasus di Provinsi Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah kasus *Anthrax* di Provinsi Gorontalo meningkat sebesar 700% atau 21 kasus, sedangkan jumlah kasus *Anthrax* di Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat sebesar 300% atau 6 kasus. Rincian kasus selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 38.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah:

Pada tabel 37 dapat dilihat dari capaian kinerja tahun 2020 berhasil mencapai sebesar 133,33% dari target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2024 yang diharapkan terjadi penurunan kasus menjadi 144 kasus.

d. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan pencegahan dan pengendalian *zoonosis* adalah menurunnya kasus *zoonosis*, khususnya penyakit *AI*, *Rabies* dan *Anthrax*. Jumlah maksimal kasus penularan *zoonosis* dari hewan ke manusia pada 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 40. Data Kasus Zoonosis Tahun 2016-2020

Kasus	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rabies	91	79	107	107	40
AI	0	2	0	0	0
Antraks	52	47	4	15	36
Jumlah	143	128	111	122	76

Sumber : Kementerian Kesehatan 2020

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Hewan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis khususnya Penyakit *zoonosis* antara lain:



- a. Membuat Surat Edaran kewaspadaan PHM dan penyakit zoonosis kepada Dinas yang membidangi fungsi PKH dan instansi terkait lainnya.
- b. Mengalokasikan alokasi anggaran pengendalian PHM dan penyakit zoonosis khususnya Rabies, Antraks, Brucellosis, Avian Influenza dan Hog Cholera (RABAH) melalui dana TP 2020 di 34 provinsi tertular, endemis dan terancam.
- c. Melaksanakan koordinasi dan melaksanakan sosialisasi/KIE kepada petugas, peternak dan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan PHM dan penyakit zoonosis baik secara langsung maupun *daring*/Virtual (situasi pandemic COVID)
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Karantina Pertanian terkait pengawasan lalulintas antar pulau dan antar area untuk mencegah penyebaran PHM dan penyakit zoonosis
- e. Melaksanakan bimtek pengendalian PHM dan penyakit zoonosis di daerah wabah maupun di daerah tertular baik secara langsung maupun secara virtual.
- f. Menyusun dan/atau mengupdate pedoman pengendalian PHM dan penyakit Zoonosis
- g. Mendistribusikan bahan sosialisasi (buku, leaflet, brosur, banner, poster) ke daerah.
- h. Memberikan bantuan vaksin, obat dan sarana pendukung serta bahan sosialisasi pada saat terjadi wabah (*outbreak*) PHM dan penyakit Zoonosis
- i. Melaksanakan pembebasan PHM dan penyakit zoonosis berbasis Pulau, zona maupun kompartemen.
- j. Melaksanakan koordinasi lintas kementerian (Kemenkes, KLHK) dalam pengendalian penyakit zoonosis dalam kerangka satu Kesehatan (*One Health*).
- k. Bersama dengan lintas kementerian (kemenko PMK, Kemenkes dan KLHK) melakukan pelaporan kasus penyakit zoonosis dengan aplikasi Sistem Informasi Zoonosis dan EID (SIZE) sehingga penanganan penyakit zoonosis dapat secara terpadu dilaksanakan

Namun demikian, terdapat faktor risiko yang berperan dalam mendukung dan munculnya penyakit rabies, diantaranya:

- 1) Cakupan vaksinasi yang masih rendah, vaksinasi anjing secara *massal* dan serentak merupakan kebijakan yang dipakai dalam pengendalian *Rabies* di Indonesia, namun diperlemah oleh adanya tantangan *turnover* populasi, kepemilikan anjing yang tidak bertanggung jawab seperti menolak pemberian vaksinasi pada anjing, membuang anak anjing atau anjing dewasa karena tidak ingin memeliharanya akan mengakibatkan menurunnya cakupan vaksinasi;
- 2) Kondisi geografis di beberapa wilayah Indonesia yang sulit dijangkau, mengakibatkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai *Rabies* serta cakupan vaksinasi menjadi rendah, karena itu penyampaian KIE pada desa-



- desa target, dengan akses yang sulit dijangkau serta vaksinasi di desa tersebut akan meningkatkan cakupan vaksinasi;
- 3) Tingginya lalu-lintas HPR dari pulau tertular ke pulau bebas *Rabies*, jumlah pelabuhan informal yang semakin banyak serta tidak adanya pos karantina hewan disepanjang garis pantai mengakibatkan semakin tingginya probabilitas introduksi *Rabies* ke pulau bebas *Rabies*;
 - 4) Banyaknya anjing yang tidak berpemilik/liar sehingga menyulitkan pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Perlu dipertimbangkan adanya kebijakan khusus terkait pengendalian rabies pada anjing tak berpemilik; serta
 - 5) Tidak adanya data populasi anjing yang valid, sehingga menyulitkan penganggaran program vaksinasi *Rabies*.

Adapun faktor risiko yang memungkinkan kejadian kasus *Anthrax* diantaranya faktor musim (terjadi pada musim hujan), sistem pemeliharaan ternak yang dilepas, ketidaktahuan masyarakat tentang *Anthrax* (masih melakukan pemotongan terhadap sapi yang terinfeksi *Anthrax*). Perlu adanya peningkatan pemahaman kepada masyarakat melalui KIE tentang pentingnya bahaya *Anthrax* dalam rangka mencegah penularan *Anthrax* dari hewan kepada manusia.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian *zoonosis*, maka telah didukung oleh sumber daya dari kegiatan: 1). Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH; dan 2). Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk. Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung jumlah maksimal kasus *zoonosis* yang terjadi penularan kepada manusia didapatkan hasil nilai efisiensi sebesar **50,70%** atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya. Kegiatan pendukung IKU ini dapat dilihat pada Tabel 40 dan Hasil perhitungan efisiensi dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 41. Kegiatan Pendukung IKU 8 Tahun 2020

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Rp. Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	3.647	3.556	97,51	130	168	129,23
2	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Dokumen	5.775	5.755	99,66	6	6	100,00

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2020

f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian *zoonosis*, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan *Zoonosis* Prioritas, dimana tiga diantaranya merupakan prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan



dan Kementerian Pertanian, meliputi penyakit *Avian Influenza*, *Rabies* dan *Anthrax*. Strategi Pencegahan Penularan *Zoonosis* dilakukan melalui koordinasi antar kelembagaan terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan penularan *zoonosis*, dengan memperkuat strategi ini melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan penularan *zoonosis* dari hewan ke manusia dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun penguatan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli *zoonosis*. Dengan demikian, Ditjen PKH berperan penting dalam mengkomunikasikan pencegahan *zoonosis* baik kepada pemangku kepentingan terkait maupun kepada masyarakat.
2. Pencegahan penularan *zoonosis* dari produk hewan ke manusia dilakukan melalui penerapan strategi penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal melalui pemeriksaan *antemortem* dan *post-mortem* di RPH. Selain itu pemeriksaan *antemortem* dan *post-mortem* memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari kegiatan surveilans pengendalian penyakit hewan, khususnya *zoonosis*.

Sasaran Program 7 (SP7)

TERWUJUDNYA BIROKRASI DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen untuk terus mendorong semua Unit Kerja maupun Satuan Kerja dibawahnya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. Untuk itu, Ditjen PKH berkomitmen untuk menuju Zona Integritas (ZI). ZI merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona Integritas sebagai motivasi membangun dan mengimplementasikan Program Reformasi Birokrasi secara baik dan benar, sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi layanan prima yang transparan dan akuntabel, serta bebas dari segala bentuk tindak korupsi.

Ditjen PKH berkomitmen untuk membangun Zona Integritas (ZI) di seluruh unit kerja untuk Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Satker (Satuan Kerja) lingkup Ditjen



PKH diwajibkan untuk bisa mengakses informasi untuk berkinerja secara benar dan tepat sesuai Standar Operasional Prosedur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas korupsi.

SP7. IKU9	
Nilai PMPRB (Pengungkit) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan)	
Target 32,30	Realisasi 32,30
% Capaian 100%	

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu, monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan. Pengukuran Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementan dan Setjen Kementan dengan menggunakan metode pengukuran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah menetapkan kebijakan PMPRB yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*), yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Penilaian tersebut mencakup: (1) Penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) Tingkat kedalaman penilaian/evaluasi sampai dengan ke unit kerja, serta (3) Perubahan terhadap sistem daring dan petunjuk teknisnya.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program. Komponen pengungkit yang dinilai terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek Pemenuhan, hasil antara area perubahan, dan aspek reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi,



yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

Tabel 42. Realisasi Nilai PMPRB Ditjen PKH tahun 2020 terhadap Target Jangka Menengah

Target dan Realisasi IKSP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target Thn 2020	% Realisasi th 2020 thd 2019	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target (Nilai)	-	32,30	32,75	33,50	34,00	34,5	100,00	146,75	93,62
Realisasi (Nilai)	22,01	32,30	-	-	-	-			

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Pada tabel 41 dapat dilihat bahwa capaian Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020 adalah 32,3 atau 100% dengan kategori **Berhasil** dari target 2020 sebesar 32,3.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya:

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja barupada Renstra 2020-2024, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target atau realisasi tahun sebelumnya. Namun demikian pada tahun 2019 sudah ada hasil penilaian PMPRB sebesar 22,01, sehingga apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 46,75%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah:

Pada tabel 41 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 berhasil mencapai sebesar 93,63% apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2024 yaitu dengan nilai sebesar 34,50.

d. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Keberhasilan pencapaian kinerja reformasi birokrasi di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat dari kenaikan nilai PMPRB yang setiap tahunnya selalu meningkat. Ditjen PKH juga telah menunjuk agen-agen perubahan di masing-masing unit kerja untuk mendukung perbaikan-perbaikan di 8 area perubahan. Keberhasilan ini dapat terwujud karena adanya perbaikan-perbaikan di 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

(1) Manajemen Perubahan

Keteladanan ASN Ditjen PKH pada masa pandemi *Covid-19*, sikap positif, optimistis dan pantang menyerah dalam tugas dan pelayanan.

(2) Deregulasi Kebijakan (Penataan Peraturan Perundang-undangan)

Penyederhanaan Peraturan Perundang-Undangan dengan melakukan perubahan pada 3 (tiga) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), yaitu (1)



Merevisi Permentan 127/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman; (2) Mencabut Permentan 57/2015 tentang Bahan Pakan Asal Tumbuhan; (3) Mencabut Permentan 13/2019 tentang Bahan Pakan Asal Hewan menjadi Permentan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pakan, Bahan Pakan dan Benih Tanaman Pakan Ternak (*On Progress*).

(3) Penataan dan Penguatan Organisasi

Pengaturan organisasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, yaitu Satker Ditjen PKH yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan yang sebelumnya ada 2, pada tahun 2020 bertambah menjadi 3, yaitu: Pusvetma, BBIB Singosari dan BIB Lembang. Selain itu pada tahun 2020 telah dilakukan implementasi penyetaraan jabatan administrasi dan pengawas menjadi jabatan fungsional yang telah dilantik pada tanggal 30 Januari 2020. Transformasi jabatan struktural kedalam jabatan fungsional sebagai langkah untuk memangkas rantai birokrasi yang menghambat peningkatan pelayanan publik, dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, harus tuntas pada pertengahan tahun 2020.

(4) Penataan Tata Laksana

Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*; Meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik; Meningkatkan kualitas pelayanan; Meningkatkan kepuasan masyarakat.

(5) Sistem Manajemen SDM Aparatur

Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM yang berbasis Merit; Meningkatkan kemampuan mengelola SDM untuk mewujudkan SDM yang kompetitif; Meningkatkan kemampuan penerapan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM ASN Meningkatkan profesionalisme pegawai.

(6) Akuntabilitas

Nilai kinerja Sistem Akuntabilitas Ditjen PKH (SAKIP) Ditjen PKH setiap tahun mengalami peningkatan, dari 81,95 pada tahun 2018 naik menjadi 83,30 pada tahun 2019.

(7) Pengawasan

Sejak tahun 2009 hingga sekarang, Ditjen PKH telah berkomitmen melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkat organisasi dan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan agar tujuan pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai optimal, dengan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien, mewujudkan laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu indikator bahwa SPIP itu berjalan adalah dengan minimnya temuan temuan dalam audit baik internal maupun eksternal.

(8) Pelayanan Publik

Ditjen PKH selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan



dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima (terbaik) bagi masyarakat, yang mempunyai kepentingan pada organisasi Ditjen PKH sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan. Harapan masyarakat terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan *reliable* dalam menjalankan fungsi dan perannya. Harapan masyarakat yang besar dapat merubah paradigma dan tatanan fundamental pada sistem Pemerintahan.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Sebagai dukungan terhadap meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, agar kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Ditjen PKH telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 63,09 milyar pada tahun 2020 pada kegiatan: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Layanan Dukungan Manajemen Satker. Berdasarkan analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, nilai efisiensi yang didapatkan adalah sebesar **50,10%** atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya. Kegiatan pendukung IKU dapat dilihat pada Tabel 42 dan rincingan perhitungan efisiensi dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 43. Kegiatan Pendukung IKU 9 Tahun 2020

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Rp. Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	40.228	39.546	98,31	1	1	100,00
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	22.865	21.459	93,85	1	1	100,00

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2020

f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi. Pelaksanaan reformasi yang dilaksanakan pada tahun 2020 mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, diantaranya:

1. Menerapkan SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu terintegrasi SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyipuan. Salah satu



bentuk komitmen Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang pelayanan prima serta bersih dan bebas dari KKN adalah dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016. Diharapkan dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan (SMMAP) ini, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta proaktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan suap. Ruang lingkup penerapan SNI ISO Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a) Sekretariat Ditjen PKH : 1) Kepegawaian; 2) Keuangan (PNBP); dan 3) Pengadaan; 4) Layanan Rekomendasi;
- b) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak : 1) Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit; 2) Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi;
- c) Direktorat Pakan : 1) Pengeluaran dan Pemasukan BPAT (Bahan Pakan Asal Tumbuhan); 2) Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit HPT Hijauan Pakan Ternak) 3) Penerbitan NPP (Nomor Pendaftaran Pakan);
- d) Direktorat Keswan : 1) Izin Pemasukan BPAH (Bahan Pangan Asal Hewan); 2). SK & Sertifikat Izin Usaha Obat Hewan;
- e) Direktorat Kesmavet : Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya; dan
- f) Direktorat PPHNak : 1) Pemanfaatan Data 2) Akselerasi Ekspor

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sejak tahun 2018 telah melakukan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 Terintegrasi, dan telah mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan SMMAP SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 akan dilakukan surveilans berupa Audit Eksternal setiap tahun sekali.

2. Sejak tahun 2009 hingga sekarang, Ditjen PKH telah berkomitmen melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkat organisasi dan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan agar tujuan pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai optimal, dengan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien, mewujudkan laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu indikator bahwa SPIP itu berjalan adalah dengan minimnya temuan temuan dalam audit baik internal maupun eksternal.

Tim Satlak SPIP Pusat harus mampu mendorong Satker UPT maupun Dinas Provinsi melalui implementasi SPIP yang optimal untuk memperoleh unit kerja berpredikat WBK, WBBM menuju zona ZI (Zona Integritas).

Hasil Penilaian Maturitas SPIP lingkup Kementan yang dilaksanakan oleh BPKP RI tahun 2019, level maturitas SPIP Ditjen PKH masuk dalam level 3 dengan nilai



3,392, yaitu sudah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Sedangkan penilaian dari Inspektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diperoleh angka 3,876.

3. Ditjen PKH telah menerapkan dan terus memperbaiki Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Ditjen PKH setiap tahun mengalami peningkatan, dari 81,95 pada tahun 2018 naik menjadi 83,30 pada tahun 2019. Adapun beberapa hal yang dilakukan untuk peningkatan nilai SAKIP adalah: a) Melakukan perbaikan pada Perencanaan Kinerja; b) Memperbaiki Pengukuran Kinerja; c) Melakukan perbaikan komponen Pelaporan Kinerja dengan menyajikan data perbandingan realisasi kinerja kumulatif sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah untuk seluruh IKU; d) Melakukan perbaikan komponen Evaluasi Internal.

SP7. IKU10	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 3,37	Realisasi 3,48
% Capaian 103,26%	

Pelayanan Publik (*Public Service*) oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima (terbaik) bagi masyarakat, yang mempunyai kepentingan pada organisasi Ditjen PKH sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Kualitas layanan publik instansi pemerintah diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 dimaksudkan agar setiap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menyusun IKM. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan instansi pemerintahan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada Tahun 2020, Ditjen PKH menargetkan nilai IKM sebesar 3,37 skala Likert.

Metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen PKH mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian. Penyusunan



Indeks Kepuasan Masyarakat diawali dengan penyebaran kuesioner ke Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen PKH. Kuesioner ini digunakan sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Sebagai pedoman penilaian telah ditetapkan Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 44. Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja UKPP (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Bagian Umum, 2020

Adapun 8 (delapan) unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang dinilai pada tahun 2020 yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan; biaya/tarif; produk pelayanan; kompetensi pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan keluhan, serta sarana dan prasarana. Secara rinci, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik Ditjen PKH dapat dilihat pada tabel 43.

Tabel 45. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH

Target dan Realisasi IKSP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target Thn 2020	% Realisasi th 2020 thd 2019	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (Skala Likert)	3,3	3,37	3,44	3,51	3,6	3,6	103,26	102,35	97,21
Realisasi IKSP (Skala Likert)	3,40	3,48	-	-	-	-			

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Pada tabel 43 diatas dapat dilihat bahwa capaian IKM atas layanan publik Ditjen PKH pada tahun 2020 tercapai dengan nilai 3,47 Skala Likert atau 102,97% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,37 Skala Likert. Dengan tercapainya nilai ini maka indikator kinerja IKM atas layanan publik Ditjen PKH masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”. Hasil nilai unsur pelayanan SKM tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 44.



Tabel 46. Nilai Unsur Pelayanan SKM Tahun 2020

NILAI UNSUR PELAYANAN SKM TAHUN 2020					
No	UNSUR PELAYANAN	PERIODE I		PERIODE II	
		NRR Unsur	∑ Nilai	NRR Unsur	∑ Nilai
1.	Persyaratan Pelayanan	3,36	77,3	3,51	80,80
2.	Prosedur Pelayanan	3,52	80,90	3,52	80,90
3.	Waktu Pelayanan	3,36	77,20	3,41	78,50
4.	Biaya/tarif	3,53	81,20	3,56	81,80
5.	Produk Layanan	3,50	80,50	3,50	80,50
6.	Kompetensi Pelaksana	3,56	82,00	3,52	80,90
7.	Perilaku Pelaksana	3,64	83,80	3,57	82,10
8.	Penanganan pengaduan, saran, dan keluhan	3,63	83,50	3,54	81,50
9.	Sarana dan Prasarana	3,57	82,00	3,56	81,90

Sumber: Bagian Umum Ditjen PKH

Berdasarkan penilaian indeks kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan kepuasan masyarakat atas layanan publik Ditjen PKH dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Pengolahan Data SKM Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan Periode I Tahun 2020 Nilai IKM 3,47 Nilai Konversi SKM 86, 71 dengan Nilai Mutu Pelayanan “B” BAIK.
2. Nilai Tertinggi SKM Pada Periode I Tahun 2020 Pada BBVet Denpasar Dengan Nilai 3,86 dengan Nilai Konversi SKM 96,64 Mutu Pelayanan “A” SANGAT BAIK.
3. Hasil Pengolahan Data SKM Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan Periode II Tahun 2019 Nilai SKM 3,49 Nilai Konversi SKM 87, 20 Dengan Nilai Mutu Pelayanan “B” BAIK. Unsur penilaian terendah ada pada Waktu Pelayanan sedangkan unsur penilaian tertinggi adalah pada Perilaku Pelaksanaan.
4. Nilai Tertinggi SKM Pada Periode II Tahun 2020 Pada BBVet Denpasar Dengan Nilai 3,93 Dengan Nilai Konversi SKM 98, 31 Mutu Pelayanan “A” SANGAT BAIK.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya:

Pada tabel 43 dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi capaian kinerja nilai IKM tahun 2020 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 adalah sebesar 103,26% atau mengalami peningkatan sebesar 2,35%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah

Pada tabel 43 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 berhasil mencapai sebesar 97,21% dari target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2024, yaitu sebesar 3,6.



d. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Keberhasilan peningkatan nilai IKM Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disebabkan adanya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk semua layanan publik di Ditjen PKH. Hal ini sebagai upaya Ditjen PKH untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) selalu diupayakan cepat, tepat, akurat, akuntabel, dan aman.

Untuk mempermudah dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta transparan terhadap pelaku usaha, pelayanan rekomendasi/perizinan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah dilakukan secara online sejak tahun 2017 dan saat ini sudah ada 23 jenis layanan. Dua puluh (20) jenis layanan diantaranya melalui sistem yang dibangun oleh Ditjen PKH, yaitu melalui aplikasi SIMREK PKH dan 3 jenis layanan diantaranya melalui SIMPEL KEMANTAN. Pelayanan secara online ini merupakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan *e-government* yang berdampak pada integrasi sistem, sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik dari keuangan yang baik.

Sejak 1 Maret 2018, dokumen perizinan (rekomendasi) sudah dapat dicetak langsung (*paperless*) oleh pelaku usaha melalui aplikasi SIMREK PKH. Kini, pelaku usaha bisa mendapatkan izin rekomendasi yang dicetak langsung (*paperless*) melalui aplikasi Sistem Informasi Rekomendasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (SIMREK PKH) Kementerian Pertanian. Layanan di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, diproses secara online melalui sistem yang dibangun di aplikasi Simrek PKH melalui link <http://simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id/>.

Aplikasi SIMREK PKH adalah aplikasi untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan/rekomendasi pemasukan dan pengeluaran di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penerapan sistem pelayanan perizinan dalam era digital merupakan bentuk implementasi Peraturan Menteri Pertanian No.41/Permentan/TU.120/11/2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik.

Tujuan dikembangkannya sistem pelaporan ini adalah untuk dapat memberikan informasi data realisasi pemasukan, penyimpanan dan pemutasian dengan cepat dan akurat. Data realisasi ekspor impor yang valid dari rekomendasi yang telah diterbitkan merupakan bahan untuk pengambilan kebijakan. Pemerintah mendorong dan berupaya dalam memberikan prioritas kepada pelaku usaha bidang ekspor untuk kemudahan dan kecepatan proses permohonan rekomendasinya.



Selain itu, saat ini semua unit pelayanan di lingkup Ditjen PKH baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib menyusun indeks kepuasan masyarakat secara periodik di lingkungan masing-masing dalam upaya peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Unit Pelayanan Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai tahun 2018 sudah menerapkan IKM *online* melalui portal *website* masing-masing unit kerja, yang lebih memudahkan para pengguna layanan untuk mengakses IKM secara *realtime* dan dimanapun mereka berada. Peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan pada unsur-unsur yang mempunyai nilai dibawah rata-rata mutu pelayanan, meskipun nilai yang dicapai telah masuk dalam kategori penilaian baik. Hasil perhitungan nilai IKM layanan publik lingkup Ditjen PKH dapat dilihat pada lampiran 10.

Beberapa unsur pelayanan yang dinilai dari masing-masing unit kerja untuk mengetahui kualitas pelayanannya yaitu: (1) persyaratan pelayanan; (2) prosedur pelayanan; (3) waktu pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk layanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan, saran dan keluhan; (9) sarana dan prasarana. Unsur penilaian terendah ada pada Waktu Pelayanan. sedangkan unsur penilaian tertinggi adalah pada Perilaku Pelaksanaan. Oleh karena itu, upaya tindaklanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai IKM pada layanan publik Ditjen PKH adalah:

- 1) Pelayanan sudah *online*. Harapannya Ditjen PKH dapat memberikan pelayanan lebih tranparan, efisien akuntabel dan adil, supaya tidak ada lagi interaksi langsung antara pemohon dan petugas.
- 2) Meningkatkan kecepatan waktu pelayanan masing-masing komoditas.
- 3) Menyempurnakan aplikasi terkait pelayanan publik

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditjen PKH mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap meningkatnya kualitas layanan publik dalam rangka penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Ditjen PKH. Sumber daya untuk mendukung capaian IKU ini terdapat pada kegiatan: Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Layanan Perkantoran. Berdasarkan analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, nilai efisiensi yang didapatkan adalah sebesar **50,07%** atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya. Kegiatan pendukung IKU dapat dilihat pada Tabel 45 dan rincingan perhitungan efisiensi dapat dilihat pada Lampiran 5.



Tabel 47. Kegiatan Pendukung IKU 10 Tahun 2020

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Rp. Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	91.526	90.446	98,82	1	1	100,00
2	Layanan Perkantoran	Layanan	220.635	214.717	97,32	1	1	100,00

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2020

f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh dua syarat utama, yaitu komitmen para pimpinan atau pejabat pelayanan publik di bidang pertanian dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kemajuan teknologi.

Pelayanan Publik Ditjen PKH pada 2020 meningkat kualitasnya, diantaranya: (1) Pelayanan Ditjen PKH yang sudah online diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih transparan, efisien akuntabel, dan adil agar tidak ada lagi interaksi langsung antara pemohon dan petugas; (2) Meningkatkan kecepatan waktu pelayanan masing-masing komoditas; (3) Menyempurnakan aplikasi/*website* untuk pemberitahuan rekomendasi yang sudah selesai; (4) Meningkatkan prasarana dan sarana terkait pelayanan terhadap masyarakat.

Adapun rekomendasi yang perlu diperhatikan adalah agar para pengguna jasa layanan publik dapat dengan sukarela menjadi responden dan mengisi SKM. Terhadap unit adanya pelayanan yang telah terintegrasi atau lhc dengan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP) Kementerian Pertanian. Maka dari itu disarankan oleh Kepala Bagian Organisasi agar PWPP segera menyusun Standar Pelayanan dengan berkoordinasi dengan masing-masing unit pelayanan publik.

Untuk memudahkan *tracking* responden dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dari pelayanan publik yang terintegrasi antara unit pelayanan publik dan PVTTP maka sebaiknya menggunakan program aplikasi yang memudahkan responden dalam melakukan pengisian SKIVI. Responden diharapkan dapat langsung mengisi sekaligus layanan publik dalam satu kali buka aplikasi SKM (contohnya perizinan rekomendasi karkas di PPVTP dan Ditjen PKH). Harapannya dengan pengisian tersebut dapat langsung terlihat nilai unsur masing-masing unit pelayanan publik yang terintegrasi.



Sasaran Program 8 (SP8)

TERKELOLANYA ANGGARAN DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN YANG AKUNTABEL DAN BERKUALITAS

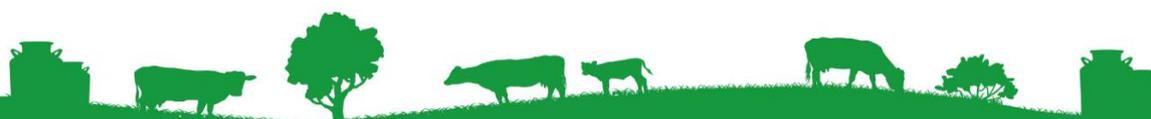
Untuk mengukur efisiensi dan manfaat penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing-masing instansi pemerintah, maka pada tahun 2011 Kementerian Keuangan telah membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Penganggaran Kementerian Keuangan yang diamanatkan PMK 249/PMK.02/2011 untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi agar lebih efektif dan efisien. Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran berbasis web yang pada tahun 2015 berubah nama menjadi Aplikasi SMART (Sistem Monitoring Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan diharapkan mampu menggantikan proses monev sebelum PMK 249/PMK.02/2011 yang masih dilakukan secara manual menjadi *user friendly*, paper less, real time, dan akurat. Dengan ditetapkannya PMK 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L pada tanggal 29 Desember 2017 sebagai pengganti PMK 249/PMK.02/2011, maka aplikasi SMART Kementerian Keuangan perlu melakukan penyesuaian dan pengembangan yang cukup signifikan.

SP8. IKU11	
Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Target 88,25	Realisasi 91,71
% Capaian 103,92%	

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi Capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH secara rinci dapat dilihat pada tabel 46.

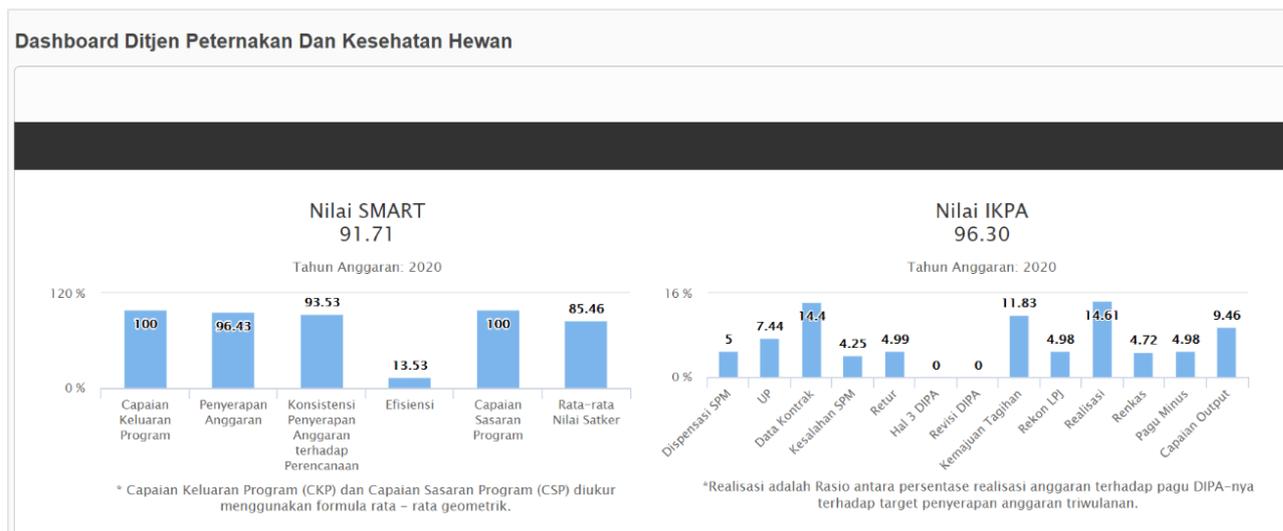
Tabel 48. Realisasi Capaian Nilai Kinerja (NK) Anggaran Ditjen PKH

Target dan Realisasi IKSP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target Thn 2020	% Realisasi th 2020 thd 2019	% Realisasi thd Target Jangka Menengah
Target IKSP (Nilai)	85,0	88,25	88,68	88,93	90,32	90,85	103,38	103,88	100,42
Realisasi IKSP (Nilai)	87,8	91,23	-	-	-	-			



a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Pada tabel 46 dapat dilihat bahwa realisasi capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan yang dipantau melalui aplikasi SMART per tanggal 8 Februari 2021 adalah sebesar 91,71 nilai atau 103,92% dengan kategori nilai **"Sangat Berhasil"**. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PKH Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Capaian Kinerja Anggaran Ditjen PKH Tahun 2020

Sumber: Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017 (SMART), 2020

Adapun rincian realisasi indikator capaian yang dinilai sebagai berikut:

1. Capaian sasaran program dengan nilai sebesar 100%.
2. Capaian keluaran program dengan nilai sebesar 100%.
3. Capaian Penyerapan anggaran dengan nilai sebesar 96,43%.
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan nilai sebesar 93,52%.
5. Efisiensi 13,53 (dengan range nilai batas maksimal 20% dan batas minimal - 20%).
6. Rata-rata Nilai Kinerja Satker 85,46%.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya:

Pada tabel 46 dapat dilihat bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PKH pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan realisasi NKA tahun 2019 mencapai 104,43%. Pada tahun 2020 partisipasi petugas Monev masing-masing Satker lingkup Ditjen PKH sudah meningkat dalam mengisi data aplikasi SMART yang mengacu PMK 214/2017.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah

Pada tabel 46 dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Anggaran Ditjen PKH tahun 2020 telah melebihi target jangka menengah yaitu mencapai 100,95% dari target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2024 sebesar 90,85%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Pada tabel 46 dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Anggaran Ditjen PKH tahun 2020 sebesar 91,71%, sehingga melebihi 0,48% dari target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Pertanian pada tahun 2020, yaitu sebesar 91,23%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya :

- 1) Masing-masing Satker telah membentuk Tim *Person in Charge* (PIC) yang menangani aplikasi monitoring dan evaluasi (Monev).
- 2) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang menangani monitoring dan evaluasi (Monev) masing-masing Satker karena telah dilakukan (dua) kali Workshop dan pendampingan.
- 3) Peran aktif dari Tim Monev masing-masing satker yang meningkat dalam melakukan penginputan data capaian keluaran program/kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian Rata-rata Nilai Kinerja Satker sebesar 84,51%.
- 4) Koordinasi yang intensif antara petugas Monev pusat dengan Petugas Monev unit kerja UPT dan Satker dinas Provinsi, baik melalui komunikasi WA *group* maupun kunjungan langsung ke Satker untuk melakukan bimbingan teknis jika ada yang mengalami kendala.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKH adalah

1. Adanya revisi DIPA karena *refocusing* anggaran untuk kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* sebanyak 5 kali berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan adanya penyesuaian target per output kegiatan.
2. Beberapa kegiatan yang mengalami refocusing pada triwulan III targetnya menjadi berkurang atau bahkan ada yang dihilangkan, sehingga berpengaruh terhadap target volume keluaran atau target Indikator Keluaran Kegiatan (IKK). Namun karena sebelumnya sudah dilaksanakan persiapan pelaksanaan (koordinasi, CP/CL, pertemuan dalam rangka persiapan dan lain-lain), dan sudah



menggunakan anggaran, maka untuk target tidak bisa dihilangkan. Hal ini tentunya berpengaruh pada capaian realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) di Satker.

- Sasaran program dan keluaran program Ditjen PKH yang tercantum dalam aplikasi SMART (Monev Kemenkeu) masih menggunakan Sasaran program dan keluaran program yang tercantum pada Renstra 2015-2019. Ditjen PKH sudah mengajukan revisi untuk menyesuaikan dengan Renstra 2020-2024 melalui SatuDJA, namun ditolak oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu.

Rekomendasi untuk perbaikan target output Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ke depan yaitu: Satuan capaian *output* Layanan Dukungan Manajemen hendaknya menggunakan satuan Laporan jika dalam satu tahun anggaran menghendaki target *output* 1 (satu) atau dapat menggunakan satuan Layanan jika dalam satu tahun anggaran menghendaki target *output* 12 (dua belas). Langkah tersebut dilakukan agar tercapai keselarasan antara capaian *output* dengan realisasi anggaran.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Untuk dukungan sumber daya terhadap terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Ditjen PKH, Ditjen PKH telah mengalokasikan anggaran dalam rangka Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Layanan Dukungan Manajemen Satker. Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, didapatkan hasil nilai efisiensi sebesar **50,10%** atau dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya. Secara rinci Kegiatan pendukung IKU dapat dilihat pada Tabel 47 dan Hasil perhitungan efisiensi dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 49. Kegiatan Pendukung IKU 11 Tahun 2020

No	Kegiatan / Output	Satuan	KEUANGAN (Dalam Rp. Juta)			FISIK		
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	40.228	39.546	98,31	1	1	100,00
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	22.865	21.459	93,85	1	1	100,00

Sumber data: SMART Kemenkeu, 2020

g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PKH pada tahun 2020 melebihi dari target yang telah ditetapkan karena adanya penguatan dalam tata kelola anggaran yang akuntabel dan transparan. Selain itu, Ditjen PKH berupaya untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja anggaran melalui pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, baik secara *luring* maupun secara



daring. Pertemuan Monev tersebut menghadirkan peserta Tim Monev dari masing-masing Satker baik dari pusat maupun dari Unit Pelaksana Teknis dan Provinsi yang disii dengan bimbingan teknis penginputan data, juga sekaligus dilakukan *workshop* pengentrian data, serta diskusi untuk penyelesaian masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Ditjen PKH, sehingga dari pertemuan ini partisipasi petugas Monev dari masing-masing Satker untuk melakukan pengisian data meningkat.

Tingginya peningkatan capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PKH pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019 merupakan hasil sinergi seluruh Satker lingkup Ditjen PKH, yang dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, proses, metode kerja, sistem pengendalian, dan koordinasi yang didasari oleh kerja profesional, mengikuti aturan serta integritas dan komitmen diri yang kuat.

3.3 Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya yang diraih oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020 diantaranya:

1. Ditjen PKH meraih penghargaan Peringkat I Unit Kerja Informatif Tahun 2020 lingkup Kementerian Pertanian.



Gambar 3. Penghargaan Unit Kerja Informatif Tahun 2020 Lingkup Kementerian Pertanian

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yakni Balai Embrio Ternak (BET) dan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) mendapatkan peringkat I dan III Unit Kerja Informatif Tingkat Kementerian Pertanian Tahun 2020. Selain itu Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari terpilih sebagai Unit Kerja Eselon II dengan Sarana dan Prasarana Informasi Publik Terbaik





Gambar 4. Penghargaan Unit Kerja Informatif Tahun 2020 Lingkup Kementerian Pertanian

3. Pusvetma yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mendapatkan penghargaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).



Gambar 5. Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

4. Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mendapatkan penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II dengan Sarana dan Prasarana IP Terbaik dan penghargaan sebagai UPT berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Pertanian.





Gambar 6. Penghargaan UPT Berpredikat WBBM Nasional

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 sebesar Rp.2,022 triliun. Selama berjalannya tahun anggaran terdapat beberapa perubahan anggaran, sehingga pagu terakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1,299 triliun. Adapun kronologi revisi perubahan pagu anggaran Ditjen PKH pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Revisi pertama merupakan gugur bintang untuk membuka blokir DIPA sebesar Rp. 2.022.297.255.000,- pada tanggal 13 Januari 2020.
- b. Revisi ke dua merupakan perubahan penghematan sebagai tindak berdasarkan Surat Sekjen Nomor B-1307/RC.110/A/04/2020 tentang Perubahan Penghematan Anggaran Kementerian Pertanian TA 2020 tanggal 21 April 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19*. Penghematan sebesar Rp. 802.537.466.000,- menyebabkan perubahan pagu menjadi Rp. 1.219.759.789.000,-.
- c. Revisi yang ke tiga masih merupakan penghematan sebagai bentuk tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI. Penghematan sebesar Rp 66 milyar ini menyebabkan perubahan pagu menjadi Rp. 1.153.013.024.000,-.
- d. Revisi ke empat adalah penambahan pagu ABT sebesar Rp 140.430.000.000,- sehingga pagu total berubah menjadi Rp. 1.239.443.024.000,-.
- e. Revisi ke lima adalah optimalisasi dan penambahan pagu PNBPN sebesar Rp. 3.704.992.000,- sehingga terjadi perubahan pagu total menjadi Rp. 1.297.148.016.000,-.
- f. Revisi ke enam dan ke tujuh merupakan optimalisasi sisa kontraktual dimana tidak menyebabkan perubahan total pagu, sehingga pagu anggaran Ditjen PKH tetap sebesar Rp. 1.297.148.016.000,-.
- g. Revisi ke delapan adalah perubahan anggaran pendapatan dan belanja yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di mana dalam revisi terjadi



penambahan pagu PNBP di 7 satker UPT sebesar Rp. 2.447.262.000,- sehingga pagu total menjadi Rp. 1.299.595.278.000,-

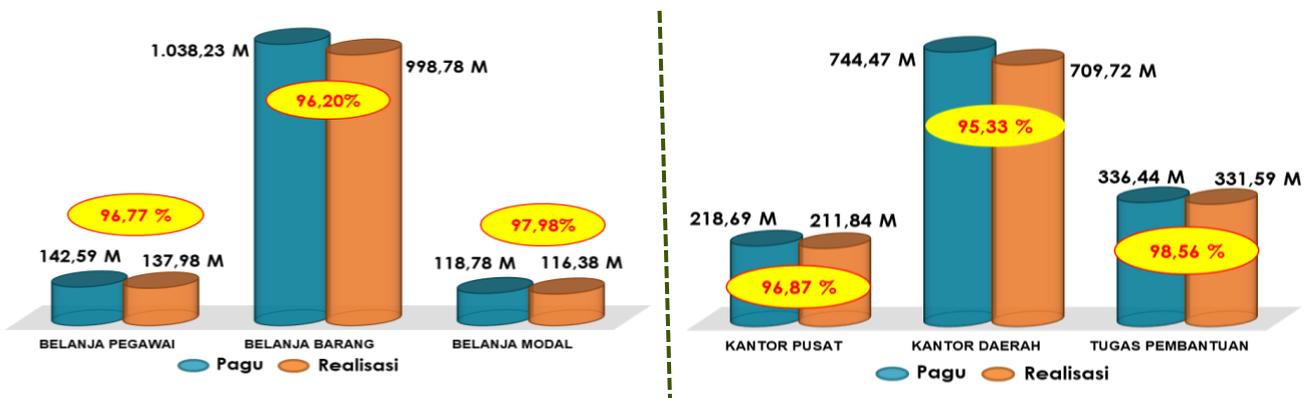
Kronologis revisi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2020 secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 7. Kronologi Perubahan Anggaran Tahun 2020

Dari total anggaran 1,299 triliun, sebesar 16,83% (Rp 218 milyar) anggaran dialokasikan di kantor pusat, sedangkan untuk kantor daerah sebesar 57,28% (Rp. 744 milyar) dan TP Provinsi sebesar 25,89% (Rp. 336 milyar). Anggaran tersebut dialokasikan di 57 satker, terdiri dari 1 kantor pusat, 22 kantor daerah (UPT) dan 34 satker TP Provinsi. Serapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun anggaran 2020 adalah sebesar 96,43% atau Rp.1,253 triliun dari total alokasi anggaran Ditjen PKH Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1,299 triliun.

Realisasi serapan anggaran berdasarkan jenis kewenangan adalah: (i) Satker Pusat sebesar 96,87% atau Rp 211,844 miliar dari anggaran sebesar Rp.218,685 miliar, (ii) Satker UPT sebesar 95,33% atau Rp 709,72 miliar dari anggaran sebesar Rp 744,473 miliar, dan (iii) Tugas Pembantuan Provinsi sebesar 98,56% atau Rp 331,585 miliar dari anggaran sebesar Rp 336,437 miliar.



Sumber: Aplikasi OM-SPAN per 30 Januari 2021

Grafik 14. Realisasi anggaran per Jenis Belanja dan Kewenangan

Realisasi serapan anggaran berdasarkan jenis belanja adalah (i) Belanja Pegawai sebesar 96,77% atau Rp 137,979 miliar,- dari pagu anggaran Rp.142,59 miliar,- (ii) Belanja Barang sebesar 96,20% atau Rp 998,78 dari pagu anggaran Rp 1.038,23 miliar,- (iii) Belanja Modal sebesar 97,98% atau Rp 116,38 miliar,- dari pagu anggaran Rp.118,78 miliar.

Realisasi serapan anggaran berdasarkan kegiatan utama adalah: (i) Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar 94,77% atau Rp 587,029 miliar,- dari pagu anggaran Rp 619,452 miliar,- (ii) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal 98,77% atau Rp 76,140 miliar,- dari pagu anggaran Rp.77,088 miliar,- (iii) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 98,33% atau Rp 168,740 miliar,- dari pagu anggaran Rp 171,602 miliar,- (iv) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) 98,54% atau Rp.29,925 miliar,- dari pagu anggaran Rp 30,369 miliar,- (v) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak 97,34% atau Rp 25,140 miliar,- dari pagu anggaran sebesar Rp 25,828 miliar,- dan (vi) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 97,58% atau Rp 366,168 miliar,- dari pagu anggaran Rp 375,253 miliar.

Tabel 50. Realisasi anggaran per Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak	77.088.165.000	76.140.553.199	98,77
2	1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	171.602.744.000	168.740.124.222	98,33
3	1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	619.452.682.000	587.029.447.082	94,77
4	1786 Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	30.369.127.000	29.925.002.129	98,54
5	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	375.253.827.000	366.168.947.007	97,58
6	5891 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	25.828.733.000	25.140.814.065	97,34
Total		1.299.595.278.000	1.253.144.887.704	96,43



IV PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada masyarakat (publik).

Laporan Kinerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 disusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2020. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 8 (delapan) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program, sebagian besar indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil dan berhasil (sangat berhasil 8 indikator dan berhasil 1 indikator), serta terdapat 2 (dua) indikator yang kurang berhasil. Oleh karena itu, pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dikatakan berhasil.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan, serta segenap jajaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam peningkatan kinerja masing-masing unit kerja. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020.

Keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2020 khususnya perkembangan capaian 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program tersebut juga tidak terlepas dari dukungan seluruh kegiatan yang ada di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, juga dukungan pengendalian internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dari sebelas indikator kinerja, Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** ada 8 (delapan), yaitu: (1) Peningkatan produksi telur; (2) Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan; (3) Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; (4) Jumlah maksimal kasus zoonosis yang



terjadi penularan kepada manusia; (5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (6) Nilai kinerja anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis, serta (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Peternakan. Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** ada 1 (satu) yaitu: (1) Nilai PMPRB (pengungkit) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sedangkan indikator kinerja yang masuk kategori **kurang berhasil** ada 2 (dua), yaitu: (1) Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik) dan (2) Peningkatan produksi susu.

Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020, khususnya pada peningkatan populasi dan produksi ternak, peningkatan volume dan nilai ekspor subsektor peternakan, penurunan impor daging sapi dan susu menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi program yang dilakukan oleh Ditjen PKH, diantaranya:

1. Pengembangan ternak ruminansia (sapi/kerbau) melalui optimalisasi reproduksi dari tahun 2018-2020 mampu menambah kelahiran sebanyak 4.126.452 ekor dan menurunkan impor daging sapi sebesar 1,43% pada tahun 2020 dari tahun 2019. Namun demikian, pengembangan sapi potong di Indonesia, saat ini terkendala belum banyaknya pengembangan budidaya yang berskala ekonomi.
2. Produksi daging khususnya ruminansia kecil telah mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan sudah ekspor ke Brunei Darussalam dan Malaysia.
3. Produksi unggas (telur dan daging ayam ras) saat ini sudah swasembada, bahkan sudah ekspor ke beberapa negara, namun terdapat kendala di aspek hilirisasi untuk pasar dalam negeri.
4. Produksi susu nasional tahun 2020 sebesar 947.685 ton atau mengalami kenaikan sebesar 0,33% dari pada tahun 2019. Impor susu juga mengalami penurunan sebanyak 2,08% pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan impor susu pada tahun 2019. Namun produksi susu belum mampu mencukupi kebutuhan nasional.

Untuk menjawab permasalahan terkait dengan ketersediaan daging sapi/kerbau, ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Ditjen PKH, antara lain:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.
2. Menyusun program terobosan sebagai solusi untuk akselerasi percepatan peningkatan populasi dan produksi sapi/kerbau di dalam negeri.
3. Penambahan impor bibit sapi indukan untuk meningkatkan jumlah induk sapi/kerbau dalam negeri dengan mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tahun-tahun sebelumnya.
4. Memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan Kawasan peternakan berbasis korporasi.
5. Mondorong pembiayaan yang bersumber dari non APBN antara lain: kredit



- perbankan, kerja sama investasi antar negara.
6. Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif.
 7. Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah (Provinsi dan kabupaten/kota).

Untuk mengatasi permasalahan terkait upaya stabilisasi harga unggas, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan Ditjen PKH Kementerian Pertanian, antara lain: (1) Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk mendorong adanya Roadmap Perunggasan Nasional; (2) Mendorong pelaku usaha untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan; (3) Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas produknya sesuai dengan standar internasional dan melakukan ekspor; (4) Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah; (5) Mendorong investasi di industri hilir dan perluasan negara tujuan ekspor. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan terkait persusuan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan Ditjen PKH Kementerian Pertanian, antara lain: (1) Perlu menambah anggaran untuk *men-support* pengembangan sapi perah yang sangat terbatas, apabila dibandingkan dengan anggaran untuk pengembangan sapi potong; (2) Mendorong peningkatan produktivitas susu sapi di tingkat peternak; (3) Mendorong peternak untuk memanfaatkan pembiayaan perbankan untuk meningkatkan kepemilikan sapi perah di tingkat peternak yang masih di bawah skala ekonomis; dan (4) Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan.

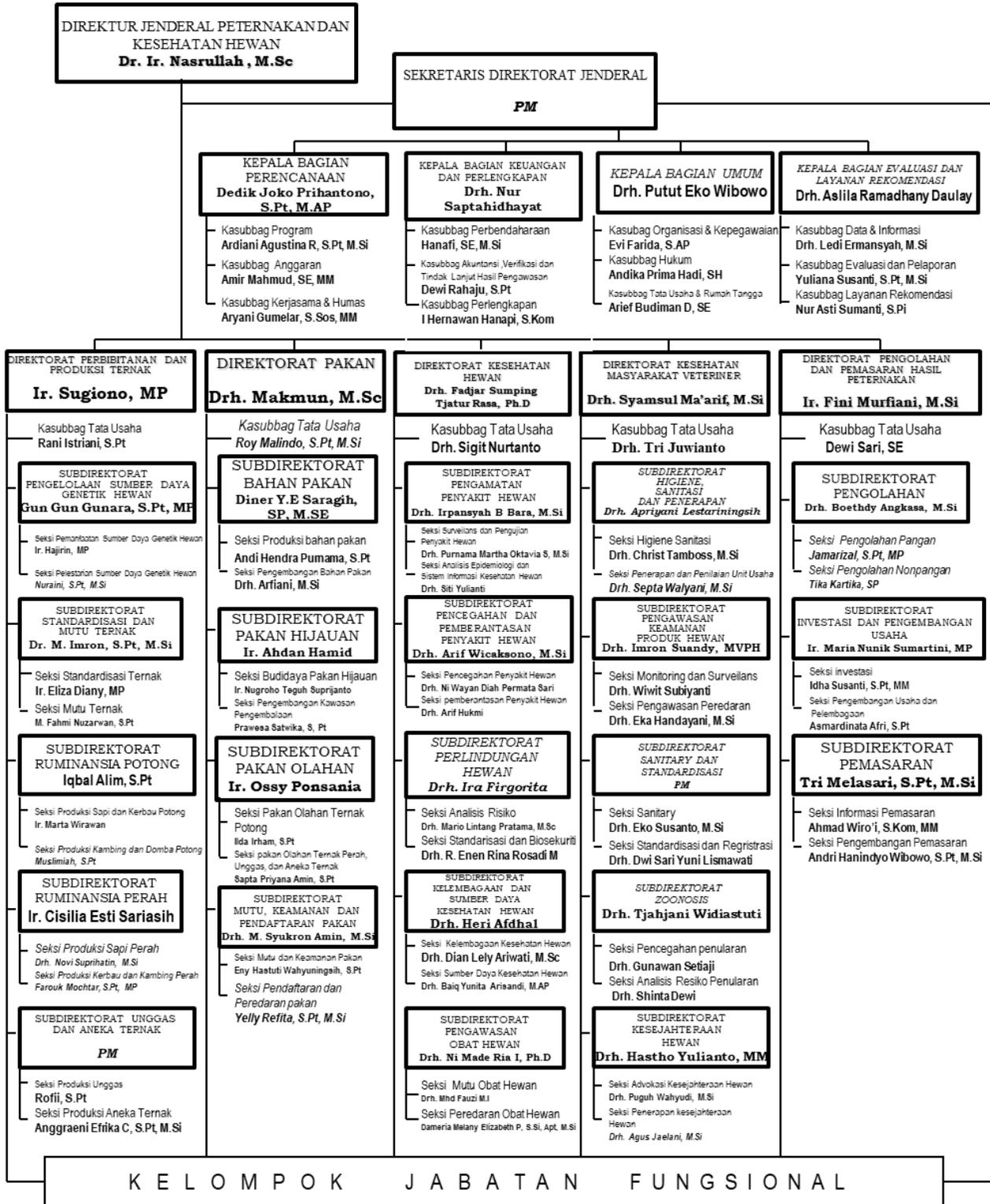


LAMPIRAN



Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PERMENTAN NOMOR 43/Permentan/OT.010/8/2015 (Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian)



Lampiran 2. Data Pegawai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	UNIT KERJA	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	25	61	0	0	7	0	0	24	1	2	121
3	DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK	2	22	30	1	0	3	0	0	4	0	0	62
4	DIREKTORAT PAKAN	0	13	28	0	0	3	0	0	2	1	0	47
5	DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN	5	54	3	0	0	1	0	0	5	0	1	69
6	DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	37	3	0	0	0	0	0	3	0	1	44
7	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN	0	19	22	0	0	1	0	0	3	1	0	46
8	PUSVETMA, SURABAYA	1	31	18	1	0	13	0	0	47	1	3	115
9	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNG SINDUR, BOGOR	2	25	7	2	0	10	0	0	35	0	0	81
10	BBVET WATES	1	31	11	2	0	15	0	0	17	1	0	78
11	BBVET MAROS	1	23	13	0	0	9	0	0	19	0	1	66
12	BBVET DENPASAR	2	17	6	0	0	9	0	0	23	4	1	62
13	BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN	0	16	28	8	0	17	0	0	35	14	16	134
14	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI MALANG	1	16	25	2	0	17	0	0	15	5	1	82
15	BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG BANDUNG	1	11	14	4	0	14	1	0	26	3	3	77
16	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR	0	8	19	4	0	7	0	0	17	1	7	63
17	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	1	20	11	0	0	5	1	0	16	0	1	55
18	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN BEKASI	0	4	16	0	0	8	0	0	12	1	0	41
19	BALAI VETERINER MEDAN	1	19	12	0	0	3	0	0	18	1	1	55
20	BALAI VETERINER BUKITTINGGI	0	19	0	0	0	7	0	0	29	0	1	56
21	BALAI VETERINER LAMPUNG	0	16	7	3	0	16	0	0	15	0	0	57
22	BALAI VETERINER BANJARBARU	0	10	14	0	0	10	0	0	19	0	0	53
23	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI	0	12	25	0	0	5	0	0	22	1	2	67
24	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG	0	6	13	0	0	6	0	0	41	3	3	72
25	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MANGATAS	1	10	13	3	0	11	0	0	35	4	3	80
26	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA	0	5	26	3	0	6	0	0	41	0	3	84
27	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI	0	8	15	0	0	11	0	0	22	0	0	56
28	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR	0	6	17	2	0	3	0	0	25	1	2	56
29	BALAI VETERINER SUBANG	0	20	5	5	0	15	0	0	3	0	0	48
	TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	21	503	462	40	0	232	2	0	573	43	52	1928

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

TELP. (021) 7815580 - 83, 78847319, FAXSIMILI : (021) 7815581 - 83, 78847319 E-MAIL : ditjenak@pertanian.go.id
website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2020

Pihak Pertama,

Nasrullah

Pihak Kedua,

Syahrul Yasin Limpo



Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Rp 77.088.165.000
2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp 171.602.744.000
3. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp 619.452.682.000
4. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	Rp 30.369.127.000
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp 375.253.827.000
6. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Rp 25.828.733.000
Jumlah	Rp 1.299.595.278.000

Menteri Pertanian,

Syahrul Yasin Limpo

Jakarta, November 2020

Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan

Nasrullah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik)	0,4 %
		Peningkatan produksi susu	2,5 %
		Peningkatan produksi telur	2,15 %
2	Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan	Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk peternakan	15 %
3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	81,5 %
4	Tersedianya sarana peternakan	Tingkat Kemanfaatan sarana prasarana peternakan	85 %
5	Meningkatnya luas wilayah yang bebas dari penyakit hewan menular strategis	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80 %
6	Terkendalnya kasus zoonosis pada manusia	Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	122 Kasus
7	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB (Pengungkit) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	32,3 Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (skala likert (1-4))	3,37 Skala Likert (1-4)
8	Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	88.25 Nilai



Lampiran 4. Pernyataan Telah Direviu Oleh Itjen Kementan

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bandung, 11 Februari 2021
Inspektur IV

Drh. IGMN Kuswandana, MM
NIP.196604081994031001



Lampiran 5. Perhitungan Nilai Efisiensi

Indikator Kinerja / Kegiatan Pendukung	Satuan	KEUANGAN			GK Capaian Keluaran	PAK x CKK Realisasi Seharusnya	PAK x CKK - RAK Gap Realisasi	$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CKK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CKK_i))} \times 100\%$	$NE = 50\% + \frac{E}{50}$
		PAK Pagu Anggaran Keluaran	RAK Realisasi Anggaran Keluaran	CKK					
IKU I Peningkatan produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, itik)									
1 Hewan Pakan Ternak	Ha	21.682.142.000	21.091.158.820	100,00	21.682.142.000,00	590.983.180,00	0,30	50,76	
2 Pakan Olahan dan bahan pakan	Ton	42.186.577.000	41.944.598.341	99,13	41.821.280.459,29	-123.317.881,71			
3 Mutu dan keamanan pakan	Sampel	6.895.174.000	6.847.574.890	100,00	6.895.174.000,00	47.599.110,00			
4 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	NSPK	6.324.272.000	6.257.221.148	100,00	6.324.272.000,00	67.050.852,00			
5 Optimalisasi Reproduksi	Akseptor	236.131.271.000	233.378.184.175	146,79	346.622.873.421,21	113.244.689.246,21			
6 Benih Ternak Unggul	Dosis	53.419.811.000	51.365.362.973	234,32	125.172.229.674,18	73.806.866.701,18			
7 Bibit Ternak Unggul	Ekor	56.931.543.000	55.340.202.000	99,97	56.914.152.691,16	1.573.950.691,16			
8 Pengembangan ternak ruminansia potong	Ekor	190.535.446.000	187.886.146.339	139,27	265.365.340.922,30	97.479.194.593,30			
9 Pengembangan unggas dan aneka ternak	Ekor	35.868.481.000	35.595.144.352	100,00	35.868.481.000,00	273.336.648,00			
10 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	NSPK	46.536.130.000	43.434.407.243	100,00	46.536.130.000,00	3.101.722.757,00			
11 Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	3.646.529.000	3.555.651.898	100,00	3.646.529.000,00	90.877.102,00			
12 Pengendalian Pemolongan, Betina produktif	Lokasi	1.773.782.000	1.720.663.786	100,00	1.773.782.000,00	53.118.214,00	0,10	50,25	
IKU II Peningkatan produksi susu									
1 Hijauan Pakan Ternak	Ha	21.682.142.000	21.091.158.820	100,00	21.682.142.000,00	590.983.180,00			
2 Pakan Olahan dan bahan pakan	Ton	42.186.577.000	41.944.598.341	99,13	41.821.280.459,29	-123.317.881,71			
3 Bibit Ternak Unggul	Ekor	56.931.543.000	55.340.202.000	115,33	65.657.865.503,85	10.317.663.503,85			
4 Pengembangan ternak ruminansia perah	Ekor	30.000.000	30.000.000	100,00	30.000.000,00	0,00			
5 Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	3.646.529.000	3.555.651.898	167,01	6.089.919.200,95	2.534.267.302,95			
IKU III Peningkatan produksi telur									
1 Bibit Ternak Unggul	Ekor	56.931.543.000	55.340.202.000	115,33	65.657.865.503,85	10.317.663.503,85			
2 Pengembangan unggas dan aneka ternak	Ekor	35.868.481.000	35.595.144.352	100,00	35.868.481.000,00	273.336.648,00			
3 Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	3.646.529.000	3.555.651.898	167,01	6.089.919.200,95	2.534.267.302,95	0,03	50,08	
IKU IV Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan									
1 Pengembangan Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Unit	4.167.409.000	4.005.006.318	100,00	4.167.409.000,00	162.402.682,00			
2 Pengembangan Pemastaran Peternakan	Unit	201.260.000	201.060.000	100,00	201.260.000,00	200.000,00			
3 Kelengkapan dan Usaha Peternakan	Lokasi	8.722.144.000	8.440.735.933	100,00	8.722.144.000,00	281.408.067,00			
4 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pengolahan dan Pemastaran Hasil Peternakan	NSPK	11.039.661.000	10.819.574.008	100,00	11.039.661.000,00	220.086.992,00			
5 Pengelolaan Informasi Pemastaran	Lokasi	1.698.259.000	1.674.437.806	100,00	1.698.259.000,00	23.821.194,00			
6 Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	Sampel	6.079.670.000	6.048.822.196	139,27	8.467.367.810,63	2.418.545.614,63			
7 Obat Hewan dan Bahan Biologi	Dosis	22.313.023.000	22.246.890.135	288,11	64.285.335.772,02	42.038.445.637,02			
8 Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	3.646.529.000	3.555.651.898	167,01	6.089.919.200,95	2.534.267.302,95	0,28	50,70	
IKU V Presentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan									
1 Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	3.646.529.000	3.555.651.898	167,01	6.089.919.200,95	2.534.267.302,95			
2 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Sampel	14.822.230.000	14.564.498.677	129,16	19.144.880.414,48	4.580.381.737,48	0,02	50,05	
IKU VI Tingkat kemitraan sarana prasarana peternakan									
1 Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan	Unit	4.351.831.000	4.329.237.968	100,00	4.351.831.000,00	22.593.032,00			
2 Pengembangan Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Unit	4.167.409.000	4.005.006.318	100,00	4.167.409.000,00	162.402.682,00	0,39	50,99	
IKU VII Presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis									
1 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Sampel	37.432.459.000	36.814.452.911	234,32	87.710.987.132,05	50.896.534.221,05			
2 Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Dosis	43.335.465.000	42.582.421.368	99,97	43.322.227.749,08	739.806.381,08			
3 Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	Sampel	6.079.670.000	6.048.822.196	139,27	8.467.367.810,63	2.418.545.614,63			
4 Obat Hewan dan Bahan Biologi	Dosis	22.313.023.000	22.246.890.135	288,11	64.285.335.772,02	42.038.445.637,02			
5 Kelengkapan Veteriner	Unit	21.962.809.000	21.432.385.291	100,00	21.962.809.000,00	530.423.709,00			
6 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	Dokumen	38.887.637.000	38.133.560.572	100,00	38.887.637.000,00	754.076.428,00			
7 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	Laporan	1.591.681.000	1.481.591.749	100,00	1.591.681.000,00	110.089.251,00			
IKU VIII Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia									
1 Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	3.646.529.000	3.555.651.898	167,01	6.089.919.200,95	2.534.267.302,95	0,28	50,70	
2 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Dokumen	14.822.230.000	14.564.498.677	129,16	19.144.880.414,48	4.580.381.737,48	0,04	50,10	
IKU IX Nilai PMPRE Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan									
1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	40.227.635.000	39.546.061.323	101,08	40.660.646.724,10	1.114.585.401,10			
2 Layanan Dukungan Manajemen Saiker	Layanan	22.864.713.000	21.459.163.588	100,00	22.864.713.000,00	1.405.549.412,00	0,03	50,07	
IKU X Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan									
1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	91.526.111.000	90.446.227.953	102,61	93.915.919.779,38	3.469.691.826,38			
2 Layanan Perkantoran	Layanan	220.635.368.000	214.717.494.143	100,00	220.635.368.000,00	5.917.873.857,00			
IKU XI Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan									
1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	40.227.635.000	39.546.061.323	101,08	40.660.646.724,10	1.114.585.401,10			
2 Layanan Dukungan Manajemen Saiker	Layanan	22.864.713.000	21.459.163.588	100,00	22.864.713.000,00	1.405.549.412,00	0,04	50,10	

Kegiatan / Output	Satuan	Target	Realisasi	Indikator Output	Satuan	Target	Realisasi	CK*
1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak								
400 Hijauan Pakan Ternak	Ha	1.069	1.069	01 - Penanaman dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak	Ha	1.069	1.069	100,00
400 Pakan Olahan dan bahan pakan	Ton	7.836	7.802	02 - Produksi bahan pakan/pakan	Ton	7.836	7.802	99,13
400 Mutu dan keamanan pakan	Sampel	2.346	2.346	03 - Pengawasan mutu dan keamanan bahan pakan/pakan	Sampel	2.346	2.346	100,00
400 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pakan	NSPK	5	5	04 - Terlaksananya penyusunan NSPK Pakan	NSPK	5	5	100,00
1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan								
401 Pengendalian dan Identifikasi Penyakit Hewan	Sampel	98.000	150.013	01 - Survelians Penyakit Hewan	Sampel	98.000	150.013	234,32
402 Pencegahan dan Penanganan Penyakit Hewan	Dosis	2.978.886	2.978.431	01 - Pencegahan dan Pengamanan PHMS	Dosis	2.978.886	2.978.431	99,97
404 Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	Sampel	1.410	1.664	01 - Survelians Obat Hewan	Sampel	1.410	1.664	139,27
405 Obat Hewan dan Bahan Biologi	Dosis	5.147.575	8.737.344	01 - Penyediaan vaksin dan bahan biologik	Dosis	5.147.575	8.737.344	288,11
406 Kelembagaan Veteriner	Unit	11	11	01 - Penguatan Kelembagaan Veteriner	Unit	11	11	100,00
407 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	Dokumen	7	7	01 - Tersusunnya Dokumen Dukungan Teknis Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Dokumen	7	7	100,00
408 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	Laporan	9	9	01 - Tersosialisasinya kegiatan kesehatan hewan	Laporan	9	9	100,00
1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak								
319 Optimalisasi Reproduksi	Akseptor	3.000.000	3.634.738	01 - Jumlah Akseptor IB	Akseptor	3.000.000	3.634.738	146,79
400 Benih Ternak Unggul	Dosis	4.940.800	6.445.035	01 - Penyediaan Semen Beku dan Embrio Ternak	Dosis	4.940.800	6.445.035	170,16
401 Bibit Ternak Unggul	Ekor	754.280	810.027	01 - Jumlah produksi bibit ternak unggul (Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Kerbau, Babu, Ayam dan Itik)	Ekor	754.280	810.027	115,33
402 Pengembangan ternak ruminansia potong	Ekor	21.100	18.393	01 - Pengembangan ternak ruminansia potong (Sapi Potong, Kerbau, Kambing/Domba)	Ekor	21.100	18.393	75,99
403 Pengembangan ternak ruminansia perah	Ekor	1	1	01 - Pengembangan ternak ruminansia perah (Sapi Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah)	Ekor	1	1	100,00
404 Pengembangan unggas dan aneka ternak	Ekor	36.025	36.025	01 - Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak (Ayam, Itik, Puyuh, Kelinci dan Babu)	Ekor	36.025	36.025	100,00
406 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	NSPK	6	6	01 - NSPK SDGH	NSPK	1	1	100,00
				02 - NSPK Pengembangan Ruminansia Potong	NSPK	1	1	
				03 - NSPK Pengembangan Ruminansia Perah	NSPK	1	1	
				04 - NSPK Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak	NSPK	1	1	
1786 Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)								
400 Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	130	168	01 - Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan	Unit Usaha	130	168	167,01
401 Pengembangan Mutu dan Keamanan Produk	Sampel	16.630	18.900	01 - Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Sampel	16.630	18.900	129,16
402 Pengendalian Pemotongan Betina produktif	Lokasi	33	33	01 - Penurunan Pemotongan Betina Produktif	Lokasi	33	33	100,00
403 Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan	Unit	4	4	01 - Terlaksananya fasilitas sarana prasarana penjaminan keamanan produk hewan	Unit	4	4	100,00
404 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesmavet	Dokumen	6	6	01 - Penyusunan NSPK Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	6	6	100,00
1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dijen Peternakan								
950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	01 - Indeks kepuasan pengguna layanan sekretariat eselon I = xx	Skala Likert	3,37	3,48	101,08
				02 - Jumlah dokumen perencanaan yang disusun = xx dokumen	Dokumen	4	4	
				04 - Penyusunan laporan keuangan = xx laporan	Laporan	1	1	
970 Layanan Dukungan Manajemen Sektir	Layanan	1	1	04 - Jumlah dokumen perencanaan yang disusun = xx dokumen	Dokumen	2	2	100,00
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	04 - Penyusunan laporan keuangan = xx laporan	Laporan	1	1	
				01 - Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	Unit	57	60	102,61
994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	02 - Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	m2	13.180	13.183,40	100,00
				01 - Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx %	%	100	100	
				02 - Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx %	%	100	100	
5891 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak								
401 Pengembangan Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Unit	32	32	01 - Terlaksananya Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Unit	32	32	100,00
401 Pengembangan Pemasaran Peternakan	Unit	1	1	01 - Terlaksananya Fasilitas Pemasaran Peternakan	Unit	1	1	100,00
402 Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Lokasi	113	113	01 - Terlaksananya kelembagaan dan usaha peternakan	Lokasi	113	113	100,00
403 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	NSPK	21	21	01 - Terlaksananya dukungan teknis kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	NSPK	21	21	100,00
405 Pengelolaan Informasi Pemasaran	Lokasi	15	15	01 - Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pemasaran	Lokasi	15	15	100,00

$$CK = \prod_{i=1}^n \left(\frac{Realisasi\ indikator\ i}{Target\ indikator\ i} \right)^{\frac{1}{n}}$$

Lampiran 6. Tabel Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2016-2020

(000 ton)

No	Jenis/ Species	Tahun/Year				
		2016	2017	2018	2019	2020 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	DAGING/MEAT	3.356,3	4.596,7	4.779,4	4.888,8	4.675,9
1	Sapi Potong/ <i>Beef Cattle</i>	518,5	486,3	498,0	504,8	515,6
2	Kerbau/ <i>Buffalo</i>	31,9	29,4	25,3	24,8	24,9
3	Kuda/ <i>Horse</i>	2,6	2,7	2,4	1,8	1,9
4	Kambing/ <i>Mutton</i>	67,8	70,4	70,2	72,9	69,8
5	Domba/ <i>Lamb</i>	45,9	55,1	82,3	70,1	66,9
6	Babi/ <i>Pork</i>	339,6	317,4	215,8	236,3	241,4
7	Ayam Buras/ <i>Native Chicken</i>	285,0	300,1	287,2	292,3	293,1
8	Ayam Ras Petelur/ <i>Layer</i>	110,3	114,9	141,6	141,5	139,4
9	Ayam Ras Pedaging/ <i>Broiler</i>	1.905,5	3.175,9	3.409,6	3.495,1	3.275,3
10	Itik/ <i>Duck</i>	41,9	36,4	38,7	39,8	37,5
11	Itik Manila/ <i>Muscovy Duck</i>	5,6	5,9	6,0	6,8	6,8
12	Kelinci/ <i>Rabbit</i>	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7
13	Puyuh/ <i>Quail</i>	1,0	1,1	1,3	1,3	1,7
14	Merpati/ <i>Pigeon</i>	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
II	TELUR/EGG	2.031,2	5.216,6	5.267,9	5.354,6	5.652,5
1	Ayam Buras/ <i>Native Chicken</i>	196,7	221,0	212,3	246,7	251,0
2	Ayam Ras Petelur/ <i>Layer</i>	1.485,7	4.632,8	4.688,1	4.753,4	5.044,4
3	Itik/ <i>Duck</i>	292,0	302,7	306,5	294,0	298,0
4	Itik Manila/ <i>Muscovy Duck</i>	33,2	35,1	32,0	34,7	35,0
5	Puyuh/ <i>Quail</i>	23,6	25,0	29,0	25,9	24,2
III	SUSU/MILK	912,7	928,1	951,0	944,5	947,7

Keterangan/Note : *) Angka sementara/*Preliminary figures*

Tahun 2016 Produksi daging Ayam Ras Pedaging dan produksi telur Ayam Ras Petelur bersumber dari Laporan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan

Tahun 2017 - 2020 Produksi daging Ayam Ras Pedaging dan produksi telur Ayam Ras Petelur bersumber dari data yang diolah berdasarkan hasil laporan perusahaan secara online



Lampiran 7. Tabel Populasi Ternak Tahun 2016-2020

(000 Ekor/000 Head)

No	Jenis/ Species	Tahun/Year				
		2016	2017	2018	2019	2020 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	TERNAK BESAR/LARGE LIVESTOCK					
1	Sapi Potong/Beef Cattle	14.717	15.584	16.433	16.930	17.467
2	Sapi Perah/Dairy Cattle	512	542	582	565	568
3	Kerbau/Buffalo	1.004	990	894	1.134	1.179
4	Kuda/Horse	424	409	378	375	392
II	TERNAK KECIL/SMALL LIVESTOCK					
1	Kambing/Goat	17.862	18.208	18.306	18.463	19.096
2	Domba/Sheep	15.717	17.142	17.611	17.834	17.769
3	Babi/Pig	7.904	8.261	8.254	8.521	9.070
III	TERNAK UNGGAS/POULTRIES					
1	Ayam Buras/Native Chicken	294.333	299.701	300.978	301.761	308.477
2	Ayam Ras Petelur/Layer	161.364	258.844	261.933	263.918	281.108
3	Ayam Ras Pedaging/Broiler	1.632.801	2.922.636	3.137.707	3.169.805	2.970.494
4	Itik/Duck	47.423	49.056	50.528	47.783	48.588
5	Itik Manila/Muscovy Duck	8.170	8.502	9.024	9.446	9.656
IV	ANEKA TERNAK/VARIOUS LIVESTOCK					
1	Kelinci/Rabbit	1.202	1.244	1.332	1.247	1.255
2	Puyuh/Quail	14.088	14.570	14.062	14.844	14.820
3	Merpati/Pigeon	2.476	2.503	2.644	2.711	2.710

Keterangan/Note : *) Angka sementara/ Preliminary figures

Populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2016 - 2017 adalah angka terkoreksi dengan Parameter Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) BPS 2018

Populasi sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2018 bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun 2016 Populasi Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging bersumber dari Laporan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan

Tahun 2017 - 2020 Populasi Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging bersumber dari data yang diolah berdasarkan hasil laporan perusahaan secara online. Populasi Ayam Ras



Lampiran 8. Ekspor Sub Sektor Peternakan Tahun 2016 - 2020

No	Komoditas/Commodities	2015			2016			2017			2018			2019			2020		
		Volume (kg)	Nilai (USD)	Volume (kg)	Nilai (USD)	Volume (kg)	Nilai (USD)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
A.	Ternak/Livestock	28.610.865	59.136.490	28.113.131	57.312.868	29.176.854	63.985.608	28.398.742	60.949.932	31.279.363	66.038.048	33.148.060	80.407.271						
1	Kuda	-	-	36	72	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	Keledai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3	Sapi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4	Kerbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5	Babi	28.145.599	55.424.868	27.575.397	53.033.284	28.711.950	59.884.047	27.862.635	55.930.137	30.721.543	60.684.538	32.751.106	75.489.693						
6	Biri-biri	-	-	-	-	-	-	81.500	346.772	21.000	97.704	176.745	685.686						
7	Kambing	12.775	41.317	-	-	6.240	11.544	11.255	128.950	15.120	118.941	4.915	19.150						
8	Unggas	3.919	5.021	343	720	218	926	3.756	67.478	11.695	317.923	22.316	285.578						
9	Lebah hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10	Bintang hidup lainnya	448.572	3.665.285	537.355	4.278.792	458.446	4.089.091	439.596	4.476.595	510.004	4.818.942	192.979	3.927.165						
B.	Hasil Ternak/Livestock Product	125.452.810	248.893.904	136.654.879	348.988.698	146.035.668	436.078.594	152.143.940	446.983.171	154.773.093	523.890.058	174.873.138	733.756.382						
1	Daging	4.305.634	23.771.657	4.884.321	22.700.685	4.033.178	18.821.875	3.647.604	17.025.541	3.643.801	18.581.398	2.859.753	15.448.684						
a	Sapi	6.750	12.700	14.841	23.102	28.638	82.410	13.657	35.866	23.688	53.821	27.570	53.841						
b	Babi	1.775	667	278.822	592.449	605	10.100	28.279	108.682	2.532	17.906	467	382						
c	Kambing/domba	-	-	114	663	34	737	-	-	1.116	6.562	406	3.439						
d	Kuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
e	Unggas	29.949	203.704	17.152	255.807	325.273	670.785	418.888	898.241	740.027	1.747.615	620.437	1.145.544						
f	Jerohan sapi	150	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
g	Jerohan Non sapi	5.500	8.030	-	-	-	-	-	-	8.000	2.760	-	-						
h	Daging lainnya	4.261.710	23.546.516	4.553.393	21.828.665	3.678.628	18.057.843	3.186.781	15.982.551	2.868.438	16.752.734	2.210.874	14.245.479						
2	Susu	39.913.729	67.589.086	40.515.856	66.819.961	33.870.557	53.635.066	35.227.357	56.283.712	37.342.468	68.287.307	43.912.625	84.206.924						
a	Susu dan kepala susu	27.173.103	49.711.694	32.069.956	55.908.392	27.174.169	40.503.961	23.129.268	39.307.948	21.421.450	45.238.747	59.656.613	59.656.613						
b	Yogurt	2.873.062	2.877.768	1.478.190	1.388.184	796.855	795.674	2.046.111	2.541.194	2.741.415	3.586.107	5.109.082	5.521.656						
c	Wentega	9.229.658	12.819.778	4.296.412	6.647.572	4.539.630	8.116.037	8.893.144	12.821.271	11.928.883	15.405.590	11.222.177	11.846.113						
d	Keju	637.906	2.319.847	2.671.398	2.875.813	1.359.903	4.217.484	1.159.045	3.612.959	1.250.720	4.057.342	2.118.619	7.182.543						
3	Telur	4.000	4.750	4.750	9.929	9.929	3.088	2.027	6.776	7.333	51.728	57.328	1.008.509						
4	Madu	278.552	568.562	192.373	505.026	370.454	1.730.019	201.146	909.869	273.273	1.063.817	213.626	462.121						
5	Lemak	80.158.308	56.667.885	90.057.506	66.322.296	106.419.284	81.361.596	111.748.740	80.005.259	112.182.741	71.339.772	126.456.982	91.532.625						
6	Makanan-dolahan	29.457	60.221	32.501	68.405	45.139	82.976	24.859	89.887	47.025	295.717	39.873	177.938						
7	Sarang burung walet	761.176	99.819.511	992.103	192.495.417	1.286.719	280.284.270	1.291.948	290.559.012	1.258.972	384.036.485	1.317.469	540.593.719						
8	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan	1.753	412.231	220	76.909	408	159.674	259	114.056	17.480	253.834	15.483	325.862						
C.	Produk Hewan Non Pangan / Non-food Animal Pl	38.105.140	123.211.374	42.796.826	123.014.666	50.136.318	112.489.463	66.105.021	118.124.463	97.285.979	138.127.221	116.485.230	133.207.036						
1	Bulu	1.356.186	2.449.363	1.375.384	1.615.984	1.957.090	3.204.133	2.327.196	4.777.713	2.809.695	7.024.478	1.506.672	1.943.951						
2	Tulang dan Tanduk	554.013	588.734	563.171	411.728	522.549	353.004	443.960	220.404	568.874	298.903	594.118	1.367.073						
3	Kulit	4.132.537	99.445.372	3.718.230	92.846.567	2.966.085	76.750.012	3.822.853	74.065.828	4.425.408	74.339.365	3.783.803	49.744.045						
4	Wol	1.846	8.661	741.970	566.084	1.031	1.745	6.796	16.365	67	139	44	778						
5	Pakan Hewan	32.058.448	20.717.689	36.358.772	27.543.076	44.680.589	32.120.871	59.492.693	38.918.302	89.421.982	55.881.889	110.572.270	79.943.988						
6	Ulat sutera	2.109	1.555	39.299	31.248	8.976	59.670	11.523	165.951	59.973	582.447	28.323	207.201						
D.	Obat Hewan/Veterinary Medicine	562.396	11.784.321	616.441	12.135.855	549.028	10.210.191	739.508	13.126.425	832.896	14.126.487	906.256	16.684.860						
1	Vaksin obat hewan	490.254	9.171.302	517.181	10.429.724	518.230	10.024.170	667.641	12.279.506	591.030	12.960.068	735.899	15.871.576						
2	Reagen berasal dari mikroba, dari jenis yang cocok untuk diagnosis biologis veteriner	-	-	120	420	-	-	-	-	-	-	150	1.800						
3	Lain-lain	72.142	2.613.019	99.140	1.703.711	30.798	186.021	71.868	846.919	241.866	1.166.419	172.207	811.484						
E.	Benih/Bibit	563.219	406.759	304.363	1.842.200	394.028	2.380.194	47.420	976.894	177.594	2.196.295	27.819	597.528						
1	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari unggas	9.200	100.460	303.053	1.804.065	376.186	2.283.883	46.068	769.992	166.706	1.763.207	20.590	351.002						
2	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari bebek	-	-	-	-	-	-	-	-	1.738	1.889	81	105						
3	Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari selain unggas	-	-	40	95	-	-	-	-	-	-	-	-						
4	Mami dan Produk hewani lainnya tidak dirinci	554.019	306.289	1.270	38.040	17.842	96.311	1.352	207.502	9.150	431.199	7.148	246.421						
F.	Jumlah/Total	193.294.430	443.432.848	208.485.639	543.292.287	226.291.896	625.144.050	247.434.632	640.170.885	284.348.925	744.378.110	325.442.504	964.653.078						

Sumber/Source : Badan Pusat Statistik/BPS-Statistic Indonesia

Lampiran 9. Surveilans pengawasan mutu pangan segar asal hewan

No.	Jenis unit usaha	Jumlah sampel	Parameter Uji
1	Kios daging	4.554	<i>Escherchia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Salmonella</i> , Residu Obat (screening antibiotik), Residu logam berat
2	Cold Storage	2.318	<i>Escherchia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Salmonella</i> , Residu Obat (screening antibiotik), Residu hormon, Residu logam berat
3	RPH-U	2.318	<i>Escherchia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Salmonella</i> , Residu Obat (screening antibiotik), Residu hormon, Residu logam berat
4	RPH-R	1.862	<i>Escherchia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Salmonella</i> , Residu Obat (screening antibiotik), Residu hormon, Residu logam berat
5	Pengolahan daging	5.280	ALT, <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Staphylococcus aureus</i>
6	PPPTK	1.184	ALT, <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Salmonella</i> , Residu Obat (screening antibiotik)
7	Pengolahan susu	944	ALT, <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Salmonella</i> , Aflatoksin M1
8	Penampungan susu	272	ALT, <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Salmonella</i> , Residu Obat (screening antibiotik)
9	Pengolahan telur	168	ALT, <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Salmonella</i> , Residu Obat (screening antibiotik)
Jumlah		18.900	



Lampiran 10. Fasilitas Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Penerima	Lokasi
1	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Gasik	Ds. Pegajahan, Kec. Pegajahan, Kab. Serdang Bedagai, Sumut
2	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Karya Bersama	Kel. Bandar Sinembah, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Sumut
3	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Merbau Makmur II	Ds. Teluk Merbau, Kec. Dayun, Kab. Siak, Riau
4	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Bahagia Bersama	Ds. Tasik Juang, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu, Riau
5	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Maju Bersama Group	Ds. Sumber Baru, Kec. Sepuluh Banyak, Kab. Lampung Tengah, Lampung
6	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Selandang Kamulyan	Ds. Panca Karsa Jaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, Lampung
7	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Sulanjana	Ds. Sukalarang, Kec. Sukalarang, kab. Sukabumi, Jawa Barat
8	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Tanjung Jaya	Kp. Kandang Sapi, Ds. Pamanegapa, Kec. Cibinong, Kab. Cianjur, Jawa Barat
9	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Budisah	Ds. Padamulya, Kec. Cipunagara, Kab. Subang, Jawa Barat
10	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Sejahtera Sahabat Mandiri	Ds. Purwadadi, Kec. Purwadadi, Kab. Subang, Jawa Barat
11	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Karya Kinasih	Ds. Bakung Kidul, Kec. Jombang, Kab. Cirebon, Jawa Barat
12	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Mukti Andhini I	Ds. Cucukan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, Jawa Tengah
13	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Margo Raharjo Empat	Ds. Kumpul Rejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah
14	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Andini Lestari 2	Pranti, Ds. Srihardono, Kec. Pundong, Kab. Bantul, DI Yogyakarta
15	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Rukun Mulyo	Suruh, Ds. Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DI Yogyakarta
16	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Sumber Rejeki	Kel. Sarangan, Kec. Ploasan, Kab. Magetan, Jawa Timur
17	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Kedung Gondang	Ds. Jono, Kec. Temayang, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur
18	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Ustian Mandiri	Ds. Dobokgede, Kec. Tambakrejo, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur
19	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Bareng Mele II	Ds. Kelayu Jorong, Kec. Selong, kab. Lombok Timur, NTB
20	Unit Pengolahan Pakan Ruminansia	1 Unit	Kelompok Hurih Mekar	Ds. Cihurip, Kec. Cihurip, Kab. Garut, Jawa Barat
21	Unit Pengolahan Pakan Unggas	1 Unit	Kelompok Maju Jaya Mandiri	Ds. Jati Mulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung
22	Unit Pengolahan Pakan Unggas	1 Unit	Kelompok KWT Sehati	Ds. Sri Katon, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Lampung
23	Unit Pengolahan Pakan Unggas	1 Unit	Kelompok Sumber Rejeki	Ds. Suka Pura, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan, Lampung
24	Unit Pengolahan Pakan Unggas	1 Unit	Kelompok Mekar Tani IV	Ds. Sukamanah, kec. Tanara, Kab. Serang, Banten
25	Unit Pengolahan Pakan Unggas	1 Unit	Kelompok Karya Tani	Ds. Tamiang, Kec. Gunung Kaler, Kab. Tangerang, Banten
26	Unit Pengolahan Pakan Unggas	1 Unit	Kelompok Mutiara Alam Pesawahan	Ds. Pringkep, Kec. Pabuaran, kab. Subang, Jawa Barat
27	Unit Pengolahan Pakan Unggas	1 Unit	Kelompok Sido Dadi	Ds. Sari Kemuning, Kec. Senduro, kab. Lumajang, Jawa Timur
28	Unit Pengolahan Pakan Unggas	1 Unit	Kelompok Pelita Jaya	Ds. Handil babirik, Kec. Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut, Kalsel
29	Unit Pengolahan Pakan Unggas	1 Unit	Kelompok Hidup Bersama	Ds. Maluka Baulin, Kec. Kurau, Kab. Tanah Laut, Kalsel
30	Unit Pengolahan Pakan Unggas	1 Unit	Kelompok Mufakat 1	Ds. Banyu Hrang, Kec. Anuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalsel
31	Unit Pengolahan Pakan Unggas	1 Unit	Kelompok Cintai Bertani	Ds. Rantau Karau Hulu, Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalsel
32	Unit Pengolahan Pakan Unggas	1 Unit	Kelompok Sari Alam Tani	Ds. Motilango, Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango, Gorontalo
33	Unit Pengolahan Pakan Unggas	1 Unit	Kelompok Unggas Perkasa	Kel. Hunggahwa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, Gorontalo
34	Container Semen Beku	30 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Prov. Sumatera Utara
35	Container Semen Beku	50 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Sumatera Barat
36	Container Semen Beku	8 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Riau
37	Container Semen Beku	10 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Prov. Sumatera Selatan
38	Container Semen Beku	70 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Perkebunan Dan Peternakan Prov. Lampung
39	Container Semen Beku	4 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Pertanian Prov. Kepulauan Bangka Belitung
40	Container Semen Beku	5 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Prov. Kepulauan Riau
41	Container Semen Beku	2 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Kelautan Dan Pertanian Prov. DKI Jakarta
42	Container Semen Beku	32 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Prov. Jawa Barat
43	Container Semen Beku	62 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah
44	Container Semen Beku	20 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur
45	Container Semen Beku	5 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Pertanian Prov. Banten
46	Container Semen Beku	6 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Bali

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Penerima	Lokasi
47	Container Semen Beku	2 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Nusa Tenggara Barat
48	Container Semen Beku	16 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Peternakan Prov. Nusa Tenggara Timur
49	Container Semen Beku	18 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Barat
50	Container Semen Beku	10 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Prov. Kalimantan Tengah
51	Container Semen Beku	7 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan
52	Container Semen Beku	2 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Utara
53	Container Semen Beku	5 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Pertanian Dan Peternakan Prov. Sulawesi Utara
54	Container Semen Beku	6 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Perkebunan Dan Peternakan Prov. Sulawesi Tengah
55	Container Semen Beku	3 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Sulawesi Selatan
56	Container Semen Beku	12 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Prov. Sulawesi Tenggara
57	Container Semen Beku	15 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Pertanian Prov. Gorontalo
58	Container Semen Beku	10 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan Prov. Sulawesi Barat
59	Container Semen Beku	10 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Pertanian Prov. Maluku
60	Container Semen Beku	6 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara
61	Container Semen Beku	15 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Papua Barat
62	Container Semen Beku	5 Unit	Dinas Provinsi	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Papua
63	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BBPMSOH	Balai Besar Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Obat Hewan
64	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BBVet Maros	Balai Besar Veteriner Maros, Sulawesi Selatan
65	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BBVet Wates	Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta
66	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BBVet Denpasar	Balai Besar Veteriner Denpasar
67	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	Pusvetna	Pusat Veteriner Farma Surabaya
68	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BVet Banjarbaru	Balai Veteriner Banjarbaru
69	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BVet Bukitittinggi	Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Regional II Bukitittinggi
70	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BVet Lampung	Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung
71	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BVet Medan	Balai Veteriner Medan
72	Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	1 Paket	BVet Subang	Balai Veteriner Subang
73	Sarana Prasarana Pemotongan Kurban	1 Paket	Mesjid Uswatun Khasamah	Kota Tangerang, Banten
74	Sarana Prasarana Pemotongan Kurban	1 Paket	Mesjid Raya Bandung	Jawa Barat
75	Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan : Keju Mozzarella	1 Unit	Kelompok Talang Perindu (Lazi Farm)	Kab. Agam, Sumatera Barat
76	Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan : Susu Pasteurisasi	1 Unit	Sentra Susu Pondok Rangun	Jakarta Timur, DKI Jakarta
77	Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan : Susu Pasteurisasi	1 Unit	Kelompok Bina Kreatif	Kab. Bandung, Jawa Barat
78	Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan : Susu Pasteurisasi	1 Unit	Kelompok Cipta Priangan	Kab. Sukabumi, Jawa Barat
79	Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan : Susu Kambing PE Bubuk	1 Unit	Kelompok Maju Mapan	Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta
80	Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan : Susu Pasteurisasi	1 Unit	Kelompok Nedyo Rahayu	Kab. Madiun, Jawa Timur
81	Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan : Susu Pasteurisasi	1 Unit	Kelompok Miananga Jaya	Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan
82	Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan : Susu Segar Kambing Organik	1 Unit	Kelompok Usaha Tani	Kab. Tenggalek, Jawa Timur
83	Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan : Susu Pasteurisasi	1 Unit	Kelompok Sugih Mukti Mandiri	Kab. Subang, Jawa Barat
84	Sarana Peningkatan Mutu Produk Olahan : Susu Pasteurisasi	1 Unit	Kelompok Karya Bersama	Kota Binjai, Sumatera Utara
85	Unit Pengolahan Unggas dan Aneka Ternak	1 Unit	Kelompok Berkat Usaha Bersama	Kota Metro, Lampung
86	Unit Pengolahan Unggas dan Aneka Ternak	1 Unit	KTT, Kambaja	Kab. Lombok Timur, NTB
87	Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	1 Unit	Kelompok Karya Lestari	Kab. Pekanbaru, Riau
88	Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	1 Unit	Kelompok Mandiri Jaya	Kab. Subang, Jawa Barat
89	Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	1 Unit	Kelompok Citawa	Kab. Bandung, Jawa Barat
90	Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	1 Unit	Kelompok Manik Amerta	Kab. Tabanan, Bali
91	Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	1 Unit	Kelompok Sumber Makmur	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
92	Sarana Pemasaran	1 Unit	Oesapa Barat Kelapa Lima	Kota Kupang, NTT

Lampiran 11. Wilayah Kabupaten/Kota Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	ACEH	ACEH TENGAH
2	ACEH	ACEH TENGGARA
3	ACEH	GAYO LUES
4	SUMATERA UTARA	BATU BARA
5	SUMATERA UTARA	BINJAI
6	SUMATERA UTARA	DAIRI
7	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG
8	SUMATERA UTARA	GUNUNG SITOLI
9	SUMATERA UTARA	KARO
10	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU
11	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU UTARA
12	SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL
13	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT
14	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS UTARA
15	SUMATERA UTARA	PEMATANG SIANTAR
16	SUMATERA UTARA	SAMOSIR
17	SUMATERA UTARA	SIMALUNGUN
18	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN
19	SUMATERA UTARA	TEBING TINGGI
20	SUMATERA BARAT	DHARMASRAYA
21	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK
22	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTO
23	SUMATERA BARAT	PADANG
24	SUMATERA BARAT	PADANG PANJANG
25	SUMATERA BARAT	PASAMAN
26	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT
27	SUMATERA BARAT	PAYAKUMBUH
28	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN
29	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG
30	SUMATERA BARAT	SOLOK
31	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN
32	RIAU	BENGLALIS
33	RIAU	INDRAGIRI HILIR
34	RIAU	INDRAGIRI HULU
35	RIAU	KEPULAUAN MERANTI
36	RIAU	KUANTAN SINGINGI
37	RIAU	PELALAWAN
38	JAMBI	BATANGHARI
39	JAMBI	BUNGO
40	JAMBI	KOTA JAMBI
41	JAMBI	MERANGIN
42	JAMBI	MUARO JAMBI
43	JAMBI	SAROLANGUN
44	JAMBI	SUNGAI PENUH
45	JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT
46	JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR
47	JAMBI	TEBO
48	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN
49	SUMATERA SELATAN	EMPAT LAWANG
50	SUMATERA SELATAN	LAHAT
51	SUMATERA SELATAN	MUSI BANYUASIN
52	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS
53	SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR
54	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR
55	SUMATERA SELATAN	OKU TIMUR
56	SUMATERA SELATAN	PAGAR ALAM
57	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG
58	SUMATERA SELATAN	PALI
59	BENGGKULU	BENGGKULU
60	BENGGKULU	BENGGKULU SELATAN
61	BENGGKULU	BENGGKULU TENGAH
62	BENGGKULU	KAUR
63	BENGGKULU	KEPAHIANG
64	BENGGKULU	MUKOMUKO
65	BENGGKULU	REJANG LEBONG
66	BENGGKULU	SELUMA
67	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG
68	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT
69	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN
70	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH
71	LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR
72	LAMPUNG	LAMPUNG UTARA
73	LAMPUNG	MESUJI
74	LAMPUNG	METRO
75	LAMPUNG	PESAWARAN
76	LAMPUNG	PESISIR BARAT
77	LAMPUNG	PRINGSEWU
78	LAMPUNG	TANGGAMUS
79	LAMPUNG	TULANG BAWANG
80	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT
81	LAMPUNG	WAY KANAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
82	BANGKA BELITUNG	BANGKA
83	BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT
84	BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN
85	BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG
86	KEPULAUAN RIAU	BATAM
87	KEPULAUAN RIAU	BINTAN
88	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN
89	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS
90	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT
91	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT
92	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN
93	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR
94	DKI JAKARTA	JAKARTA UTARA
95	JAWA BARAT	BANDUNG
96	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT
97	JAWA BARAT	BEKASI
98	JAWA BARAT	BOGOR
99	JAWA BARAT	CIAMIS
100	JAWA BARAT	CIANJUR
101	JAWA BARAT	CIREBON
102	JAWA BARAT	DEPOK
103	JAWA BARAT	GARUT
104	JAWA BARAT	INDRAMAYU
105	JAWA BARAT	KARAWANG
106	JAWA BARAT	KOTA BANJAR
107	JAWA BARAT	KOTA BEKASI
108	JAWA BARAT	KOTA BOGOR
109	JAWA BARAT	KOTA CIREBON
110	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI
111	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA
112	JAWA BARAT	KUNINGAN
113	JAWA BARAT	MAJALENGA
114	JAWA BARAT	PANGANDARAN
115	JAWA BARAT	PURWAKARTA
116	JAWA BARAT	SUKABUMI
117	JAWA BARAT	SUMEDANG
118	JAWA BARAT	TASIKMALAYA
119	JAWA TENGAH	BLORA
120	JAWA TENGAH	BOYOLALI
121	JAWA TENGAH	BREBES
122	JAWA TENGAH	CILACAP
123	JAWA TENGAH	GROBOGAN
124	JAWA TENGAH	JEPARA
125	JAWA TENGAH	KARANGANYAR
126	JAWA TENGAH	KEBUMEN
127	JAWA TENGAH	KENDAL
128	JAWA TENGAH	KLATEN
129	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG
130	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL
131	JAWA TENGAH	PATI
132	JAWA TENGAH	PEKALONGAN
133	JAWA TENGAH	PEMALANG
134	JAWA TENGAH	PURBALINGGA
135	JAWA TENGAH	PURWOREJO
136	JAWA TENGAH	REMBANG
137	JAWA TENGAH	SALATIGA
138	JAWA TENGAH	SRAGEN
139	JAWA TENGAH	SURAKARTA
140	JAWA TENGAH	TEGAL
141	JAWA TENGAH	TEMANGGUNG
142	JAWA TENGAH	WONOSOBO
143	DI YOGYAKARTA	BANTUL
144	DI YOGYAKARTA	GUNUNG KIDUL
145	DI YOGYAKARTA	SLEMAN
146	JAWA TIMUR	BANYUWANGI
147	JAWA TIMUR	BOJONEGORO
148	JAWA TIMUR	BONDOWOSO
149	JAWA TIMUR	GRESIK
150	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR
151	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO
152	JAWA TIMUR	LAMONGAN
153	JAWA TIMUR	LUMAJANG
154	JAWA TIMUR	MALANG
155	JAWA TIMUR	MOJOKERTO
156	JAWA TIMUR	NGAWI
157	JAWA TIMUR	PACITAN
158	JAWA TIMUR	PAMEKASAN
159	JAWA TIMUR	PASURUAN
160	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO
161	JAWA TIMUR	SAMPANG
162	JAWA TIMUR	SIDOARJO

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
163	JAWA TIMUR	SITUBONDO
164	JAWA TIMUR	SUMENEP
165	JAWA TIMUR	SURABAYA
166	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG
167	BANTEN	CILEGON
168	BANTEN	KOTA SERANG
169	BANTEN	LEBAK
170	BANTEN	PANDEGLANG
171	BANTEN	SERANG
172	BANTEN	TANGERANG
173	BANTEN	TANGERANG SELATAN
174	BALI	BADUNG
175	BALI	BANGLI
176	BALI	DENPASAR
177	BALI	GIANYAR
178	BALI	JEMBRANA
179	BALI	KARANG ASEM
180	BALI	KLUNGKUNG
181	BALI	TABANAN
182	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA
183	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU
184	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA
185	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT
186	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH
187	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR
188	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA
189	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM
190	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA
191	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT
192	NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR
193	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU
194	NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE
195	NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR
196	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG
197	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
198	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI
199	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT
200	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR
201	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO
202	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA
203	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
204	NUSA TENGGARA TIMUR	SIKKA
205	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT
206	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA
207	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH
208	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR
209	KALIMANTAN BARAT	BENGGAYANG
210	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU
211	KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA
212	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG
213	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK
214	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG
215	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA
216	KALIMANTAN BARAT	LANDAK
217	KALIMANTAN BARAT	MELAWI
218	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK
219	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS
220	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU
221	KALIMANTAN BARAT	SEKADAU
222	KALIMANTAN BARAT	SINTANG
223	KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN
224	KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA
225	KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS
226	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS
227	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN
228	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT
229	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR
230	KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU
231	KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA
232	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKA RAYA
233	KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU
234	KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN
235	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA
236	KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN
237	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR
238	KALIMANTAN SELATAN	BANJARBARU
239	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN
240	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA
241	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN
242	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA
243	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BARU

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
163	JAWA TIMUR	SITUBONDO
164	JAWA TIMUR	SUMENEP
165	JAWA TIMUR	SURABAYA
166	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG
167	BANTEN	CILEGON
168	BANTEN	KOTA SERANG
169	BANTEN	LEBAK
170	BANTEN	PANDEGLANG
171	BANTEN	SERANG
172	BANTEN	TANGERANG
173	BANTEN	TANGERANG SELATAN
174	BALI	BADUNG
175	BALI	BANGLI
176	BALI	DENPASAR
177	BALI	GIANYAR
178	BALI	JEMBRANA
179	BALI	KARANG ASEM
180	BALI	KLUNGKUNG
181	BALI	TABANAN
182	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA
183	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU
184	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA
185	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT
186	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH
187	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR
188	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA
189	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM
190	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA
191	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT
192	NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR
193	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU
194	NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE
195	NUSA TENGGARA TIMUR	FLORES TIMUR
196	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG
197	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
198	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI
199	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT
200	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR
201	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO
202	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA
203	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
204	NUSA TENGGARA TIMUR	SIKKA
205	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT
206	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA
207	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH
208	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR
209	KALIMANTAN BARAT	BENGGAYANG
210	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU
211	KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA
212	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG
213	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK
214	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG
215	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA
216	KALIMANTAN BARAT	LANDAK
217	KALIMANTAN BARAT	MELAWI
218	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK
219	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS
220	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU
221	KALIMANTAN BARAT	SEKADAU
222	KALIMANTAN BARAT	SINTANG
223	KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN
224	KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA
225	KALIMANTAN TENGAH	GUNUNG MAS
226	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS
227	KALIMANTAN TENGAH	KATINGAN
228	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT
229	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR
230	KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU
231	KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA
232	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKA RAYA
233	KALIMANTAN TENGAH	PULANG PISAU
234	KALIMANTAN TENGAH	SERUYAN
235	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA
236	KALIMANTAN SELATAN	BALANGAN
237	KALIMANTAN SELATAN	BANJAR
238	KALIMANTAN SELATAN	BANJARBARU
239	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN
240	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA
241	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN
242	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA
243	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BARU



Lampiran 12. Kasus Zoonosis (Rabies, Anthrax dan Avian Influenza)

No	Provinsi	2019			2020		
		Rabies	Avian Influenza	Anthrax	Rabies	Avian Influenza	Anthrax
1	Aceh	0	0	0	0	0	0
2	Riau	1	0	0	4	0	0
3	Jambi	8	0	0	0	0	0
4	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
5	Sumatera Utara	11	0	0	1	0	0
6	Sumatera Barat	0	0	0	2	0	0
7	Sumatera Selatan	0	0	0	2	0	0
8	Lampung	0	0	0	1	0	0
9	Banten	0	0	0	0	0	0
10	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0
11	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0
12	Bali	4	0	0	2	0	1
13	NTT	14	0	2	5	0	0
14	Sulawesi Barat	1	0	0	0	0	8
15	Sulawesi Utara	15	0	0	7	0	0
16	Sulawesi Tengah	8	0	0	1	0	0
17	Sulawesi Selatan	12	0	7	4	0	0
18	Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	0	0
19	Gorontalo	3	0	3	1	0	0
20	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	24
21	Kalimantan Barat	14	0	0	2	0	0
22	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
23	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
25	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
26	Maluku	2	0	0	2	0	0
27	NTB	13	0	0	6	0	0
28	DIY	0	0	3	0	0	0
29	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	3
Sub Total		107	0	15	40	0	36
Total		122			76		



Lampiran 13. Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen PKH Tahun 2020

Penilaian		Bobot	Nilai
A.	PENGUNGKIT	36,30	32,30
I.	PEMENUHAN	14,60	12,98
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	2,00
	i. Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,40
	ii. Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,40
	iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80	0,80
	iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0,40	0,40
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1,00	1,00
	- Harmonisasi	1,00	1,00
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00	1,32
	i. Evaluasi Kelembagaan	1,00	0,65
	ii. Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	0,67
4	PENATAAN TATALAKSANA	1,00	0,89
	i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0,50	0,39
	ii. Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,50
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40	1,17
	i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0,20	0,20
	ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,20	0,13
	iii. Penetapan Kinerja Individu	0,40	0,31
	iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,20	0,15
	v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20	0,18
	vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0,20	0,20
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50	2,50
	i. Keterlibatan pimpinan	1,00	1,00
	ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,50
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2,20	2,02
	i. Gratifikasi	0,30	0,30
	ii. Penerapan SPIP	0,30	0,23
	iii. Pengaduan Masyarakat	0,50	0,50
	iv. Whistle Blowing System	0,30	0,30
	v. Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,28
	vi. Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,42
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	2,08
	i. Standar Pelayanan	0,40	0,40
	ii. Budaya Pelayanan Prima	0,40	0,38
	iii. Pengelolaan Pengaduan	0,60	0,39
	iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70	0,58
	v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,33
II.	REFORM	21,70	19,32
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00	3,00
	i. Komitmen dalam Perubahan	1,50	1,50
	ii. Komitmen Pimpinan	1,00	1,00
	iii. Membangun Budaya Kerja	0,50	0,50
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	1,50
	- Peran Kebijakan	2,00	1,50
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1,50	1,50
	- Organisasi Berbasis Kinerja	1,50	1,50
4	PENATAAN TATALAKSANA	3,75	3,25
	i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0,50	0,50
	ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1,25	1,25
	iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00	1,50
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2,00	2,00
	i. Kinerja Individu	1,00	1,00
	ii. Assessment Pegawai	0,50	0,50
	iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50	0,50
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75	3,53
	i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00	0,78
	ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	1,00	1,00
	iii. Pemberian Reward and Punishment	1,00	1,00
	iv. Kerangka Logis Kinerja	0,75	0,75
7	PENGUATAN PENGAWASAN	1,95	1,95
	i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75	0,75
	ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0,60	0,60
	iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60	0,60
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75	2,60
	i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50	1,76
	ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25	0,84

Lampiran 14. Hasil Pengukuran IKM Lingkup Ditjen PKH Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah Responden	Nilai Unsur Pelayanan											MUTU	
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Jumlah	Nilai Tertimbang (NRR X 0.11)		Nilai IKM (NT X 25)
1	Subbag Layanan Rekomendasi	6	3,33	3,45	3,16	3,33	3,55	3,50	3,66	3,66	3,00	30,64	3,37	84,26	B
2	Pusvetma	77	3,67	3,67	3,77	3,50	3,75	3,61	3,73	3,64	33,07	3,64	90,94	A	
3	BBPMSOH Gunungsindur	21	3,76	3,71	3,48	3,75	3,43	3,52	4,00	4,00	33,15	3,65	91,18	A	
4	BBVET Wates	135	3,75	3,67	3,45	3,60	3,75	3,75	3,45	4,00	32,92	3,62	90,53	B	
5	BBVET Denpasar	33	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	35,75	3,93	98,31	A	
6	BBVET Maros	23	3,27	3,58	3,24	3,65	3,45	3,39	3,35	3,35	31,03	3,41	85,33	B	
7	BBPTU HPT Baturraden	69	3,57	3,70	3,70	3,57	3,56	3,61	3,65	4,00	33,14	3,65	91,14	A	
8	BBIB Singosari	41	3,37	3,08	3,20	3,40	3,27	3,52	3,42	3,32	30,24	3,33	83,15	B	
9	BIB Lembang	45	3,50	4,00	4,00	3,70	3,50	4,00	4,00	4,00	34,45	3,79	94,74	B	
10	BET Cipelang	155	3,45	3,36	3,25	3,51	3,34	3,42	3,50	3,68	30,93	3,40	85,06	B	
11	BPMSPH Bogor	10	3,45	3,45	3,27	3,53	3,27	3,27	3,45	3,70	31,20	3,43	85,81	B	
12	BPMSP Bekasi	35	3,35	3,28	3,28	3,88	3,45	3,24	3,28	3,62	30,63	3,37	84,23	B	
13	Balai Veteriner Medan	21	3,70	3,61	3,14	3,52	3,39	3,28	3,47	3,60	31,00	3,41	85,25	B	
14	Balai Veteriner Bukittinggi	16	3,88	4,00	3,88	3,63	3,75	4,00	4,00	3,88	34,01	3,74	93,51	B	
15	Balai Veteriner Lampung	22	3,40	3,38	3,27	3,70	3,34	3,34	3,64	3,70	31,42	3,46	86,41	A	
16	Balai Veteriner Banjarbaru	50	3,67	3,26	3,22	3,63	3,76	3,28	3,34	3,44	31,02	3,41	85,31	B	
17	BPTU HPT Indrapuri	23	3,55	3,74	3,84	3,68	3,80	3,82	3,90	3,64	33,45	3,68	91,99	A	
18	BPTU HPT Siborong-borong	7	3,55	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	27,55	3,03	75,76	B	
19	BPTU HPT Sembawa	12	3,50	4,00	3,00	3,35	3,50	4,00	4,00	4,00	32,35	3,56	88,96	A	
20	BPTU HPT Padang Mangatas	18	3,25	3,00	3,58	3,60	3,34	3,05	3,00	3,33	29,65	3,26	81,54	B	
21	BPTU HPT Pelaihari	12	3,37	3,50	3,16	3,55	3,58	3,45	3,57	3,60	31,16	3,43	85,69	B	
22	BPTU HPT Denpasar	30	3,27	3,33	3,37	3,57	3,43	3,57	3,37	3,73	30,93	3,40	85,06	B	
23	Balai Veteriner Subang	16	3,20	3,25	3,21	3,36	3,30	3,32	3,35	3,37	29,64	3,26	81,51	B	
		Jumlah	80,80	81,02	78,45	82,00	80,51	80,94	82,14	81,52	81,94	729,33			
		NRR per unsur	3,51	3,52	3,41	3,57	3,50	3,52	3,57	3,54	3,56	31,71			
		NRR tertimbang per unsur	0,39	0,39	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	3,49			

Lampiran 15. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker Lingkup Ditjen PKH Tahun 2020 Pada Aplikasi SMART Kemenkeu

Monitoring Nilai Kinerja Satker Tahun Anggaran 2020										
Total ada 57 Record										
No.	Kode K/L	Kode Unit	Kode Satker	Nama Satker	Penyerapan Anggaran	Konsistensi atas RPD Awal	Konsistensi atas RPD Akhir	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Kinerja
1.	018	06	019057	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	98.91	49.29	66.04	100.00	20	93.71
2.	018	06	029162	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	98.01	61.87	79.02	100.00	12.42	90.57
3.	018	06	039154	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH	99.64	68.22	70.01	100.00	20	94.51
4.	018	06	049090	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI DIY	99.11	59.07	97.35	85.33	0.31	78.97
5.	018	06	059181	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR	99.27	52.28	90.88	100.00	20	98.27
6.	018	06	069135	DINAS PETERNAKAN ACEH	99.76	67.35	61.74	99.13	0.05	78.37
7.	018	06	079127	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	99.30	48.94	60.83	98.08	-11.57	69.40
8.	018	06	089133	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT	99.57	41.20	62.83	99.91	-0.09	78.79
9.	018	06	099317	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU	98.23	54.31	52.63	100.00	1.90	78.27
10.	018	06	109121	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	99.35	50.79	94.65	95.97	-20	68.61
11.	018	06	119133	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	95.84	61.89	96.91	96.03	3.61	85.59
12.	018	06	129115	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG	99.39	43.02	59.44	100.00	0.61	78.70
13.	018	06	139128	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	95.46	41.96	99.50	99.80	3.59	87.65
14.	018	06	149117	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	97.99	29.78	96.32	100.00	2.01	86.27
15.	018	06	159110	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	96.68	69.42	77.95	89.55	-20	62.51
16.	018	06	169115	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALTIM	94.12	41.03	83.60	92.23	-6.87	73.85
17.	018	06	179106	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	99.48	70.18	60.60	100.00	20	92.78
18.	018	06	189134	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	97.90	76.12	85.55	100.00	20	97.17
19.	018	06	199128	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	94.02	48.62	90.47	69.17	12.02	78.57
20.	018	06	209110	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	97.82	71.37	93.92	100.00	3.78	87.08
21.	018	06	219093	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	100.00	52.62	73.73	100.00	1.58	82.05
22.	018	06	220064	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI	98.75	11.10	86.05	100.00	3.35	85.44
23.	018	06	229102	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	98.38	55.77	98.29	100.00	1.62	86.39
24.	018	06	237551	PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA	99.51	85.99	97.57	100.00	20	99.51
25.	018	06	237856	BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III BANDAR LAMPUNG	98.39	4.01	99.87	100.00	7.69	91.02
26.	018	06	238776	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	96.87	28.71	70.63	100.00	3.86	82.81
27.	018	06	238823	BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN	99.81	85.73	89.82	98.21	-4.86	79.58
28.	018	06	238996	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	98.86	55.37	92.95	100.00	20	98.61
29.	018	06	239001	BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG	95.04	71.98	81.68	100.00	20	96.18
30.	018	06	239015	BALAI BESAR VETERINER MAROS, SULAWESI SELATAN	94.98	43.49	99.10	100.00	20	99.35
31.	018	06	239022	BALAI BESAR VETERINER DENPASAR	95.91	50.70	84.82	100.00	7.68	88.03
32.	018	06	239129	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	97.48	76.60	89.44	100.00	2.52	85.34
33.	018	06	239413	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI ACEH INDRAPURI	94.90	86.24	72.73	99.13	4.37	82.99
34.	018	06	239420	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG	89.11	37.05	73.14	100.00	14.69	90.26
35.	018	06	239434	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS	95.74	83.56	86.26	100.00	4.05	85.68
36.	018	06	239441	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA	97.46	60.79	98.96	100.00	20	99.56
37.	018	06	239455	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI	97.29	55.34	99.60	100.00	8.52	91.46
38.	018	06	239519	BALAI VETERINER MEDAN	98.79	68.45	75.26	100.00	13.19	90.51
39.	018	06	239520	BALAI VETERINER SUBANG	99.16	77.23	86.84	100.00	14.83	93.83
40.	018	06	239523	BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL II BUKITTINGGI	98.27	76.66	90.97	100.00	11.85	92.36
41.	018	06	239544	BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA	99.14	79.90	99.11	100.00	11.30	93.53
42.	018	06	239551	BALAI VETERINER BANJARBARU	99.47	84.34	99.05	100.00	5.49	89.40
43.	018	06	249161	DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	98.24	49.49	76.35	96.54	-20	65.42
44.	018	06	259100	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	98.82	0.26	46.84	82.34	-19.08	54.59
45.	018	06	269112	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU	99.41	53.14	62.14	99.83	-0.52	78.22
46.	018	06	289106	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	98.60	2.71	29.67	100.00	1.65	73.94
47.	018	06	299383	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	96.50	44.64	33.43	100.00	20	87.54
48.	018	06	309166	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	97.84	64.48	74.09	100.00	2.16	82.32
49.	018	06	319091	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	99.41	64.97	69.63	100.00	0.59	80.54
50.	018	06	329080	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	98.28	66.68	98.82	100.00	20	99.62
51.	018	06	339088	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA BARAT	97.86	52.66	67.22	100.00	2.61	81.36
52.	018	06	340143	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	95.42	51.35	52.82	100.00	20	90.97
53.	018	06	411956	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	80.35	77.60	91.35	66.78	-20	53.47
54.	018	06	411962	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	99.18	90.93	90.65	100.00	14.33	94.16
55.	018	06	417859	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	98.78	74.54	73.65	100.00	17.00	92.92
56.	018	06	567275	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	98.15	91.04	93.30	100.00	15.86	95.54
57.	018	06	567282	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN	99.17	73.97	97.14	100.00	16.41	96.83

